



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

**RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2017-2022**

**DINAS KESEHATAN
KOTA YOGYAKARTA
2017**



**WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 11 TAHUN 2017
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2017-2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) dan Pasal 267 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022;
- Mengingat**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

dan

WALIKOTA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2017-2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan Pembangunan Nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
3. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, yang selanjutnya disingkat RPJPD DIY adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat RPJMD DIY adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk periode 5 (lima) tahun.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017 - 2022 yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2022.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2022.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Anggaran pendapatan dan belanja daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

11. Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang.
12. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
13. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
14. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan.
15. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
16. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif yang terdiri dari unsur masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk menentukan apakah tujuan sudah tercapai.
17. Strategi pembangunan adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
18. Kebijakan pembangunan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan.
19. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
20. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
21. Daerah adalah Kota Yogyakarta.
22. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.

BAB II
RUANG LINGKUP RPJMD

Pasal 2

- (1) RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun yang menjabarkan:
 - a. visi dan misi, program Walikota dan Wakil Walikota terpilih; dan
 - b. tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan dan program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
- (2) RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD, Renstra PD dan Renja PD.
- (3) RPJMD berpedoman pada RPJPD dan RPJMN serta memperhatikan :
 - a. RPJMD DIY;
 - b. RTRW; dan
 - c. RPJMD Kabupaten/Kota sekitar.

BAB III
SISTEMATIKA RPJMD

Pasal 3

- (1) Sistematika RPJMD meliputi :
 - a. BAB I : Pendahuluan;
 - b. BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah;
 - c. BAB III : Gambaran Keuangan Daerah;
 - d. BAB IV : Permasalahan dan Isu -Isu Strategis Daerah;
 - e. BAB V : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran;
 - f. BAB VI : Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Pembangunan Daerah;
 - g. BAB VII : Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah;
 - h. BAB VIII : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - i. BAB IX : Penutup.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

RPJMD merupakan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan publik.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Walikota melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. kebijakan perencanaan RPJMD;
 - b. pelaksanaan RPJMD; dan
 - c. hasil RPJMD.
- (3) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (4) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PERUBAHAN RPJMD

Pasal 6

- (1) Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. terjadi perubahan yang mendasar.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan yang tidak mendasar yang bersifat parsial dan/atau perubahan sasaran dan program tetapi tidak mengubah target akhir pencapaian sasaran daerah, maka penetapan perubahan tersebut ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

- (1) Sebelum RPJMD periode selanjutnya ditetapkan, penyusunan RKPD berpedoman pada RPJPD, Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun pertama periode pemerintahan Kepala Daerah terpilih berikutnya.

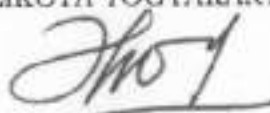
BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 22 November 2017
WALIKOTA YOGYAKARTA,



HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 22 November 2017
SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,



TITI SULASTRI

LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2017 NOMOR 11.
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA (11,63/2017).

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 11 TAHUN 2017
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN
2017-2022

I. UMUM.

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tercantum jelas cita-cita bangsa Indonesia yang sekaligus merupakan tujuan nasional bangsa Indonesia. Tujuan nasional tersebut adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi serta keadilan sosial.

Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai kewajiban dasar untuk menciptakan suatu kehidupan yang sejahtera, baik bersifat materiil maupun imateriil bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa harus mengorbankan sumber daya alam dan sumber daya manusia secara berlebihan dengan harapan tatanan sosial budaya, ekonomi dan pemerintahan tetap stabil, kondusif, demokratis, bertanggung jawab dan berkeadilan. Prinsip dasar etika dalam mewujudkan keadilan hukum sebagaimana terkandung dalam sila-sila Pancasila yang meliputi prinsip-prinsip nilai dasar ketuhanan, kemanusiaan yang beradab, serta keadilan dalam kehidupan sosial kenegaraan Indonesia.

Pemerintah Kota Yogyakarta dalam menjalankan fungsi pemerintahan harus mampu mewujudkan agar cita-cita Negara Indonesia tersebut dapat terwujud, oleh karena itu Pemerintah Kota Yogyakarta mempunyai fungsi utama yang harus dijalankan saat ini adalah *Public Service Function* (fungsi pelayanan masyarakat), *development Function* (fungsi pembangunan), dan *protection function* (fungsi perlindungan). *Good governance* akan terwujud apabila setiap aparat pemerintah telah mampu melaksanakan apa yang disebut sebagai *objective and subjective responsibility*. *Responsibility objective* bersumber pada adanya pengendalian dari luar (*external controls*) yang mendorong atau memotivasi aparat untuk bekerja keras sehingga tujuan *three es* (*economy, efficiency and effectiveness*) dari organisasi perangkat daerah dapat tercapai (Denhardt, 2003).

Dalam penyelenggaraan pembangunan di Kota Yogyakarta diperlukan sinergitas dengan visi, misi, dan program Kepala Daerah yang diwujudkan dalam strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, program prioritas yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Kemajuan pembangunan Kota Yogyakarta perlu didukung dengan pemberian pelayanan bermutu dan berkualitas serta mempunyai daya saing tinggi. Disisi lain diperlukan peran serta dunia usaha dan swasta dalam turut serta mewujudkan tujuan pembangunan sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah disusun dengan tetap mengacu dan memperhatikan tujuan sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional. Dengan adanya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah diharapkan menghasilkan perkembangan pembangunan yang dapat bermanfaat untuk masyarakat khususnya masyarakat Kota Yogyakarta.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ini pada awalnya disusun mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 mengenai Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Namun dalam perjalanannya, ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 mengenai Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada tanggal 25 September 2017. Oleh karena itu, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ini mengalami penyesuaian mengikuti aturan tersebut, sejak tanggal diundangkannya.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

KATA PENGANTAR

Sebagai amanat Undang-Undang nomor 25 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah nomor 8 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, serta mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022, maka Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta telah menguikan dokumen Rencana strategis (**RENSTRA**) sebagai acuan pembangunan bidang kesehatan selama lima tahun mendatang.

Renstru Dinas Kesehatan merupakan satu dokumen perencanaan indibatif yang menyjabarkan visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi serta program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta. Penyusunan Renstru ini dihasitikan melalui proses yang ingin dicapai sampai dengan tahun 2022 secara sistematis, berkesinambungan dengan memperhatikan lunegya pembangunan yang sedang berjalan, dinamika lingkungan strategi, kelemahan dan kekuatannya serta peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

Demikian Rencana Strategis (**RENSTRA**) Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022 disusun untuk dapat digunakan sebagai aman dan arahan dalam melaksanakan kegiatan di Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan Rahmat dan Karunia-Nya serta petunjuk kepada kita semua dalam melaksanakan pembangunan Kesehatan di Kota Yogyakarta sehingga Visi dan Misi yang telah ditetapkan dapat terwujud dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GRAFIK	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	I 1
1.1. LATAR BELAKANG	I 1
1.2. LANDASAN HUKUM	I 3
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN	I 5
1.3.1. Maksud.....	I 5
1.3.2. Tujuan.....	I 6
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN	I 7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	II 1
2.1. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	II 1
2.1.1. Tugas.....	II 1
2.1.2. Fungsi	II 1
2.1.3. Struktur Organisasi	II 1
2.1.4. Tugas Pokok dan Fungsi	II 2
2.2. SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH	II 10
2.2.1. Sumber Daya Manusia di Lingkungan Dinas Kesehatan.....	II 10
2.2.2. Sarana Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta	II 13
2.2.3. Prasarana Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta.....	II 13
2.2.4. Program Pelayanan Kesehatan dan Inovasi.....	II 16
2.3. KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	II 16
2.3.1. Kinerja Pelayanan	II 16
2.3.2. Kinerja Keuangan.....	II 27
2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	II 51
2.4.1. Kekuatan (Strenght).....	II 51
2.4.2. Kelemahan (Weakness).....	II 51
2.4.3. Peluang(Oppoturnities)	II 51
2.4.4. Ancaman (Treats)	II 51
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	III 1
3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	III 1

3.1.1. Gambaran Umum.....	III 1
A. Geografi.....	III 1
B. Demografi.....	III 3
3.1.2. Derajat Kesehatan	III 5
A. Mortalitas.....	III 5
B. Morbiditas.....	III 7
3.2. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH	III 14
3.3. TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA DIY	III 19
3.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS.....	III 22
3.4.1 TELAAHAN TATA RUANG DAN WILAYAH	III 22
3.4.1 TELAAHAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP YANG STRATEGIS	III 24
3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS.....	III 25
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	IV 1
4.1 VISI DAN MISI	IV 1
4.2 TUJUAN DAN SASARAN.....	IV 1
4.3 TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	IV 1
4.3.1. Tujuan.....	III 2
4.3.2. Sasaran.....	III 2
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	IV 1
5.1 STRATEGI	IV 1
5.2 ARAH KEBIJAKAN.....	IV 1
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	IV 1
6.1 RENCANA PROGRAM	VI 1
6.2 RENCANA KEGIATAN.....	VI 1
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN KESEHATAN	VII 1
BAB VIII PENUTUP.....	VIII 1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Distribusi Pegawai Menurut Jenis Pendidikan di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Tahun 2016.....	II 10
Tabel 2.2	Distribusi Pegawai Tetap (PNS) Menurut Pangkat di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Tahun 2016.....	II 12
Tabel 2.3	Sarana Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Tahun 2016.....	II 13
Tabel 2.4	Distribusi Prasarana di Dinas Kesehatan Tahun 2016	II 13
Tabel 2.5	Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2016.....	II 16
Tabel 2.6	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016.....	II 19
Tabel 2.7	Realisasi Belanja Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Tahun 2012-2017.....	II 27
Tabel 2.8	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016.....	II 28
Tabel 3.1	Luas Wilayah Berdasarkan Ketinggian Wilayah kecamatan di Kota Yogyakarta.....	III 2
Tabel 3.2	Luas Wilayah Kota Yogyakarta Berdasarkan Kemiringan lahan	III 3
Tabel 3.3	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan.....	III 12
Tabel 3.4	Visi, Misi, Tujuan , Sasaran Walikota – Wakil Walikota Yogyakarta.....	III 15
Tabel 3.5	Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Kesehatan terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	III 16
Tabel 3.6.	Permasalahan Pelayanan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta berdasarkan Sasaran renstra Kementrian Kesehatan.....	III 20
Tabel 3.7	Permasalahan Pelayanan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Kesehatan Daerah istimewa Yogyakarta.....	III 21
Tabel 3.8	Hasil Telaah Struktur ruang Wilayah	III 23
Tabel 3.9.	Hasil Telaah Pola Ruang.....	III 23
Tabel 3.10.	Permasalahan Pelayanan Dinas Kesehatan berdasarkan Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.....	III 23
Tabel 3.11	Permasalahan Pelayanan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta berdasarkan Analisis KLHS beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Penanganannya.....	III 24
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakarta	IV 2

Tabel 4.2	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Kesehatan kota Yogyakarta.....	IV 3
Tabel 5.1	Sasaran dan Strategi Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta	V 3
Tabel 5.2	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta.....	V 3
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta.....	VI 3
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Sasaran Dinas Kesehatan yang mengacu pada Tujuan dan sasaran RPJMD.....	VII 1
Tabel 7.2	Indikator Kinerja Dinas Kesehatan yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	VII 1

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1	Jumlah Penduduk Kota Yogyakarta 2013 - 2016.....	III 3
Grafik 3.2	Jumlah Penduduk Laki – Laki dan Perempuan Yogyakarta 2016... ..	III 4
Grafik 3.3	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur di Kota Yogyakarta 2016	III 5
Grafik 3.4	Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup di Kota Yogyakarta 2012 - 2016.....	III 5
Grafik 3.5	Angka Kematian Bayi Per 1000 Kelahiran Hidup di Kota Yogyakarta 2012 - 2016.....	III 6
Grafik 3.6	Angka Kematian Balita Per 1000 Kelahiran Hidup di Kota Yogyakarta 2012 - 2016.....	III 7
Grafik 3.7	Kasus baru TB BTA (+) dan Angka Prevalensi TB di Kota Yogyakarta 2012 - 2016.....	III 7
Grafik 3.8	Jumlah Penderita Demam Berdarah di Kota Yogyakarta 2012 - 2016.....	III 8
Grafik 3.9	Kumulatif Kasus HIV dan Trend Epidemi di Kota Yogyakarta 2012 – 2016.....	III 9
Grafik 3.10	Kumulatif Kasus AIDS dan Trend Epidemi di Kota Yogyakarta 2012 - 2016.....	III 10
Grafik 3.11	Prevalensi Balita Gizi Buruk dan Gizi Kurang di Kota Yogyakarta 2012 - 2016... ..	III 11

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1.	Stuktur Organisasi Dinas kesehatan Kota Yogyakarta	II 9
Gambar 3.1.	Peta Administrasi Kota Yogyakarta	III 1

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan kesehatan pada hakekatnya adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen Bangsa Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Keberhasilan pembangunan kesehatan sangat ditentukan oleh kesinambungan antar program dan kegiatan, serta kesinambungan dengan upaya-upaya yang telah dilaksanakan oleh periode sebelumnya.

Pembangunan kesehatan pada periode 2015 - 2019 adalah Program Indonesia Sehat dengan sasaran meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang di dukung dengan perlindungan finansial dan pemerataan pelayanan kesehatan. Sasaran pokok RMJMN 2015-2019 adalah; meningkatnya status kesehatan dan gizi ibu dan anak ; meningkatnya pengendalian penyakit ; meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan terutama di daerah terpencil, tertinggal, dan perbatasan; meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan universal melalui Kartu Indonesia Sehat dan kualitas pengelolaan SJSN Kesehatan; terpenuhinya kebutuhan tenaga kesehatan, obat dan vaksin; serta meningkatkan responsivitas sistem kesehatan.

Program Indonesia Sehat dilaksanakan dengan 3 pilar utama yaitu paradigma sehat, penguatan pelayanan kesehatan dan jaminan kesehatan nasional. Pilar paradigma sehat dilakukan dengan strategi pengarusutamaan kesehatan dalam pembangunan, penguatan promotif preventif dan pemberdayaan masyarakat. Penguatan pelayanan kesehatan dilakukan dengan strategi peningkatan akses pelayanan kesehatan, optimalisasi sistem rujukan dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan, menggunakan pendekatan *continuum of care* dan intervensi berbasis resiko kesehatan. Jaminan Kesehatan nasional dilakukan dengan strategi perluasan sasaran dan benefit serta kendali mutu dan kendali biaya.

Pembangunan Kesehatan di kota Yogyakarta bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap warga masyarakat agar terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya, dengan ditandai oleh penduduknya yang berperilaku hidup bersih dan sehat dan hidup dalam lingkungan yang sehat, serta memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu secara adil dan merata di seluruh wilayah Kota Yogyakarta. Untuk

mencapai tujuan tersebut diselenggarakan pembangunan kesehatan baik oleh pemerintah kota, masyarakat, maupun swasta.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta perlu menyiapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang dilaksanakan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) oleh unsur penyelenggaraan pemerintahan di daerah dengan melibatkan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 260 dan 261 menyebutkan bahwa proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan oleh perangkat daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah disusun menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif dan politis, serta menggunakan pendekatan yang mempertemukan perencanaan yang bersifat dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas. Kajian akademis merupakan salah satu bentuk pendekatan teknokratis dalam perencanaan pembangunan. Pendekatan teknokratis menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Sesuai dengan ketentuan pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 bahwa Bappeda dalam penyusunan rancangan awal RPJMD harus berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJM Nasional, kondisi lingkungan strategis di daerah, serta hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran visi, misi, dan program Walikota yang memuat kebijakan umum pembangunan daerah, kebijakan umum keuangan daerah, strategi dan program perangkat daerah, lintas perangkat daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Rencana strategis merupakan proses berkelanjutan dan sistematis yang terintegrasi dengan dokumen perencanaan lainnya, baik di tingkat pusat maupun daerah. Melalui perencanaan strategis dapat diperoleh informasi tentang visi, misi, strategi dan kebijakan, tujuan, sasaran dan aktivitas organisasi serta cara

mencapai tujuan dan sasaran tersebut dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi instansi yang bersangkutan. Rencana Strategis PD yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif yang memuat program-program pembangunan Kesehatan yang merupakan penjabaran dari kebijakan PD untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan visi dan misi Dinas Kesehatan yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta maupun dengan mendorong peran aktif masyarakat untuk kurun waktu tahun 2017-2022.

Melalui program jangka menengah 5 (lima) tahunan yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta 2017-2022 diharapkan mampu menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Dinas Kesehatan tiap tahun. Renstra Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022 merupakan penjabaran dokumen perencanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta 2017-2022 dari visi, misi dan program Kepala Daerah, yang dalam proses penyusunannya berpedoman kepada RPJP Daerah dengan memperhatikan RPJMD. Renstra tersebut juga bersinergi dengan RPJMN, Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2015 – 2019, dan Renstra Dinas Kesehatan DIY. Renstra Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan dan dijabarkan setiap tahun ke dalam Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta sebagai pedoman dalam penyusunan RKA Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta yang mengacu pada Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Anggaran Sementara (PPAS). Renstra Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta juga merefleksikan rencana program yang ada di dalam renstra Dinas Kesehatan Propinsi DIY agar tetap sinergis dalam penyusunan perencanaan kegiatan tiap tahunnya.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundangan yang digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2017-2022 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Djogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2004 Indonesia Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Praktek Kedokteran;
6. Undang – Undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan;
7. Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2011 tentang Rumah Sakit;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
13. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Pratik Mandiri Dokter Gigi;

17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 tahun 2017 tentang akreditasi Rumah sakit;
20. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
21. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025;
22. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta;
23. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
24. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022;
25. Peraturan Walikota Yogyakarta nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perizinan;
26. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 60 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 119 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 60 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta;
27. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 70 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta disusun dengan maksud menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar wilayah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah,

serta sebagai pedoman bagi seluruh personil organisasi Dinas Kesehatan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk lima tahun mendatang melalui pelaksanaan program dan kegiatan di bidang kesehatan.

1.3.2. Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta tahun 2017-2022 dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang tujuan, sasaran, program, dan kegiatan serta indikator kinerja Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta tahun 2017-2022 adalah:

1. Menjamin keselarasan antara tujuan dan sasaran pembangunan Pemerintah Kota Yogyakarta dengan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, sehingga akan bermanfaat bagi proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban bagi Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta.
2. Sebagai pedoman bagi seluruh Bagian di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan yang memuat program dan kegiatan.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra DIY
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas , Fungsi Dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta, menyebutkan bahwa kedudukan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta adalah Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan yang terdiri dari :

1. 1 (satu) sekretariat, terdiri dari 3 (tiga) Sub. Bagian;
2. 4 (empat) bidang dan masing-masing bidang sebanyak 3 (tiga) seksi

2.1.1 Tugas

Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan bidang kesehatan.

2.1.2 Fungsi

Untuk menjalankan tugas pokok Dinas Kesehatan tersebut maka ditetapkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 70 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta. Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Dinas Kesehatan mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis bidang kesehatan
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kesehatan
3. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan urusan di bidang kesehatan
4. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesehatan
5. Pengelolaan kesekretariatan meliputi perencanaan umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan
6. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan

2.1.3 Struktur Organisasi

Unsur-unsur organisasi Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

3. Bidang Kesehatan Masyarakat, terdiri dari :
 - a. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi;
 - b. Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
 - c. Seksi Penyehatan Lingkungan dan Kesehatan Kerja.
4. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, terdiri dari:
 - a. Seksi Surveilans dan Sistem Informasi Kesehatan;
 - b. Seksi Pencegahan, Pengendalian Penyakit Menular dan Imunisasi; dan
 - c. Seksi Pencegahan, Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa.
5. Bidang Pelayanan Kesehatan, terdiri dari:
 - a. Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Rujukan;
 - b. Seksi Pelayanan Kesehatan Khusus; dan
 - c. Seksi Penjaminan dan Peningkatan Mutu Kesehatan.
6. Bidang Regulasi dan Sumberdaya Kesehatan
 - a. Seksi Regulasi dan Sertifikasi Bidang Kesehatan;
 - b. Seksi Pengembangan Kapasitas Sumberdaya Manusia; dan
 - c. Seksi Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman.
7. Unit Pelaksana Teknis
8. Kelompok Jabatan Fungsional

2.1.4 Tugas Pokok Dan Fungsi

Tugas dan Fungsi dari masing-masing struktural yang duduk dalam organisasi Dinas Kesehatan adalah sebagai berikut :

1. Sekretariat
 - a. Tugas

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina, dan mengendalikan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang umum, perlengkapan, kepegawaian dan keuangan.
 - b. Fungsi
 - 1) Penyiapan bahan koordinasi, pengolahan data dan penyusunan program kerja di Lingkungan dinas
 - 2) Penyiapan bahan administrasi, akuntansi dan pelaporan keuangan
 - 3) Pengelolaan administrasi kepegawaian
 - 4) Pengelolaan persuratan, tata naskah dinas, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga, perjalanan dinas, kehumasan dan protokol
 - 5) Penyiapan bahan penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan program kerja dinas

A. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam merumuskan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pemberian bimbingan di bidang pengelolaan administrasi umum, tatalaksana, kehumasan, perpustakaan, kearsipan, dokumentasi, perlengkapan, pengelolaan barang dan administrasi kepegawaian.

B. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam merumuskan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pemberian bimbingan di bidang pengelolaan administrasi keuangan dan pelaporan pertanggungjawaban.

C. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam merumuskan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pemberian bimbingan di bidang perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan

2. Bidang Kesehatan Masyarakat

a. Tugas

Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan program bidang kesehatan masyarakat.

b. Fungsi

- 1) Pelaksanaan kebijakan dan penyiapan bahan koordinasi penyusunan program kerja di bidang kesehatan masyarakat
- 2) Perencanaan program kegiatan, penyusunan petunjuk teknis dan naskah dinas di bidang kesehatan masyarakat
- 3) Pengkoordinasian, pengembangan dan fasilitasi program kerja di bidang kesehatan masyarakat
- 4) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian program kerja di bidang kesehatan masyarakat
- 5) Pelaksanaan monitoring evaluasi, dan pelaporan program kerja di bidang kesehatan masyarakat

Bidang Kesehatan Masyarakat membawahi tiga seksi, antara lain:

- A. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan pengawasan, pengendalian dan pemberian kegiatan di bidang kesehatan keluarga dan gizi.

- B. Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan pengawasan, pengendalian dan pemberian kegiatan di bidang promosi dan pemberdayaan masyarakat kesehatan.
- C. Seksi Penyehatan Lingkungan dan Kesehatan Kerja yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan pengawasan, pengendalian dan pemberian kegiatan di bidang penyehatan lingkungan dan kesehatan kerja

3. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

a. Tugas

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai fungsi membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan program di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit

b. Fungsi

- 1) Pelaksanaan kebijakan dan penyiapan bahan koordinasi penyusunan program kerja di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit
- 2) Perencanaan program kegiatan, penyusunan petunjuk teknis dan naskah dinas di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit
- 3) Pengkoordinasian, pengembangan dan fasilitasi program kerja di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit
- 4) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian program kerja di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit
- 5) Pelaksanaan monitoring evaluasi, dan pelaporan program kerja di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit membawahi tiga seksi, antara lain :

- A. Seksi Surveilans dan Sistem Informasi Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan pengawasan, pengendalian dan pemberian kegiatan di bidang surveilans dan system informasi kesehatan.
- B. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Imunisasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan pengawasan, pengendalian dan pemberian kegiatan di bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Imunisasi.
- C. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan

perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan pengawasan, pengendalian dan pemberian kegiatan di bidang Pencegahan dan pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa.

4. Bidang Pelayanan Kesehatan

a. Tugas

Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan program di bidang Pelayanan Kesehatan.

b. Fungsi

- 1) Pelaksanaan kebijakan dan penyiapan bahan koordinasi penyusunan program kerja di bidang pelayanan kesehatan.
- 2) Perencanaan program kegiatan, penyusunan petunjuk teknis dan naskah dinas di bidang pelayanan kesehatan.
- 3) Pengkoordinasian, pengembangan dan fasilitasi program kerja di bidang pelayanan kesehatan.
- 4) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian program kerja di bidang pelayanan kesehatan.
- 5) Pelaksanaan monitoring evaluasi, dan pelaporan program kerja di bidang pelayanan kesehatan.

Bidang Pelayanan Kesehatan membawahi tiga seksi, antara lain:

- A. Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Rujukan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan pengawasan, pengendalian dan pemberian kegiatan di bidang pelayanan kesehatan Primer dan Rujukan.
- B. Seksi Pelayanan Kesehatan Khusus mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan pengawasan, pengendalian dan pemberian kegiatan di bidang Pelayanan Kesehatan Khusus.
- C. Seksi Penjaminan dan Peningkatan Mutu Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan pengawasan, pengendalian dan pemberian kegiatan di bidang Penjaminan dan Peningkatan Mutu Kesehatan.

5. Bidang Regulasi dan Sumberdaya Kesehatan

a. Tugas

Bidang Regulasi dan Sumberdaya Kesehatan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan program di bidang Regulasi dan Sumberdaya Kesehatan

b. Fungsi

- 1) Pelaksanaan kebijakan dan penyiapan bahan koordinasi penyusunan program kerja di bidang Regulasi dan Sumberdaya Kesehatan
- 2) Perencanaan program kegiatan, penyusunan petunjuk teknis dan naskah dinas di bidang Regulasi dan Sumberdaya Kesehatan
- 3) Pengkoordinasian, pengembangan dan fasilitasi program kerja di bidang Regulasi dan Sumberdaya Kesehatan
- 4) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian program kerja di bidang Regulasi dan Sumberdaya Kesehatan
- 5) Pelaksanaan monitoring evaluasi, dan pelaporan program kerja di bidang Regulasi dan Sumberdaya Kesehatan

Bidang Regulasi dan Sumberdaya Kesehatan membawahi tiga seksi, antara lain :

- A. Seksi Regulasi dan Sertifikasi Bidang Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan pengawasan, pengendalian dan pemberian kegiatan di bidang Regulasi dan Sertifikasi Bidang Kesehatan
- B. Seksi Pengembangan Kapasitas Sumberdaya Manusia Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan pengawasan, pengendalian dan pemberian kegiatan di bidang Pengembangan Kapasitas Sumberdaya Manusia
- C. Seksi Farmasi, Alat Kesehatan, Makanan dan Minuman mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan pengawasan, pengendalian dan pemberian kegiatan di bidang Farmasi, Alat Kesehatan, Makanan dan Minuman

6. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Masyarakat

Menurut Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Rincian Tugas Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta dan Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Fungsi dan rincian Tugas Unit Pelaksana teknis Rumah Sakit Pratama pada Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, maka susunan organisasi Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta terdiri dari:

1. Kepala UPT
2. Sub Bagian Tata Usaha
3. Kelompok Jabatan Fungsional

Fungsi dan Rincian tugas dari masing-masing struktural dalam organisasi Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Dinas Kesehatan adalah sebagai berikut :

1. UPT Puskesmas

a. Fungsi

Pelayanan kesehatan strata pertama, pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan dan penggerak pembangunan berwawasan kesehatan.

b. Tugas

- 1) mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan masyarakat
- 2) merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Puskesmas;
- 3) menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis sesuai bidang tugasnya;
- 4) melaksanakan upaya kesehatan masyarakat;
- 5) melaksanakan upaya kesehatan perorangan;
- 6) melaksanakan pelayanan upaya kesehatan/ kesejahteraan ibu dan anak, keluarga berencana, perbaikan gizi, perawatan kesehatan masyarakat, pencegahan dan pemberantasan penyakit, pembinaan kesehatan lingkungan, penyuluhan kesehatan masyarakat, usaha kesehatan sekolah, kesehatan olahraga, pengobatan termasuk pelayanan darurat karena kecelakaan, kesehatan gigi dan mulut, laboratorium sederhana, upaya kesehatan kerja, kesehatan usia lanjut, upaya kesehatan jiwa, kesehatan mata dan kesehatan khusus lainnya serta pembinaan pengobatan tradisional.
- 7) melaksanakan pembinaan upaya kesehatan, peran serta masyarakat, koordinasi semua upaya kesehatan, sarana pelayanan kesehatan, pelaksanaan rujukan medik, pembantuan sarana dan pembinaan teknis kepada Puskesmas Pembantu, unit pelayanan kesehatan swasta serta kader pembangunan kesehatan;
- 8) melaksanakan pengembangan upaya kesehatan dalam hal pengembangan kader pembangunan di bidang kesehatan dan pengembangan kegiatan swadaya masyarakat di wilayah kerjanya;
- 9) melaksanakan pencatatan dan pelaporan dalam rangka sistem informasi kesehatan;
- 10) melaksanakan ketatausahaan dan urusan rumah tangga UPT;
- 11) melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja UPT;
- 12) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

2. UPT Rumah Sakit Pratama

a. Fungsi

- 1) Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit
- 2) Pengobatan dan pemulihan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan
- 3) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan
- 4) Penyelenggaraan penapisan teknologi bidang kesehatan secara selektif sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan rumah sakit dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan

b. Tugas

- 1) Mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan dan melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pengolahan dan pelayanan kesehatan rumah sakit
- 2) Menyusun rencana kerja serta anggaran pendapatan dan belanja
- 3) Menyelenggarakan pelayanan medik
- 4) Menyelenggarakan pelayanan keperawatan
- 5) Menyelenggarakan perencanaan peningkatan mutu dan keselamatan pasien
- 6) Menyelenggarakan pelayanan kefarmasian
- 7) Menyelenggarakan pelayanan kebidanan
- 8) Menyelenggarakan pelayanan penunjang klinik
- 9) Menyelenggarakan pelayanan penunjang nonklinik
- 10) Menyelenggarakan pelayanan rawat inap
- 11) Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan dalam bidang pelayanan kesehatan
- 12) Mengembangkan dan meningkatkan pelayanan medik, pelayanan keperawatan, penunjang dan peralatan medik dengan menggunakan sumber daya yang ada sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
- 13) Mengendalikan pelaksanaan kegiatan peningkatan mutu pelayanan kesehatan dan pemantauan kegiatan
- 14) Melaksanakan ketatausahaan dan urusan rumah tangga
- 15) Melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja

Gambar 2.1

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KESEHATAN KOTA YOGYAKARTA



2.2 Sumber Daya Dinas Perangkat Daerah

2.2.1 Sumber Daya Manusia di Lingkungan Dinas Kesehatan

Jumlah pegawai Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta pada tahun 2016 sebanyak **767** orang tersebar di UPT (Puskesmas dan RS Pratama) yang terdiri dari 655 PNS dan 112 Naban. Distribusi pegawai menurut jenis pendidikan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1

Distribusi Pegawai Menurut Jenis Pendidikan di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Tahun 2016

NO	PENDIDIKAN	TAHUN 2016				JUMLAH TOTAL
		DINKES		UPT		
		PNS	NABAN	PNS	NABAN	
1	Spesialis Kedokteran Gigi Anak	0	0	1	0	1
2	Spesialis Dokter Anak	0	0	2	0	2
3	Spesialis Ilmu Kesehatan Anak	1	0	0	0	1
4	Spesialis Kedokteran Radiologi	0	0	1	0	1
5	S2 Epidemiologi	0	0	1	0	1
7	S2 IKM	0	0	0	0	0
8	S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat	7	0	4	0	11
9	S2 Kesehatan Masyarakat	0	0	0	0	0
10	S2 KIA	0	0	1	0	1
11	S2 Magister Administrasi Public	0	0	2	0	2
12	S2 Magister Kesehatan	1	0	0	0	1
13	S2 Magister Manajemen	1	0	0	0	1
14	S2 Magister Manajemen RS	0	0	1	0	1
15	S2 Magister Promosi Kesehatan	1	0	0	0	1
16	S2 Manajemen Asuransi Kesehatan	2	0	1	0	3
17	S2 Manajemen Sumber Daya Manusia	1	0	1	0	2
18	S1 Administrasi Negara	0	0	1	0	1
19	S1 Apoteker	0	0	11	1	12
20	S1 Ekonomi	2	0	3	0	5
21	S1 Ekonomi Akuntansi	0	0	0	0	0
22	S1 Gizi	2	0	1	0	3
23	S1 Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	1	0	1	0	2
24	S1 Kedokteran	4	0	69	0	73
25	S1 Kedokteran Gigi	2	0	31	0	33
26	S1 Kesehatan Lingkungan	0	0	1	0	1
27	S1 Kesehatan Masyarakat	11	0	10	0	21
28	S1 Pemerintahan	0	0	1	0	1
29	S1 Perawat	1	0	4	0	5
30	S1 Perawat (ners)	0	0	1	0	1
31	S1 Pertanian	0	1	0	0	1
32	S1 Sanitarian	1	0	0	0	1

33	D4 Dental Spesialis Asisten	0	0	3	0	3
34	D4 Epidemiologi	1	0	0	0	1
35	D4 Gizi	0	0	5	0	5
36	D4 Bidan	0	0	11	0	11
37	D4 Kesehatan Gigi	1	0	8	0	9
38	D4 Kesehatan Lingkungan	4	0	4	0	8
39	D4 Perawat	0	0	12	0	12
40	D3 Administrasi	0	0	1	0	1
41	D3 Akuntansi	4	0	0	0	4
42	D3 Analisis	0	0	0	0	0
43	D3 Analisis Kesehatan	1	2	17	3	23
44	D3 Bidan	0	0	0	3	3
45	D3 Ekonomi	1	0	1	0	2
46	D3 Elektromedis	0	0	1	0	1
47	D3 Gizi	1	1	16	1	19
48	D3 Kebidanan	1	0	55	0	56
49	D3 Keperawatan	0	0	0	0	0
50	D3 Kesehatan Gigi	2	0	28	0	30
51	D3 Kesehatan Lingkungan	4	0	14	0	18
52	D3 Komp & Sist Informasi	2	0	0	0	2
53	D3 Management Administrasi	0	0	1	0	1
54	D3 Penata Rontgen	0	0	0	1	1
55	D3 Perawat	1	0	38	0	39
56	D3 Rekam Medik	0	0	15	0	15
57	D3 Teknik Radiologi	0	0	1	0	1
58	D1 Bidan	0	0	6	0	6
59	KPAA	1	0	0	0	1
60	Paket C	0	0	1	0	1
61	Pekarya	0	0	2	0	2
62	SAA	0	0	1	0	1
63	Sd	0	0	10	6	16
64	Sd Paket A	0	0	0	1	1
65	SLTA	12	9	50	63	134
66	SLTAK	0	0	13	0	13
67	SLTP	2	0	19	8	29
68	Sma	0	0	0	0	0
69	SMAK	1	0	0	0	1
70	SMEA	1	0	5	0	6
71	SMF	0	0	33	0	33
72	SMIK	0	0	1	0	1
73	Smk	0	0	0	9	9
74	SMKK	0	0	3	1	4
75	Smp	0	0	0	0	0
76	SPAG	0	0	3	0	3
77	SPG	0	0	1	0	1

78	SPK	0	0	28	0	28
79	SPPH	1	0	7	0	8
80	SPRG	0	0	5	0	5
81	Stm	0	1	7	0	8
82	STM Teknik Mesin	0	0	1	0	1
83	-	0	0	0	1	1
	Jumlah	79	14	576	98	767

Sumber: Profil Dinas Kesehatan, 2016

Selain menurut jenis pendidikan, pembagian pegawai di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta juga dilakukan menurut pangkat / golongan, adapun distribusi menurut pangkat / golongan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2

Distribusi Pegawai Tetap (PNS) Menurut Pangkat di Lingkungan Dinas Kesehatan Tahun 2016

PANGKAT/GOL	Dinas Kesehatan	UPT (Puskesmas,PJKD dan Farmasi)	JUMLAH TOTAL
Juru Muda, I/a	0	0	0
Juru Muda Tk I/b	0	0	0
Juru, I/c	1	8	9
Juru Tk I, I/d	0	1	1
Pengatur Muda, II/a	1	9	10
Pengatur Muda Tk I, II/b	3	11	14
Pengatur, II/c	3	50	53
Pengatur Tk I, II/d	5	54	59
Penata Muda, III/a	10	46	56
Penata Muda Tk I, III/b	24	67	91
Penata, III/c	12	97	109
Penata Tk I, III/d	10	187	197
Pembina, IV/a	8	33	41
Pembina Tk I, IV/b	1	7	8
Pembina Utama Muda, IV/c	1	2	3
Pembina Utama Madya, IV/d	0	2	2
Pembina Utama, IV/e	0	2	2
J u m l a h	79	576	655

2.2.2 Sarana Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta

Sarana yang dimiliki Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta seperti tersebut di bawah ini :

Tabel 2.3

Sarana Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Tahun 2016

- Puskesmas Induk	= 18 Unit
- Puskesmas Pembantu	= 8 Unit
- Rumah Sakit Umum Kelas D	= 1 Unit

2.2.3 Prasarana Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta

Tabel 2.4

Distribusi Prasarana di Dinas Kesehatan Tahun 2016

NO	Nama barang	Kondisi			Jumlah
		Baik	Kurang Baik	Rusak Berat	
1	AC	18	4	1	23
2	Almari Besar 2 Pintu	1			1
3	Almari Besi	10			10
4	Almari Besi 2 Pintu	1			1
5	Almari Besi lerek Kaca	2			2
6	Almari Besi P3K	1			1
7	Almari Buku	2			2
8	Almari Kayu	7			7
9	ALMARI KAYU 2 PINTU	9			9
10	Almari Kayu 3 Pintu	2			2
11	Almari Kayu 4 Pintu (6)	1			1
12	Almari Kayu Kaca	2			2
13	Almari Kayu Kunci kecil	1			1
14	Almari Kayu Lerek Kaca	1			1
15	Almari Lerek Kaca	24			24
16	Almari Lerek Kayu	3			3
17	Almari Loker Kayu	1			1
18	Almari Slerek Kaca	3			3
19	Bivet Kayu	1			1
20	Brankas Besar	1			1
21	Brankas Sedang	1			1
22	Calculator	8			8
23	Camera CCTV	6			6
24	Dispenser	6			6
25	Filing Kabinet	48			48
26	Filing Kabinet Arsip	1			1
27	Filling Cabinet Plastik	3			3
28	Filling Cabinet Plastik	2			2

29	Gambar Presiden dan Wapres	2			2
30	GPS	3			3
31	Harddis Eksternal	1			1
32	HT	7			7
33	Jam Dinding	21			21
34	Jaringan LAN	1			1
35	JUNIPER SRX 100-2 (SERVER)	1			1
36	Kaca Rias	2			2
37	Kaca Rias	1			1
38	Kamera Fuji Film	1			1
39	Kamera Sony	2			2
40	Kipas Angin Berdiri	6			6
41	Kipas Angin Dinding	1			1
42	Kipas Angin Duduk	3			3
43	Kipas Angin Gantung	9			9
44	KOMPOR GAS 2 TUNGKU	1			1
45	Komputer	42	1		43
46	Komputer Tablet Lenovo	1			1
47	Kulkas	1			1
48	Kulkas 1 Pintu	1			1
49	Kursi Besi Spon	9			9
50	Kursi hadap	28			28
51	KURSI KAYU	19			19
52	Kursi Kayu Bundar	1			1
53	Kursi Kayu Bundar	1			1
54	Kursi Kayu Spon	6			6
55	Kursi Lipat	123		3	126
56	Kursi Plastik	2			2
57	Kursi Putar Tanganan	11			11
58	Kursi Putar Besar	1			1
59	Kursi Putar Komputer	4			4
60	Kursi Rapat	41			41
61	Lambang Garuda	2			2
62	Laptop	7			7
63	Layar	2			2
64	LCD Proyektor	3		2	5
65	Megaphone	3			3
66	Meja 1 Biro	27			27
67	Meja 1/2 Biro	5			5
68	Meja Bayi	1			1
69	Meja Kerja	5			5
70	Meja Kerja 1 Biro	10			10
71	Meja Kerja 1/2 Biro	85	2		87
72	Meja Knap	8			8
73	Meja Komputer	28			28
74	Meja Kursi tamu	9			9
75	Meja Panjang	11			11

76	Meja Pendaftaran	1			1
77	Meja Rapat	17			17
78	Meja Rapat Besar	1			1
79	Meja resepsionis	1			1
80	Meja Telepon	1			1
81	Mesin Faximili	1			1
82	Mesin Ketik	6	1	1	8
83	Mesin Presensi sidik Jari	1			1
84	Mic Standar Meja	2			2
85	Monitor LCD	7		2	9
86	Monitor CC TV	1			1
87	Nano PC	1			1
88	Network Switch	1			1
89	Network Wireles	1			1
90	Note Book	9			9
91	Papan Nama Pejabat Struktural	1			1
92	Pesawat Telpon	2			2
93	Pesawat Telpon 3 digit	6		1	7
94	Ponsel CDMA	1			1
95	Pesawat TV	1			1
96	Printer	33		2	35
97	Printer Inkjet	2			2
98	Printer Laser	2			2
99	Printer Laser Jet	2			2
100	Printer Multifungsi	1	1	1	3
101	Printer Pita	1			1
102	Printer Warna	1			1
103	Radio Tape	1			1
104	Rak Besi Siku	9			9
105	Rak Kayu	9			9
106	Rak Koran	1			1
107	Rak Buku	1			1
108	RAK PIRING	1			1
109	Server IBM M5 2x4GB	1			1
110	Server IBM memori ram	1			1
111	Sepeda Statis	1			1
112	SPEAKER	4			4
113	Stabilizer	2			2
114	Tablet	3			3
115	Speda Berdiri	4			4
116	Tabung gas besar	1			1
117	Tabung Gas 3 kg	1			1
118	Tape Sharp	1			1
119	Timbangan Badan	1			1
120	TV LCD	2			2
121	TV	3			3
122	Treat mill	1			1

123	UPS	7		2	9
124	White Board	11			11
125	Wireles	1			1

Sumber: Profil Dinas Kesehatan, 2016

2.2.4 Program Pelayanan Kesehatan dan Inovasi

Selain melaksanakan Pelayanan kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit, Dinas Kesehatan kota Yogyakarta juga mempunyai program inovasi dalam pelayanan kesehatan untuk menanggulangi permasalahan gizi di kota Yogyakarta yaitu Rumah Pemulihan Gizi dan Rumah Sehat Lansia yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan dan keberdayaan lansia di kota Yogyakarta.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3.1 Kinerja Pelayanan

Berdasarkan hasil pengukuran pencapaian sasaran tahun 2016, sesuai dengan yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perubahan Tahun 2016. Adapun pengukuran dilakukan terhadap target sasaran indikator kinerja utama (IKU) dan indikator program yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahunan tahun 2016. Indikator Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya mengemukakan ada/tidaknya kesenjangan/gap pelayanan kesehatan, target yang telah dicapai, faktor yang mempengaruhi belum berhasilnya pelayanan tersebut. Hal ini dapat menemukan pada tahun mana saja rasio antara realisasi dan anggaran dapat dikatakan baik atau kurang baik.

Tabel 2.5

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2016

NO.	SASARAN STRATEGIS	URAIAN INDIKATOR	TARGET	CAPAIAN
1	Terwujudnya peningkatan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan	Persentase cakupan kelurahan siaga aktif mandiri	80%	77.78%
		Persentase cakupan rumah tangga yang melaksanakan PHBS	75%	77.55%
2	Terwujudnya peningkatan ketersediaan anggaran publik untuk kesehatan terutama bagi penduduk miskin	Persentase cakupan jaminan kesehatan bagi penduduk miskin	100%	100%
		Persentase cakupan jaminan kesehatan bagi penduduk rentan miskin	100%	100%
3	Terwujudnya peningkatan	Persentase cakupan mutu pelayanan kesehatan dasar	80%	97.48%

	pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau	Persentase cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	100%	303.52%
		Persentase kegawatdaruratan medis ditangani YES 118	80%	90.29%
4	Terwujudnya peningkatan upaya pembinaan gizi masyarakat serta kesehatan keluarga dan reproduksi	Prevalensi kekurangan gizi (gizi buruk dan gizi kurang)	8,00%	9.05%
		Persentase cakupan balita gizi buruk mendapatkan perawatan	100%	100%
		Persentase cakupan balita ditimbang berat badannya	85%	76.05%
		Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup	< 102	104.14
		Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup	6,7	7.81
		Angka kematian balita dari 2,1 menjadi 1,3 per 1000 kelahiran hidup	< 1.3	2.60
		Proporsi kelahiran yang ditolong tenaga kesehatan terlatih (PN) sebesar lebih dari 96 persen	100%	99.97%
		Angka Harapan Hidup	74 th	74 th
5	Terwujudnya peningkatan upaya pengendalian penyakit dan masalah kesehatan dan upaya penyehatan lingkungan	Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap	99,00%	96.64
		Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS (CDR) (MDG's)	75%	86.26
		Proporsi Kasus TB yang Berhasil diobati dalam Program DOTS (Succes Rate)	83%	84.68%
		Proporsi penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV dan AIDS	95%	100%
		Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD	100%	100%
		Persentase Sarana Sanitasi Dasar Memenuhi Syarat	94%	98.71%
		Jumlah kelurahan melaksanakan sanitasi total berbasis masyarakat	45 Kelurahan	45 Kelurahan
6	Terwujudnya peningkatan fungsi regulasi dan terpenuhi ketersediaan Sumber	Persentase sarana pelayanan kesehatan yang memenuhi standar mutu minimal	95%	100%
		Persentase cakupan keamanan	80%	95.17%

	Daya Kesehatan	mutu pangan		
		Persentase cakupan SDM kesehatan yang memenuhi standar kompetensi	88%	87.47%
7	Terwujudnya peningkatan ketersediaan farmasi dan alat kesehatan	Cakupan ketersediaan obat, vaksin, dan alat kesehatan untuk pelayanan kesehatan dasar di puskesmas	95%	95.02%
8	Terwujudnya peningkatan kualitas informasi kesehatan berbasis data yang akurat	Indeks Kepuasan Layanan Kesehatan	80	78.67%
		Seluruh kejadian luar biasa (KLB) bidang kesehatan dapat dicegah dan ditangani < 24 jam	100%	100%

Berdasarkan tabel tersebut di atas, masih terdapat permasalahan bidang kesehatan di Kota Yogyakarta terkait dengan pencapaian indikator kinerja utama yaitu antara lain:

1. Presentase cakupan Kelurahan Siaga Aktif Mandiri
2. Prevalensi kekurangan gizi (gizi buruk dan gizi kurang)
3. Presentase cakupan balita ditimbang berat badannya
4. Angka Kematian Ibu
5. Angka Kematian Bayi
6. Angka Kematian Balita
7. Proporsi Kelahiran yang ditolong tenaga Kesehatan terlatih (PN)
8. Presentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap
9. Presentase Cakupan SDM kesehatan yang Memenuhi standar Kompetensi
10. Indeks Kepuasan Layanan Kesehatan

Namun ada juga keberhasilan dari beberapa pencapaian indikator kinerja utama yang mampu mendorong kepercayaan masyarakat pada pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat antara lain Presentase cakupan mutu pelayanan kesehatan dasar meningkat, penanganan kegawatdaruratan medis, kualitas lingkungan yang semakin membaik, Sumber daya Kesehatan yang memenuhi kompetensi standar meningkat, seluruh keluarga miskin yang memerlukan pelayanan kesehatan dasar telah mendapatkannya dan Rumah Tangga yang melaksanakan PHBS melebihi target. Keberhasilan ini sangat dipengaruhi oleh adanya partisipasi aktif dari masyarakat, kesadaran untuk hidup sehat dan dukungan dari petugas kesehatan. Gambaran kinerja pelayanan Dinas Kesehatan kota Yogyakarta Tahun 2012-2016 dapat dilihat pada tabel 2.6.

Tabel 2.6

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
					2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016
1	Persentase Cakupan Kelurahan Siaga Aktif Mandiri	V			60%	65%	70%	75%	80 %	57.77 %	66.67 %	71.10 %	71.10 %	77.78 %	96.28 %	102.57 %	101.57 %	94.80 %	97.22 %
2	Persentase Cakupan Rumah Tangga yang Melaksanakan PHBS		V		59%	63%	67%	71%	75%	55.00 %	68.40 %	77.22 %	75.09 %	77.55 %	93.22 %	108.57 %	115.25 %	105.76 %	103.40 %
3	Cakupan penjarangan kesehatan siswa SD dan setingkat	V			100%	100%	100%	100%	100%	100%	99.90 %	99.79 %	98.10 %	97.54 %	100.00 %	99.90 %	99.79 %	98.10 %	97.45 %
4	Persentase Cakupan Jaminan Kesehatan bagi penduduk miskin	V			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Persentase Cakupan Jaminan kesehatan bagi penduduk rentan miskin			V	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Persentase Cakupan Mutu Pelayanan Kesehatan Dasar		V		67%	70%	73%	76%	80%	68.70 %	81%	88.51 %	83.51 %	97.48 %	102.54 %	115.71 %	121.25 %	109.88 %	121.85 %

7	Persentase Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin	V			100%	100%	100%	100%	100%	162.48%	176.11%	151.70%	274,25%	303.52%	162.48%	176.11%	151.70%	274.25%	303.52%
8	Persentase kegawatdaruratan medis ditangani YES 118	V			60%	65%	70%	75%	80%	100%	100%	97.27%	100%	90.29%	166.67%	153.85%	138.96%	133.33%	112.86%
9	Indeks Kepuasan Layanan Kesehatan Masyarakat		V		79.2	79.4	79.6	79.8	80	81	76.5	75.88	78.24	78.67	102.27%	96.35%	95.33%	98.05%	98.34%
10	Seluruh Kejadian Luar Biasa (KLB) bidang Kesehatan dapat dicegah dan ditangani < 24 jam	V			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
11	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Kesehatan		V		96%	97%	98%	99%	100%	100%	97%	100%	100%	100%	104.17%	100.00%	102.04%	101.01%	100.00%
12	Prevalensi gizi buruk dan gizi kurang	V	V	V	9.44%	9.08%	8.72%	8.36%	8.00%	7.95%	7.33%	7.93%	7.97%	9.05%	101.49%	101.75%	100.79%	100.39%	98.95%
13	Persentase Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapatkan Perawatan	V	V		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

14	Presentase cakupan balita ditimbang berat badannya		V	V	76.20 %	78.00 %	81.00 %	83.00 %	85.00%	74.69 %	74.17 %	77.53 %	90.35 %	76.05 %	98.02 %	95.09 %	95.72 %	108.86 %	89.47 %
15	Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup		V		< 144	<134	<123	<113	<102	150.3	204.3	45.78	125.88	104.14	95.63	47.54	162.78	88.60	97.90
16	Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup		V		8.9	8.4	7.8	7.3	6.7	10.9	11.57	14.19	8.31	7.81	95.63	62.26	18.08	86.16	83.43
17	Angka kematian balita per 1.000 kelahiran hidup		V		<1.9	<1.8	<1.6	<1.5	<1.3	1.5	2.27	1.6	1.51	2.60	121.05	73.89	100	99.33	- 0.27%
18	Proporsi kelahiran yang ditolong tenaga kesehatan terlatih (PN) sebesar lebih dari 96 persen		V		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99.89 %	99.97 %	99.97 %
19	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin	V	V		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	67.21 %	85.35 %	100.00 %	100%	100%	67.21 %	85.35 %
20	Prevalensi anemia pada ibu hamil		V		30%	29%	28%	27%	26%	24.33 %	24.10 %	29.17 %	23.20 %	22.78 %	81.10 %	83.10 %	104.18 %	85.93 %	87.61 %
21	Cakupan kunjungan ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal	V			92%	93%	94%	95%	96%	92.79 %	89.27	92.85 %	91.79 %	90.96 %	100.86 %	95.99 %	98.78 %	96.62 %	94.75 %

	sesuai standar (K4)																		
22	Cakupan kunjungan bayi (neonatal) lengkap (KN)		V		84%	86%	87%	89%	90%	90.55 %	92.49 %	94.54 %	92.80 %	90.42 %	107.80 %	107.55 %	104.27 %	104.27 %	100.47 %
23	Cakupan peserta KB aktif	V			74%	75%	76%	77%	78%	77.00 %	75.69 %	75.54 %	77.77 %	78.77 %	104.05 %	100.92 %	99.39 %	101.00 %	100.99 %
24	Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap		V		98.20 %	98.40 %	98.60 %	98.80 %	99%	100%	94%	96.93 %	90.86 %	96.64 %	101.83 %	95.33 %	98.31 %	91.96 %	97.61 %
25	Presentase Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD	V			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
26	Presentase Sarana Sanitasi Dasar Memenuhi Syarat		V		92%	93%	93%	94%	94%	93%	98%	98.22 %	94.10 %	98.71 %	101.09 %	105.38 %	105.61 %	100.11 %	105.01 %
27	Jumlah kelurahan Melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat		V		19 kel	26 kel	33 kel	40 kel	45 kel	16 kel	30 kel	45 kel	42 kel	45 kel	84.21 %	115.38 %	112.50 %	105.00 %	100%
28	Cakupan Imunisasi anak Sekolah Dasar	V			98%	98.5 %	99%	99.5 %	100%	94%	95.50 %	97.35 %	97.40 %	98.57 %	95.92 %	96.95 %	98.33 %	97.89 %	98.57 %
29	Cakupan Desa/ kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	V			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

30	Cakupan Pemuan pasien baru TB BTA (+)	V			94%	94%	94%	94%	94%	87%	88.69 %	164.62 %	134.34 %	145.04 %	92.55 %	94.35 %	175.13 %	142.91 %	154.30 %
31	Presentase Sarana Pelayanan Kesehatan yang Memenuhi Standar Mutu Minimal		V		89%	90%	92%	93%	95%	89%	87.46 %	92.34 %	97%	100.00 %	100.00 %	97.18 %	100.37 %	104.30 %	105.26 %
32	Presentase Cakupan keamanan Mutu Pangan		V		67%	70%	74%	77%	80%	67%	99.60 %	100%	100%	95.17 %	100.00 %	142.29 %	135.14 %	129.87 %	118.97 %
33	Jumlah SDM kesehatan yang mengikuti pendidikan			V	9 orang	18 orang	27 orang	36 orang	45 orang	25 orang	9 orang	14 orang	17 orang	47 orang	277.78 %	50.00 %	51.85 %	47.22 %	104.44 %
34	Jumlah SDM Kesehatan yang Mengikuti Pelatihan			V	100 orang	200 orang	300 orang	400 orang	500 orang	70 orang	141 orang	323 orang	448 orang	606 orang	70.00 %	70.50 %	107.67 %	112.00 %	121.20 %
35	Presentase Cakupan ketersediaan obat, vaksin, dan alat kesehatan untuk pelayanan kesehatan dasar di puskesmas		V		91%	92%	93%	94%	95%	91%	92%	91.90 %	93.19 %	95.02 %	100.00 %	100.00 %	98.82 %	99.14 %	100.02 %

Pencapaian kinerja pelayanan Dinas kesehatan kota Yogyakarta tahun 2012 - 2016, dari 24 Indikator kinerja pelayanan ada beberapa yang indikator yang mencapai target adalah sebagai berikut:

A. Cakupan Kelurahan Siaga Aktif Mandiri

Pada akhir periode renstra tahun 2016 cakupan kelurahan siaga aktif mandiri di Kota Yogyakarta adalah 77,78 % dari target 80%. Hal ini menunjukkan bahwa capaian tersebut belum mencapai target. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain :

1. Pembinaan kelurahan siaga belum memiliki sistem baku di tingkat bawah, sehingga pelaksanaan kelurahan siaga di Kota Yogyakarta masih memiliki variasi yang belum sesuai dengan pedoman pentahapan kelurahan siaga

2. Payung hukum kelurahan siaga di tingkat Kota Yogyakarta baru terbit dan disahkan pada tanggal 4 Januari 2016 yaitu Peraturan Walikota No. 3 tahun 2016 tentang Kelurahan Siaga. Sehingga pada tahun 2016 ini baru tahap sosialisasi.

Faktor yang mendukung program Kelurahan Siaga adalah adanya pembinaan dan anggaran dari lintas sektor terkait antara lain kecamatan, Kelurahan, LPMK, KPMP selain dari Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta dan Puskesmas. Hal ini terkait dengan terbitnya Peraturan Walikota No 41 tahun 2015 dan Peraturan Walikota No 42 tahun 2015 yang diperbaharui dengan Peraturan Walikota No 8 tahun 2016 tentang Pelimpahan sebagian wewenang walikota kepada camat tentang sebagian urusan daerah. Dengan terbitnya payung hukum tersebut memberikan kewajiban kepada Camat untuk melaksanakan urusan kesehatan sebagai salah satu urusan wajib yang harus dilaksanakan. Dukungan kepada Kelurahan Siaga, Posyandu balita dan Kelompok Lansia berupa fasilitasi kegiatan dan pembinaan teknis, dapat meningkatkan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) seperti Kemandirian Kelurahan Siaga, Posyandu, Kelompok Lansia, Kerjabakti kebersihan lingkungan, Gerakan Sayang Ibu, dan sebagainya, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam bidang kesehatan.

B. Prevalensi gizi buruk dan gizi kurang

Prevalensi balita gizi buruk & balita gizi kurang tahun 2016 sebesar 9.05 % dari yang ditargetkan sebesar 8.00%. Bila dibandingkan tahun 2016 capaian indikator ini mengalami penurunan dibandingkan capaian pada tahun 2015. Hal ini dimungkinkan karena jumlah kasusnya mengalami kenaikan dari 1.234 jumlah balita gizi buruk dan gizi kurang pada tahun 2015 dan pada tahun 2016 jumlah kasus gizi buruk dan gizi kurang sebanyak 1.364 kasus. Faktor penyebabnya adalah Pemantauan status gizi cukup sulit karena beberapa orang tua / keluarga tidak membawa anaknya yang kurus ke posyandu / puskesmas dengan berbagai alasan sehingga tidak terpantau oleh kader pendamping balita gizi kurang dan buruk

maupun oleh tenaga kesehatan. Sedangkan strategi yang dilaksanakan dalam pemecahan masalah adalah mengoptimalkan peran kader pendamping balita, penyuluhan gizi seimbang kepada masyarakat, pemerian bantuan stimulan PMT Pemulihan bagi balita gizi buruk serta memberuikan pelayanan pemuloihan balita gizi buruk dan kurang di Rumah pemulihan Gizi (RPG).

C. Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup

Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup tahun 2015 sebesar 125.88 menurun pada tahun 2016 sebesar 104.14. Kematian ibu tahun 2016 sejumlah 4 kasus dari 3841 kelahiran hidup. Kasus kematian tersebut secara medis disebabkan oleh perdarahan, HIV, penyakit jantung dan 1 kasus lainnya belum dapat diketahui penyebabnya. Beberapa Faktor hambatan dalam pencapain target sasaran tersebut adalah

1. Belum adanya RS mampu PONEK Paripurna
2. Sosial budaya masyarakat kurang mendukung terkait pengambilan keputusan dan kepedulian masyarakat mengenai kehamilan dan persalinan yang aman
3. Tingginya kasus kehamilan yang tidak diinginkan sehingga mempengaruhi kesehatan ibu dan bayi
4. Masih ada ibu hamil yang belum memahami arti pentingnya pemeriksaan kehamilan sejak dini, beberapa ibu hamil memeriksakan kehamilan setelah usia kehamilan trimester 2 ke atas, ada juga ibu hamil yang tidak melakukan pemeriksaan sehingga tidak termonitor kesehatannya sehingga memungkinkan timbulnya resiko saat melahirkan.
5. Tingkat mobilisasi penduduk yang tinggi memungkinkan adanya pendatang yang dalam kondisi kehamilan resiko tinggi dan balita gizi buruk. Faktor-faktor ini merupakan penyebab kematian ibu melahirkan dan dapat menambah jumlah balita gizi buruk di Kota Yogyakarta.

Strategi pemecahan yang sudah dilakukan dalam menghadapi permasalahan tersebut adalah :

1. Optimalisasi implementasi Manual Rujukan
2. Peningkatan kualitas ANC (ANC terpadu berkualitas) kelas ibu, SMS bunda
3. Memperkuat jejaring rujukan dengan group WhatsApp
4. Mengoptimalkan peran YES 118 untuk melayani ibu hamil beresiko
5. Melakukan penjarangan kasus anemia & KEK (Kekurangan Energi Kronis) sejak remaja , calon pengantin dan WUS (wanita usia subur)
6. Memberikan tablet tambah darah bagi remaja, calon pengantin dan WUS.
7. Implementasi ANC berkualitas atau ANC terpadu sehingga dapat mendeteksi adanya faktor resiko dan komplikasi kehamilan.

8. Berjalannya program suami siaga, pembinaan pada bidan praktek swasta serta menyiapkan buku KIA untuk semua ibu hamil sebagai penghubung bagi semua tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kepada ibu hamil, kader pendamping, serta keluarga/suami.

D. Angka kematian balita per 1.000 kelahiran hidup

Pada Tahun 2016 angka kematian balita per 1.000 kelahiran hidup 2.60 mengalami kenaikan dibanding tahun 2015 yaitu 1,51 per 1.000 kelahiran hidup. Angka kematian balita pada tahun 2016 jauh dari target yang sudah ditetapkan yaitu < 1.3. Jumlah kematian balita pada tahun 2015 sebanyak 6 kasus dan mengalami kenaikan sebanyak 10 kasus pada tahun 2016. Faktor yang menyebabkan angka kematian balita tinggi adalah adanya peningkatan kasus penyakit menular terutama penyakit DBD. Beberapa upaya dalam pencegahan penyakit menular adalah dengan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pencegahan penyakit terutama penyakit menular.

E. Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap

Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap tahun 2016 belum dapat mencapai target. Tahun 2016 baru mencapai 96.64% dari yang ditargetkan 99.00%. Hal ini disebabkan karena ada beberapa orang tua bayi yang menolak bayinya untuk di imunisasi dengan berbagai alasan salah satunya adalah agama. Capaian ini bila dibandingkan tahun 2015 terjadi kenaikan sebesar 5.78 %. Kondisi yang menjadi hambatan dalam pencapaian target adalah Adanya beberapa orang tua bayi yang kurang sepaham dengan program imunisasi (beberapa bayi tidak boleh diimunisasi dengan alasan agama), Adanya bayi yang meninggal sebelum mencapai usia 9 bulan (imunisasi dasar lengkap di usia 0-9 bulan) sehingga menurunkan angka capaian. Sedangkan strategi pemecahan masalah yang dilakukan adalah Ada aturan di sekolah siswa yang mendaftar harus mau di imunisasi, Komitmen kepala sekolah, guru kelas dan komite sekolah tentang pentingnya imunisasi Meningkatkan sosialisasi tentang Imunisasi kepada masyarakat, melalui pertemuan-pertemuan di posyandu, rapat RT/RW dan kegiatan Kelurahan Siaga. Juga berupaya melalui kegiatan promosi kesehatan melalui leaflet, siaran radio dan televisi.

2.3.2 Kinerja Keuangan Dinas Kesehatan

Selain pencapaian kinerja Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta akan disampaikan pula mengenai anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta berdasarkan data Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan dokumen LAKIP Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta. Hasil interpretasi yang ditunjukkan dalam kinerja pelayanan dinas kesehatan ditujukan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pelayanan OPD Dinas Kesehatan. Gambaran kinerja pelayanan dan Kinerja Keuangan Dinas kesehatan Kota Yogyakarta tahun 2012-2016 dapat dilihat pada Tabel berikut ;

Tabel 2.7

*Realisasi Belanja Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta
Tahun 2012-2017*

No	Uraian	TAHUN				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Belanja Daerah	73.485.579.412, 00	90.007.854.842 ,00	94.027.431.122, 00	109.135.810.186, 00	126.345.763.658 ,48
2	Belanja Tidak Langsung	30.948.503.868, 00	31.885.318.465 ,00	33.036.643.376, 00	35.804.843.016,0 0	39.192.226.461, 00
3	Belanja Langsung	42.537.075.544, 00	58.122.536.377 ,00	60.990.787.746, 00	73.330.967.170,0 0	87.153.537.167, 48

Tabel 2.8

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta

Uraian	ANGGARAN PADA TAHUN KE					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	ANGGARAN	REALISASI
BELANJA DAERAH	83.992.28 9.336,00	97.955.63 9.881,00	96.876.59 0.270,00	133.466.6 71.109,00	145.654.5 62.613,00	73.485.5 79.412,0 0	90.007.854. 842,00	94.027.4 31.122,0 0	109.135. 810.186, 00	126.345. 763.658, 48	87,49%	91,89%	97,06 %	81,77%	86,74%	27,37%	27,03%
BELANJA TIDAK LANGSUNG	31.477.76 6.209,00	32.382.08 0.179,00	34.422.10 1.600,00	38.407.89 1.098,00	39.935.89 8.197,00	30.948.5 03.868,0 0	31.885.318. 465,00	33.036.6 43.376,0 0	35.804.8 43.016,0 0	39.192.2 26.491,0 0	98,32%	98,47%	95,98 %	93,22%	98,14%	11,89%	11,80%
Belanja Gaji dan Tunjangan	31.477.76 6.209,00	32.382.08 0.179,00	34.422.10 1.600,00	38.407.89 1.098,00	39.935.89 8.197,00	30.948.5 03.868,0 0	31.885.318. 465,00	33.036.6 43.376,0 0	35.804.8 43.016,0 0	39.192.2 26.491,0 0	98,32%	98,47%	95,98 %	93,22%	98,14%	11,89%	11,80%
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	24.226.53 0.108,00	25.004.22 5.261,00	26.728.75 0.404,00	28.661.90 5.218,00	31.032.31 8.478,00	23.945.9 56.540,0 0	24.675.129. 500,00	25.694.7 77.909,0 0	27.893.7 67.380,0 0	30.527.5 54.190,0 0	98,84%	98,68%	96,13 %	97,32%	98,37%	12,37%	12,14%
Tunjangan Keluarga	1.889.305. 242,00	1.985.611. 105,00	2.090.636. 229,00	2.303.213. 447,00	2.298.372. 834,00	1.859.20 9.712,00	1.942.165.1 74,00	2.046.34 2.195,00	2.230.22 7.245,00	2.262.51 9.989,00	98,41%	97,81%	97,88 %	96,83%	98,44%	9,79%	9,81%
Tunjangan Jabatan Struktural	414.295.7 00,00	461.834.5 75,00	446.187.6 25,00	449.652.1 25,00	456.398.1 50,00	406.290. 000,00	441.490.00 0,00	433.205. 000,00	438.685. 000,00	443.395. 000,00	98,07%	95,59%	97,09 %	97,56%	97,15%	4,83%	4,37%

Tunjangan Jabatan Fungsional	2.133.936.700,00	2.305.465.275,00	2.361.852.125,00	4.049.050.875,00	2.736.455.800,00	2.069.688.800,00	2.254.710.000,00	2.426.657.700,00	2.606.975.000,00	2.664.655.000,00	96,99%	97,80%	102,74%	64,38%	97,38%	12,05%	12,63%
Tunjangan Fungsional Umum	690.621.200,00	524.039.425,00	529.202.375,00	478.956.875,00	474.649.500,00	676.635.000,00	517.970.000,00	478.125.000,00	460.150.000,00	456.255.000,00	97,97%	98,84%	90,35%	96,07%	96,12%	-18,66%	-19,62%
Tunjangan Beras	1.397.196.620,00	1.571.657.750,00	1.656.846.900,00	1.613.656.802,00	1.442.988.777,00	1.267.915.100,00	1.546.878.180,00	1.361.505.920,00	1.468.095.092,00	1.423.053.000,00	90,75%	98,42%	82,17%	90,98%	98,62%	1,61%	5,75%
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	725.480.668,00	522.304.488,00	602.124.901,00	835.414.252,00	618.465.062,00	722.418.596,00	501.150.481,00	590.189.690,00	691.308.052,00	553.093.196,00	99,58%	95,95%	98,02%	82,75%	89,43%	-7,88%	-13,14%
Pembulatan Gaji	399.971,00	554.550,00	504.791,00	506.504,00	483.361,00	390.120,00	425.130,00	439.962,00	435.247,00	432.311,00	97,54%	76,66%	87,16%	85,93%	89,44%	9,33%	5,13%
Tunjangan Bahaya Radiasi	-	6.387.750,00	5.996.250,00	15.535.000,00	14.145.000,00	-	5.400.000,00	5.400.000,00	15.200.000,00	13.800.000,00	-	84,54%	90,06%	97,84%	97,56%	-	-
Iuran Asuransi Kesehatan	-	-	-	-	861.621.235,00	-	-	-	-	847.468.805,00	-	-	-	-	98,36%	-	-
BELANJA LANGSUNG	52.514.523.127,00	65.573.559.702,00	62.454.488.670,00	95.058.780.011,00	105.718.664.416,00	42.537.075.544,00	58.122.536.377,00	60.990.787.746,00	73.330.967.170,00	87.153.537.167,48	81,00%	88,64%	97,66%	77,14%	82,44%	34,63%	35,69%
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.823.803.880,00	2.845.991.110,00	2.995.470.110,00	3.266.345.544,00	3.572.776.884,00	2.707.804.901,00	2.541.605.755,00	2.729.353.959,00	2.823.068.777,00	3.163.407.515,00	95,89%	89,30%	91,12%	86,43%	88,54%	11,76%	7,77%

Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.375.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00	4.600.000,00	5.260.000,00	6.370.350,00	4.028.280,00	2.852.540,00	2.443.320,00	3.068.380,00	99,93%	74,60%	52,82%	53,12%	58,33%	-9,59%	-36,00%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	15.000.000,00	16.800.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	10.647.126,00	12.514.280,00	10.449.949,00	10.499.864,00	12.463.583,00	70,98%	74,49%	69,67%	70,00%	83,09%	0,00%	7,86%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	33.985.000,00	20.560.000,00	16.980.000,00	17.880.000,00	18.800.000,00	24.697.800,00	12.741.800,00	14.383.900,00	14.385.200,00	17.449.400,00	72,67%	61,97%	84,71%	80,45%	92,82%	-29,06%	-16,25%
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	1.771.153.680,00	234.360.000,00	239.760.000,00	100.800.000,00	93.525.000,00	1.727.586.460,00	228.760.000,00	230.260.000,00	88.375.000,00	89.950.000,00	97,54%	97,61%	96,04%	87,67%	96,18%	-120,04%	-119,93%
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		101.813.600,00	103.955.700,00	147.420.100,00	73.965.500,00		61.450.000,00	80.206.650,00	97.183.852,00	71.305.972,00	#DIV/0!	60,36%	77,15%	65,92%	96,40%	85,15%	107,45%

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	23.700.00 0,00	63.700.00 0,00	74.415.00 0,00	17.315.00 0,00	30.740.00 0,00	23.700.0 00,00	37.629.607, 00	38.364.0 00,00	10.462.0 00,00	22.975.0 00,00	100,00%	59,07%	51,55 %	60,42%	74,74%	19,21%	3,96%
Penyediaan Alat Tulis Kantor	82.262.00 0,00	50.837.66 0,00	62.737.76 0,00	69.504.16 0,00	78.816.10 0,00	78.855.0 00,00	46.627.380, 00	54.101.1 50,00	59.297.4 00,00	77.212.6 00,00	95,86%	91,72%	86,23 %	85,31%	97,97%	-1,74%	-0,56%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	199.346.0 00,00	150.413.2 50,00	221.553.2 50,00	218.738.2 50,00	248.075.1 00,00	176.534. 195,00	128.692.41 0,00	186.649. 770,00	162.297. 465,00	176.381. 230,00	88,56%	85,56%	84,25 %	74,20%	71,10%	10,78%	-0,12%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.775.00 0,00	20.000.00 0,00	13.000.00 0,00	13.000.00 0,00	17.000.00 0,00	14.775.0 00,00	14.637.500, 00	12.987.5 00,00	10.067.0 00,00	7.455.00 0,00	100,00%	73,19%	99,90 %	77,44%	43,85%	7,15%	-34,02%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	201.450.0 00,00	54.970.00 0,00	85.112.00 0,00	112.412.0 00,00	117.112.0 00,00	189.784. 620,00	52.833.500, 00	45.670.0 00,00	40.111.0 00,00	42.274.0 00,00	94,21%	96,11%	53,66 %	35,68%	36,10%	-19,74%	-67,57%
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	264.200.0 00,00	32.000.00 0,00	40.048.00 0,00	82.575.00 0,00	13.308.00 0,00	262.927. 250,00	13.322.100, 00	21.633.4 00,00	76.855.6 50,00	4.124.50 0,00	99,52%	41,63%	54,02 %	93,07%	30,99%	- 104,78%	- 100,32%

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8.520.000,00	10.700.000,00	6.700.000,00	6.700.000,00	6.040.000,00	7.788.300,00	5.225.000,00	5.961.000,00	4.535.000,00	5.197.500,00	91,41%	48,83%	88,97%	67,69%	86,05%	-16,83%	-19,90%
Penyediaan Makanan dan Minuman	70.048.200,00	154.350.000,00	161.328.000,00	159.568.000,00	183.392.000,00	65.467.500,00	95.952.700,00	106.142.500,00	117.012.000,00	162.085.900,00	93,46%	62,17%	65,79%	73,33%	88,38%	46,18%	44,95%
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	56.000.000,00	139.100.000,00	104.380.000,00	138.380.000,00	101.000.000,00	47.166.800,00	119.346.198,00	92.927.900,00	136.036.280,00	96.717.370,00	84,23%	85,80%	89,03%	98,31%	95,76%	26,72%	32,84%
Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan	-	1.790.986.600,00	1.845.100.400,00	2.162.453.034,00	2.570.743.184,00	-	1.707.845.000,00	1.826.763.700,00	1.993.507.746,00	2.374.747.080,00	-	95,36%	99,01%	92,19%	92,38%	-	-
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	246.649.700,00	487.393.000,00	393.672.000,00	486.115.898,00	335.160.000,00	228.491.750,00	177.304.873,00	196.951.853,00	297.174.872,00	266.881.064,00	92,64%	36,38%	50,03%	61,13%	79,63%	14,29%	7,55%

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	-	83.413.000,00	80.000.000,00	141.419.898,00	141.000.000,00	-	41.213.850,00	69.527.300,00	137.101.568,00	127.061.504,00	-	49,41%	86,91%	96,95%	90,11%	-	-
Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	-	403.980.000,00	313.672.000,00	344.696.000,00	141.000.000,00	-	136.091.023,00	127.424.553,00	160.073.304,00	127.061.504,00	-	33,69%	40,62%	46,44%	90,11%	-	-
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	-	-	-	-	194.160.000,00	-	-	-	-	139.819.560,00	-	-	-	-	72,01%	-	-
Belanja Jasa Service	31.415.000,00	-	-	-	23.190.000,00	28.506.000,00	-	-	-	13.375.000,00	90,74%	-	-	-	57,68%	-	-
Belanja Penggantian Suku Cadang	75.360.000,00	-	-	-	41.630.000,00	60.133.500,00	-	-	-	35.699.298,00	79,79%	-	-	-	85,75%	-	-
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	139.874.700,00	-	-	-	129.340.000,00	139.852.250,00	-	-	-	90.745.262,00	99,98%	-	-	-	70,16%	-	-

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	-	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	-	10.250.000,00	6.050.000,00	-	-	-	68,33%	40,33%	-	-	-
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	-	-	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	-	10.250.000,00	6.050.000,00	-	-	-	68,33%	40,33%	-	-	-
PROGRAM PENINGK. PENGEMBA NGAN SISTEM PELAPORA N CAPAIAN KINERJA & KEUANGAN	86.298.000,00	212.273.000,00	294.417.000,00	292.379.000,00	55.400.000,00	55.357.000,00	191.827.000,00	273.623.500,00	272.035.000,00	55.400.000,00	64,15%	90,37%	92,94%	93,04%	100,00%	-10,08%	6,33%
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	86.298.000,00	212.273.000,00	294.417.000,00	292.379.000,00	55.400.000,00	55.357.000,00	191.827.000,00	273.623.500,00	272.035.000,00	55.400.000,00	64,15%	90,37%	92,94%	93,04%	100,00%	-10,08%	6,33%

Program Upaya Pelayanan Kesehatan	9.064.353. 397,00	16.021.85 6.025,00	16.623.34 1.717,00	31.784.82 4.191,00	63.228.54 8.729,00	7.449.21 4.179,00	11.933.363. 172,00	19.055.3 57.526,0 0	26.894.8 24.925,0 0	48.440.3 29.442,3 7	82,18%	74,48%	114,63 %	84,62%	76,61%	93,99%	91,78%
Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan	1.325.272. 900,00	1.582.429. 980,00	1.215.521. 500,00	1.027.748. 308,00	1.924.584. 854,00	1.129.37 2.125,00	1.288.532.7 84,00	1.105.76 9.331,00	976.212. 532,00	1.677.87 6.512,00	85,22%	81,43%	90,97 %	94,99%	87,18%	17,74%	19,16%
Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan	208.861.9 50,00	513.726.8 00,00	542.690.5 70,00	-	-	187.716. 957,00	403.341.29 8,00	516.058. 242,00	-	-	89,88%	78,51%	95,09 %	-	-	-	-
Pengelolaan Operasional Puskesmas Danurejan I	272.577.7 69,00	529.262.6 05,00	597.634.8 50,00	-	-	222.744. 245,00	334.838.73 2,00	459.947. 974,00	-	-	81,72%	63,27%	76,96 %	-	-	-	-
Pengelolaan Operasional Puskesmas Danurejan II	335.940.0 50,00	647.069.6 80,00	590.522.1 50,00	-	-	311.729. 090,00	457.696.70 9,00	513.765. 764,00	-	-	92,79%	70,73%	87,00 %	-	-	-	-
Pengelolaan Operasional Puskesmas Gedongteng en	407.794.0 03,00	692.083.4 62,00	740.435.3 87,00	-	-	326.111. 670,00	425.182.20 2,00	1.045.28 8.820,00	-	-	79,97%	61,44%	141,17 %	-	-	-	-

Pengelolaan Operasional Puskesmas Gondokusuman I	218.918.785,00	483.260.000,00	588.730.875,00	-	-	147.462.197,00	355.481.951,00	526.387.910,00	-	-	67,36%	73,56%	89,41%	-	-	-	-
Pengelolaan Operasional Puskesmas Gondokusuman II	252.500.000,00	496.320.200,00	604.104.475,00	-	-	195.709.588,00	370.449.884,00	830.821.651,00	-	-	77,51%	74,64%	137,53%	-	-	-	-
Pengelolaan Operasional Puskesmas Gondomanan	745.445.550,00	1.238.978.350,00	1.482.431.025,00	-	-	622.534.286,00	976.707.029,00	1.821.707.529,00	-	-	83,51%	78,83%	122,89%	-	-	-	-
Pengelolaan Operasional Puskesmas Jetis	367.422.500,00	746.247.550,00	722.022.300,00	-	-	312.556.330,00	551.048.971,00	1.057.745.363,00	-	-	85,07%	73,84%	146,50%	-	-	-	-
Pengelolaan Operasional Puskesmas Kotagede I	278.788.000,00	499.644.475,00	512.478.450,00	-	-	228.060.617,00	333.061.267,00	449.369.504,00	-	-	81,80%	66,66%	87,69%	-	-	-	-
Pengelolaan Operasional Puskesmas Kotagede II	346.061.375,00	592.651.900,00	737.747.450,00	-	-	255.699.309,00	471.761.006,00	842.802.834,00	-	-	73,89%	79,60%	114,24%	-	-	-	-

Pengelolaan Operasional Puskesmas Kraton	508.614.050,00	1.033.376.000,00	1.037.741.800,00	-	-	434.014.003,00	774.789.441,00	1.502.960.969,00	-	-	85,33%	74,98%	144,83%	-	-	-	-
Pengelolaan Operasional Puskesmas Mantrijeron	982.100.000,00	1.844.171.405,00	1.668.274.600,00	-	-	912.370.768,00	1.481.096.713,00	1.705.370.228,00	-	-	92,90%	80,31%	102,22%	-	-	-	-
Pengelolaan Operasional Puskesmas Mergangsan	318.548.550,00	732.091.250,00	618.220.400,00	-	-	248.984.385,00	614.716.082,00	633.209.797,00	-	-	78,16%	83,97%	102,42%	-	-	-	-
Pengelolaan Operasional Puskesmas Ngampilan	284.991.350,00	505.956.013,00	475.622.300,00	-	-	235.725.869,00	368.712.687,00	460.873.797,00	-	-	82,71%	72,87%	96,90%	-	-	-	-
Pengelolaan Operasional Puskesmas Pakualaman	749.024.200,00	1.358.143.000,00	1.511.090.335,00	-	-	583.277.303,00	851.501.555,00	2.108.410.675,00	-	-	77,87%	62,70%	139,53%	-	-	-	-
Pengelolaan Operasional Puskesmas Tegalrejo	583.890.150,00	942.163.560,00	1.131.306.600,00	-	-	427.360.888,00	728.558.481,00	1.702.855.999,00	-	-	73,19%	77,33%	150,52%	-	-	-	-
Pengelolaan Operasional Puskesmas Umbulharjo I	464.602.215,00	734.369.440,00	889.260.750,00	-	-	353.740.810,00	523.309.667,00	652.725.520,00	-	-	76,14%	71,26%	73,40%	-	-	-	-

Pengelolaan Operasional Puskesmas Umbulharjo II	413.000.000,00	849.910.355,00	957.505.900,00	-	-	314.043.739,00	622.576.713,00	1.119.285.619,00	-	-	76,04%	73,25%	116,90%	-	-	-	-
Pengelolaan Operasional Puskesmas Wirobrajan	-	2.809.773.200,00	542.690.570,00	787.563.922,00	973.671.093,00	-	2.536.411.815,00	-	590.588.820,00	905.741.961,00	-	90,27%	-	74,99%	93,02%	-	-
Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Danurejan II	-	-	-	519.159.361,00	626.418.619,00	-	-	-	469.753.142,00	523.095.282,00	-	-	-	90,48%	83,51%	-	-
Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Gedongtengen	-	-	-	1.452.510.096,00	1.711.830.179,00	-	-	-	1.086.468.696,00	1.563.499.656,00	-	-	-	74,80%	91,33%	-	-
Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Gondokusuman I	-	-	-	1.230.652.261,00	1.402.521.791,00	-	-	-	1.161.270.032,00	1.297.208.917,00	-	-	-	94,36%	92,49%	-	-

Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Gondokusuman II	-	-	-	570.604.570,00	878.585.966,00	-	-	-	529.337.881,00	814.400.382,00	-	-	-	92,77%	92,69%	-	-
Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Gondomanan	-	-	-	899.899.546,00	907.214.944,00	-	-	-	830.977.125,00	764.205.092,00	-	-	-	92,34%	84,24%	-	-
Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Jetis	-	-	-	1.776.790.614,00	2.417.202.044,00	-	-	-	1.721.910.843,00	2.296.885.607,00	-	-	-	96,91%	95,02%	-	-
Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Kotagede I	-	-	-	1.202.095.223,00	1.655.975.916,00	-	-	-	1.013.134.440,00	1.319.201.796,00	-	-	-	84,28%	79,66%	-	-
Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Kotagede II	-	-	-	670.432.061,00	939.422.417,00	-	-	-	602.256.320,00	804.259.302,00	-	-	-	89,83%	85,61%	-	-

Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Kraton	-	-	-	967.080.697,00	1.005.231.068,00	-	-	-	904.818.451,00	935.198.783,00	-	-	-	93,56%	93,03%	-	-
Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Mantrijeron	-	-	-	2.032.092.695,00	2.116.395.875,00	-	-	-	1.883.371.176,00	1.946.061.827,00	-	-	-	92,68%	91,95%	-	-
Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Mergangsan	-	-	-	1.889.789.472,00	2.201.798.113,00	-	-	-	1.551.671.870,00	1.417.621.262,00	-	-	-	82,11%	64,38%	-	-
Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Ngampilan	-	-	-	824.422.428,00	954.390.890,00	-	-	-	708.094.386,00	865.095.278,00	-	-	-	85,89%	90,64%	-	-
Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Pakualaman	-	-	-	611.030.841,00	740.196.003,00	-	-	-	539.685.775,00	570.248.017,00	-	-	-	88,32%	77,04%	-	-

Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Tegalrejo	-	-	-	2.117.599.718,00	2.873.614.711,00	-	-	-	1.814.829.777,00	2.474.939.662,00	-	-	-	85,70%	86,13%	-	-
Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Umbulharjo I	-	-	-	2.246.783.552,00	2.615.305.776,00	-	-	-	1.919.025.352,00	2.016.080.804,00	-	-	-	85,41%	77,09%	-	-
Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Umbulharjo II	-	-	-	963.310.149,00	1.241.826.177,00	-	-	-	841.540.822,00	996.870.612,00	-	-	-	87,36%	80,27%	-	-
Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Wirobrajan	-	-	-	1.273.626.850,00	1.760.341.527,00	-	-	-	1.162.629.506,00	1.449.579.623,00	-	-	-	91,28%	82,35%	-	-
Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Danurejan I	-	-	-	489.471.582,00	943.237.940,00	-	-	-	401.718.067,00	753.922.795,00	-	-	-	82,07%	79,93%	-	-

Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Danurejan II	-	-	-	403.121.325,00	566.064.589,00	-	-	-	337.435.771,00	485.210.181,00	-	-	-	83,71%	85,72%	-	-
Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Gedongtengen	-	-	-	628.517.189,00	808.352.082,00	-	-	-	445.890.007,00	709.807.611,00	-	-	-	70,94%	87,81%	-	-
Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Gondokusuman I	-	-	-	379.461.575,00	827.875.180,00	-	-	-	292.574.410,00	727.102.474,00	-	-	-	77,10%	87,83%	-	-
Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Gondokusuman II	-	-	-	405.987.000,00	810.435.440,00	-	-	-	348.433.694,00	743.505.356,00	-	-	-	85,82%	91,74%	-	-
Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Gondomanan	-	-	-	420.454.100,00	787.576.555,00	-	-	-	381.582.621,00	731.987.340,00	-	-	-	90,75%	92,94%	-	-

Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Jetis	-	-	-	740.259.175,00	804.956.565,00	-	-	-	567.877.364,00	671.387.627,00	-	-	-	76,71%	83,41%	-	-
Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Kotagede I	-	-	-	282.030.100,00	439.154.613,00	-	-	-	229.679.993,00	358.593.309,00	-	-	-	81,44%	81,66%	-	-
Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Kotagede II	-	-	-	193.336.000,00	368.781.730,00	-	-	-	145.719.765,00	325.423.838,00	-	-	-	75,37%	88,24%	-	-
Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Kraton	-	-	-	354.000.800,00	783.711.032,00	-	-	-	330.737.540,00	723.950.148,00	-	-	-	93,43%	92,37%	-	-
Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Mantriheron	-	-	-	653.782.000,00	1.153.615.000,00	-	-	-	593.743.560,00	1.053.323.419,00	-	-	-	90,82%	91,31%	-	-

Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Mergangsan	-	-	-	916.719.016,00	1.081.589.027,00	-	-	-	500.652.845,00	790.570.407,00	-	-	-	54,61%	73,09%	-	-
Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Ngampilan	-	-	-	313.283.440,00	657.560.600,00	-	-	-	268.819.935,00	592.901.356,00	-	-	-	85,81%	90,17%	-	-
Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Pakualaman	-	-	-	304.336.050,00	643.024.139,00	-	-	-	259.333.984,00	497.781.110,00	-	-	-	85,21%	77,41%	-	-
Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Tegalrejo	-	-	-	747.099.680,00	469.418.750,00	-	-	-	398.920.565,00	346.665.250,00	-	-	-	53,40%	73,85%	-	-
Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Umbulharjo I	-	-	-	434.884.000,00	866.420.700,00	-	-	-	334.764.517,00	673.778.734,00	-	-	-	76,98%	77,77%	-	-

Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Umbulharjo II	-	-	-	567.710.095,00	781.852.880,00	-	-	-	359.292.003,00	578.730.789,00	-	-	-	63,29%	74,02%	-	-
Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Wirobrajan	-	-	-	487.178.700,00	972.858.928,00	-	-	-	390.071.338,00	838.737.754,00	-	-	-	80,07%	86,21%	-	-
Upaya Pelayanan Kesehatan Rujukan RS Kelas D "Pratama"	-	-	-	-	9.406.686.799,00	-	-	-	-	4.752.312.380,37	-	-	-	-	50,52%	-	-
Pendukung Pelayanan Kesehatan Rujukan RS Kelas D "Pratama"	-	-	-	-	11.108.848.217,00	-	-	-	-	7.446.567.189,00	-	-	-	-	67,03%	-	-

PROGRAM UPAYA PELAYANAN GIZI DAN KESEHATAN KELUARGA	2.939.573.375,00	2.809.773.200,00	1.471.301.138,00	1.617.539.658,00	1.623.502.164,00	1.592.268.055,00	2.536.411.815,00	1.293.386.600,00	1.449.647.717,00	1.503.403.764,00	54,17%	90,27%	87,91%	89,62%	92,60%	-28,60%	-2,07%
Upaya Kesehatan Keluarga dan Reproduksi	408.486.875,00	470.422.500,00	491.098.750,00	552.813.000,00	513.102.000,00	393.366.875,00	449.079.500,00	444.023.750,00	522.830.000,00	494.532.000,00	96,30%	95,46%	90,41%	94,58%	96,38%	11,38%	11,42%
Upaya Pembinaan Gizi Masyarakat	2.220.978.000,00	2.028.117.200,00	571.617.000,00	595.619.000,00	627.770.000,00	985.363.480,00	1.830.700.540,00	492.563.950,00	546.600.500,00	582.857.500,00	44,37%	90,27%	86,17%	91,77%	92,85%	-55,88%	-19,17%
Pengelolaan Operasional Rumah Pemulihan Gizi (RPG)	310.108.500,00	311.233.500,00	408.585.388,00	469.107.658,00	482.630.164,00	213.537.700,00	256.631.775,00	356.798.900,00	380.217.217,00	426.014.264,00	68,86%	82,46%	87,33%	81,05%	88,27%	22,02%	34,35%
PROGRAM PENGENDALIAN PENYAKIT DAN	1.440.867.250,00	1.666.415.375,00	1.572.208.500,00	1.692.068.900,00	1.632.413.327,00	1.169.426.180,00	1.372.538.300,00	1.095.089.150,00	1.428.368.420,00	1.523.379.389,00	81,16%	82,36%	69,65%	84,42%	93,32%	6,23%	13,17%

PENYEHA TAN LINGKUN GAN																	
Pengendalia n Penyakit Menular	867.100.0 00,00	975.863.1 25,00	862.780.0 00,00	899.737.7 00,00	1.019.912. 000,00	628.602. 055,00	741.142.80 0,00	684.343. 280,00	746.902. 280,00	941.460. 030,00	72,49%	75,95%	79,32 %	83,01%	92,31%	8,11%	20,13%
Pengendalia n Penyakit Tidak Menular	103.522.5 00,00	220.052.5 00,00	154.513.7 50,00	163.002.5 00,00	90.226.00 0,00	92.692.3 75,00	213.545.50 0,00	77.773.6 25,00	149.522. 950,00	74.262.6 45,00	89,54%	97,04%	50,33 %	91,73%	82,31%	-7,55%	-9,21%
Pengawasa n dan Pembinaan Kesehatan Lingkungan	470.244.7 50,00	470.499.7 50,00	554.914.7 50,00	629.328.7 00,00	522.275.3 27,00	448.131. 750,00	417.850.00 0,00	332.972. 245,00	531.943. 190,00	507.656. 714,00	95,30%	88,81%	60,00 %	84,53%	97,20%	5,25%	5,87%
Program Pembiayaan dan Jaminan Pemeliharaa n Kesehatan	24.229.46 6.125,00	28.990.95 9.998,00	27.861.27 6.500,00	27.997.54 4.760,00	20.308.35 2.965,00	18.363.6 01.140,0 0	28.514.209. 528,00	27.386.4 78.558,0 0	14.203.6 94.845,0 0	18.340.7 70.741,0 0	75,79%	98,36%	98,30 %	50,73%	90,31%	-8,71%	0,65%
Penyelengg araan Jaminan Kesehatan Masyarakat	24.229.46 6.125,00	28.990.95 9.998,00	27.861.27 6.500,00	27.997.54 4.760,00	20.308.35 2.965,00	18.363.6 01.140,0 0	28.514.209. 528,00	27.386.4 78.558,0 0	14.203.6 94.845,0 0	18.340.7 70.741,0 0	75,79%	98,36%	98,30 %	50,73%	90,31%	-8,71%	0,65%
PROGRAM REGULASI PELAYANA	680.592.1 50,00	2.889.230. 400,00	1.058.820. 500,00	856.698.7 91,00	1.076.810. 173,00	562.389. 340,00	2.079.310.6 80,00	814.971. 080,00	591.684. 030,00	834.743. 278,00	82,63%	71,97%	76,97 %	69,07%	77,52%	16,34%	14,90%

N KESEHATA N DAN PENGELOL AAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATA N																	
Pembinaan dan Pelaksanaa n Regulasi Pelayanan Kesehatan	439.129.6 50,00	2.521.705. 400,00	281.163.0 00,00	285.013.5 00,00	667.569.3 65,00	333.698. 465,00	1.829.093.1 55,00	208.953. 080,00	208.395. 560,00	437.803. 220,00	75,99%	72,53%	74,32 %	73,12%	65,58%	31,24%	25,01%
Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kesehatan	241.462.5 00,00	367.525.0 00,00	777.657.5 00,00	571.685.2 91,00	409.240.8 08,00	228.690. 875,00	250.217.52 5,00	606.018. 000,00	383.288. 470,00	396.940. 058,00	94,71%	68,08%	77,93 %	67,05%	96,99%	24,69%	25,28%
PROGRAM PEMBERDA YAAN MASYARAK AT DAN PROMOSI KESEHATA N	2.754.876. 750,00	1.540.646. 250,00	1.617.582. 475,00	2.033.726. 069,00	2.334.288. 144,00	2.429.02 7.510,00	1.226.670.8 66,00	1.234.23 9.053,00	1.729.21 8.200,00	2.040.11 8.418,00	88,17%	79,62%	76,30 %	85,03%	87,40%	-7,55%	-7,63%

Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan	294.831.000,00	434.495.375,00	445.720.000,00	602.944.900,00	697.626.000,00	174.746.985,00	306.926.875,00	357.164.555,00	512.823.950,00	635.003.000,00	59,27%	70,64%	80,13%	85,05%	91,02%	42,70%	63,54%
Pengelolaan Promosi Kesehatan	680.298.750,00	644.733.000,00	681.834.475,00	916.003.669,00	950.480.894,00	635.188.875,00	504.739.850,00	559.653.078,00	784.897.590,00	838.349.115,00	93,37%	78,29%	82,08%	85,69%	88,20%	16,62%	13,76%
Upaya Pengendalian Dampak Buruk Rokok Terhadap Kesehatan (CHT)	1.779.747.000,00	461.417.875,00	490.028.000,00	514.777.500,00	686.181.250,00	1.619.091.650,00	415.004.141,00	317.421.420,00	431.496.660,00	566.766.303,00	90,97%	89,94%	64,78%	83,82%	82,60%	-39,08%	-43,74%
Program Penelitian, Pengembangan dan Informasi Kesehatan	690.731.500,00	831.528.000,00	886.268.000,00	890.035.000,00	731.194.130,00	550.549.805,00	674.932.500,00	702.981.450,00	788.091.830,00	688.643.943,00	79,71%	81,17%	79,32%	88,55%	94,18%	2,85%	11,16%
Penyelenggaraan Surveilans Epidemiologi dan Penyelidikan KLB	421.256.000,00	548.562.000,00	477.886.000,00	329.770.000,00	404.683.965,00	337.420.605,00	419.058.375,00	354.611.950,00	308.432.465,00	404.001.275,00	80,10%	76,39%	74,20%	93,53%	99,83%	-1,90%	8,91%

Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan dan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	269.475.500,00	282.966.000,00	408.382.000,00	560.265.000,00	326.510.165,00	213.129.200,00	255.874.125,00	348.369.500,00	479.659.365,00	284.642.668,00	79,09%	90,43%	85,30%	85,61%	87,18%	9,90%	14,76%
Program Peningkatan Pelayanan Kefarmasian dan Pengelolaan Alat Kesehatan	7.557.311.000,00	7.262.493.344,00	7.665.130.730,00	24.126.502.200,00	10.820.217.900,00	7.428.945.684,00	6.865.521.888,00	6.198.105.017,00	22.847.108.554,00	10.296.459.613,11	98,30%	94,53%	80,86%	94,70%	95,16%	14,41%	10,40%
Peningkatan Pelayanan Kefarmasian	4.693.707.000,00	4.419.771.000,00	4.452.436.900,00	4.487.177.200,00	4.534.262.000,00	4.619.407.245,00	4.118.526.988,00	3.245.980.312,00	4.227.959.087,00	4.413.020.331,79	98,42%	93,18%	72,90%	94,22%	97,33%	-1,73%	-2,30%
Pengelolaan Alat Kesehatan	2.863.604.000,00	2.842.722.344,00	3.212.693.830,00	19.639.325.000,00	6.285.955.900,00	2.809.538.439,00	2.746.994.900,00	2.952.124.705,00	18.619.149.467,00	5.883.439.281,32	98,11%	96,63%	91,89%	94,81%	93,60%	26,12%	23,13%

Secara umum target kinerja di Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta termasuk kategori baik, namun penyerapan dana / realisasi anggaran yang dilaksanakan tidak dapat terserap 100 % .Hal ini disebabkan karena :

1. Kegiatan Dinas Kesehatan tidak bersifat rutinitas saja, namun ada beberapa kegiatan yang inovatif, yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan, situasi serta kondisi pada tahun yang bersangkutan. Perencanaan anggaran adalah untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk dari kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, anggaran yang terserap di beberapa kegiatan disesuaikan dengan banyaknya kasus yang ada di lapangan. Semakin sedikit kasus yang ada maka prosentase penyerapan anggaran juga semakin kecil.
2. Adanya sumber anggaran lain yang mendukung pelaksanaan kegiatan di bidang kesehatan yaitu APBN (BOK, Akreditasi, Jamkesmas & Jampersal). Yang tidak bisa terealisasi secara optimal karena juknis pelaksanaan tidak sesuai yang di butuhkan, misal dana jampersal diperuntukan rumah tunggu, untuk kota Yogyakarta dengan luas wilayah 36,5 km² dengan jumlah rumah sakit 21 unit , jarak antara rumah sakit dengan rumah penduduk tidak ada permasalahan, keberadaan rumah tunggu kurang dimanfaatkan oleh ibu hamil resiko tinggi.
3. Adanya efisiensi anggaran, khususnya pada kegiatan yang melibatkan pihak ketiga melalui negosiasi harga barang / jasa.

Obat melalui pengadaan Non E katalog turun kontrak karena barang tidak tersedia sesuai jadwal, sehingga sebagian anggaran dikembalikan.

Serapan total anggaran belanja Dinas Kesehatan dari tahun 2012 – 2017, serapan terendah pada tahun 2015, hal ini dikarenakan anggaran untuk persiapan operasional RS Pratama yang dianggarkan pada anggaran perbantuan tahun 2015 selama 3 bulan tidak bisa terealisasi penuh karena serah terima gedung dilaksanakan pada pertengahan bulan November 2015, anggaran untuk pengadaan tenaga non PNS RS Pratama dikembalikan karena tatakala grand opening RS Pratama direncanakan bulan Maret 2016.

Meskipun semua kegiatan di Dinas Kesehatan tidak dapat menyerap semua (100 %) dari anggaran yang disediakan, program yang dilaksanakan sudah sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan yaitu :

- a. Memasyarakatkan budaya perilaku hidup bersih dan sehat (pola hidup dan lingkungan) , surveilans serta monitoring kesehatan, melalui program pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan, program pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan.
- b. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan khususnya Puskesmas melalui program upaya pelayanan kesehatan, program peningkatan pelayanan kefarmasian dan pengelolaan alat kesehatan,

program Upaya Pelayanan Gizi dan Kesehatan Keluarga, program regulasi dan pengembangan sumber daya kesehatan.

- c. Meningkatkan Jaminan Kesehatan Masyarakat melalui program Pembiayaan Jaminan Kesehatan Masyarakat.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan analisis terhadap permasalahan internal maupun eksternal dalam pembangunan kesehatan di Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, dapat diidentifikasi factor-faktor kekuatan (Strength), kelemahan (Weakness), Peluang (Opportunities) dan Ancaman (Treats).

2.4.1 Kekuatan (Strength)

Kekuatan (Strength) yang dimiliki Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta antara lain adalah adanya komitmen untuk peningkatan pelayanan kesehatan terutama bagi masyarakat miskin melalui jaminan kesehatan Daerah, Meningkatnya peran serta masyarakat dalam program-program kesehatan dengan adanya kader kesehatan di setiap kelurahan, Adanya kondisi lingkungan yang kondusif yang menunjang kegiatan pelayanan kesehatan di setiap wilayah di Kota Yogyakarta.

2.4.2 Kelemahan (Weakness)

Sedangkan Kelemahan (Weakness) yang masih harus dihadapi di Kota Yogyakarta adalah masih terjadinya kasus penyakit yang terlambat ditangani dikarenakan adanya keterlambatan pengambilan keputusan oleh keluarga, Kondisi gedung fasilitas kesehatan milik pemerintah yang kurang memadai sesuai standar pelayanan, serta masih belum tercukupinya Sumber Daya Manusia tenaga dan belum terpenuhi kebutuhan SDM sesuai Analisis jabatan.

2.4.3 Peluang (Opportunities)

Adapun peluang yang mendukung pelayanan Dinas Kesehatan adalah banyaknya fasilitas kesehatan baik milik pemerintah maupun swasta di Kota Yogyakarta, Puskesmas dan Rumah Sakit milik Pemerintah yang melaksanakan PPK BLUD, adanya kader kesehatan di setiap RW, adanya regulasi bidang kesehatan yang mendukung upaya kesehatan, serta adanya perguruan tinggi bidang kesehatan yang mendukung peningkatan tenaga kesehatan yang kompeten

2.4.4 Ancaman (Treats)

Sedangkan ancaman dalam pelayanan kesehatan antara lain kesadaran dan pengetahuan masyarakat dalam berperilaku sehat masih rendah, dinamika epidemiologi penyakit yang cepat, mobilitas masyarakat terutama ibu hamil dan status kependudukan yang menyulitkan tenaga kesehatan untuk melaksanakan intervensi kesehatan, kepadatan penduduk, kepadatan hunian dan kualitas lingkungan yang tidak memenuhi syarat.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

3.1.1. Gambaran umum

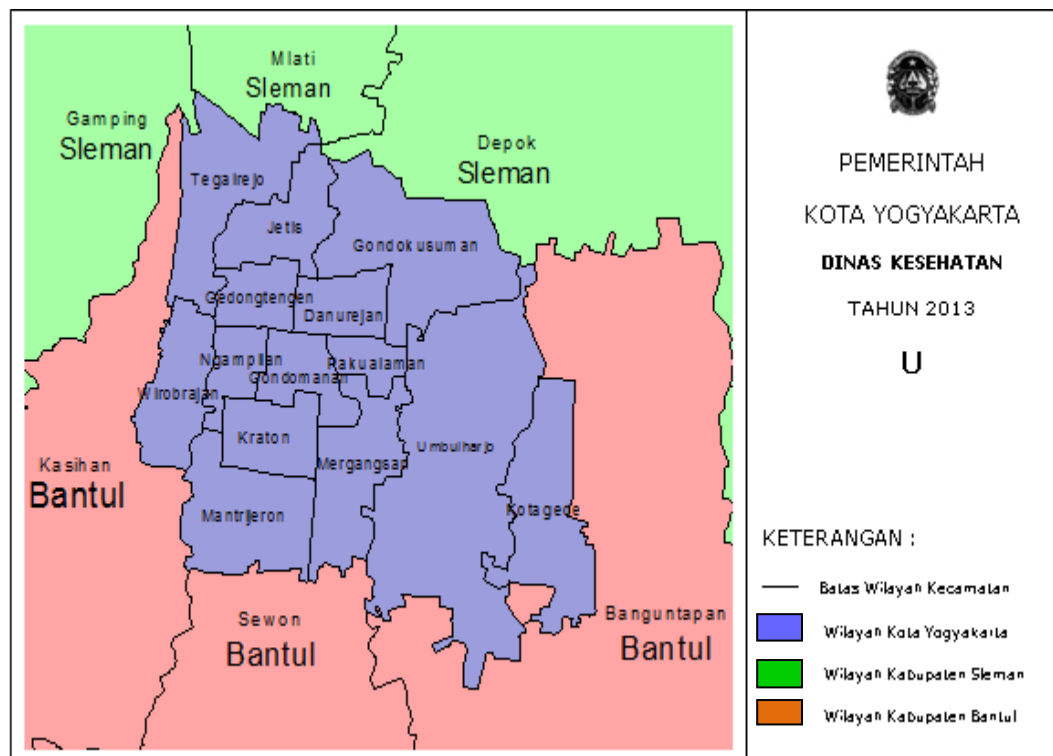
A. Geografi

Wilayah Kota Yogyakarta terletak antara 110° 20' 41" sampai 110° 24' 14" Bujur Timur dan 07° 45' 57" sampai 07° 50' 25" Lintang Selatan, dengan ketinggian tanah rata-rata 75 meter sampai dengan 132 meter di atas permukaan air laut. Luas wilayah Kota Yogyakarta kurang lebih hanya 1,02 % dari seluruh luas wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu 32,5 km². Terbagi menjadi 14 wilayah kecamatan dan 45 wilayah kelurahan yang sebagian besar tanahnya regosol dengan formasi geologi batuan sedimen old andesit.

Secara administratif, Kota Yogyakarta berbatasan dengan :

- Sebelah utara : Kabupaten Sleman
- Sebelah timur : Kabupaten Bantul dan Sleman
- Sebelah selatan : Kabupaten Bantul
- Sebelah barat : Kabupaten Bantul dan Sleman
- Sungai Code yang mengalir di bagian tengah kota
- Sungai Winongo yang mengalir di bagian barat kota

Gambar 3.1 Peta Administrasi Kota Yogyakarta



Wilayah utara pada umumnya mempunyai permukaan tanah yang lebih tinggi dibandingkan wilayah-wilayah kecamatan di bagian selatan. Luas wilayah berdasarkan tinggi tempat dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1

*Luas Wilayah Berdasarkan Ketinggian Wilayah Kecamatan di Kota Yogyakarta
(di atas permukaan laut)*

NO	KECAMATAN	LUAS MENURUT KETINGGIAN (Ha)				
		0-25 m	25-50 m	50-100 m	100-700 m	500-1000 m
1	Mantrijeron	-	-	261,0000	-	-
2	Kraton	-	-	140,0000	-	-
3	Mergangsan	-	-	202,1050	28,8950	-
4	Umbulharjo	-	-	604,6456	205,3544	-
5	Kotagede	-	-	302,4915	4,5085	-
6	Gondokusuman	-	-	-	399,0000	-
7	Danurejan	-	-	-	110,0000	-
8	Pakualaman	-	-	-	63,0000	-
9	Gondomanan	-	-	41,8925	70,1075	-
10	Ngampilan	-	-	30,7500	51,2500	-
11	Wirobrajan	-	-	72,4263	103,5737	-
12	Gedongtengen	-	-	-	96,0000	-
13	Jetis	-	-	-	170,0000	-
14	Tegalrejo	-	-	-	291,0000	-
Jumlah (Ha)		-	-	1.655,3109	1.592,6891	-

Sumber : Profil Dinas Kesehatan 2016

Secara umum Kota Yogyakarta merupakan daratan dengan permukaan tanah yang datar dengan kemiringan lahan maksimum relative datar dengan kemiringan lahan 0-2% seluas 2.790,88 Ha dan kemiringan lahan >40% seluas 10,94 Ha. Wilayah kecamatan yang mempunyai kemiringan di atas 40% terluas terdapat di Kecamatan Kotagede dengan kemiringan mencapai 3,94 Ha. Luas wilayah berdasarkan kemiringan lahan per kecamatan dapat dilihat pada data sebagai berikut :

Tabel 3.2

Luas Wilayah Kota Yogyakarta Berdasarkan Kemiringan Lahan

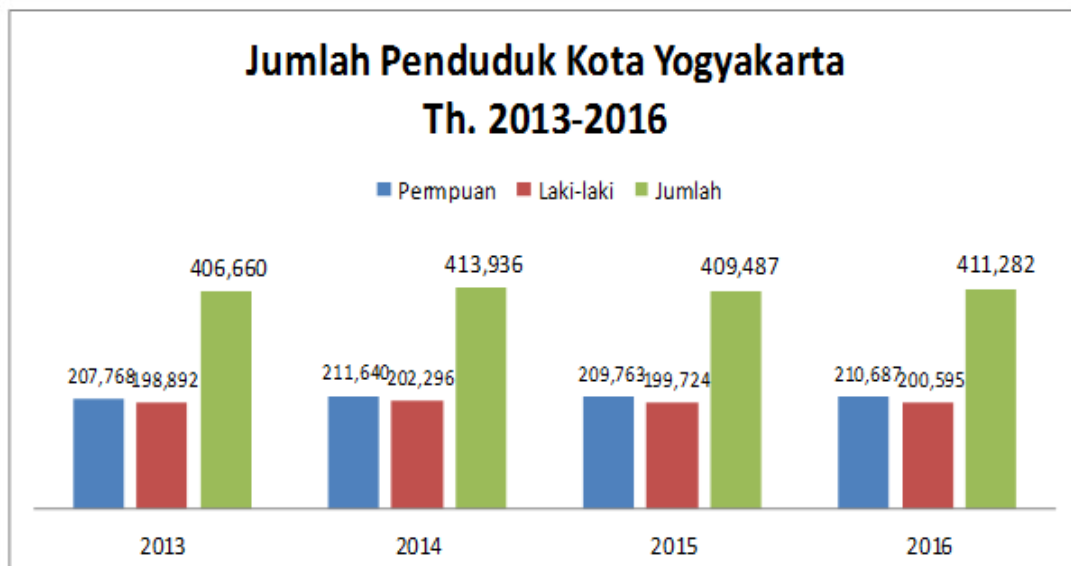
NO	KECAMATAN	LUAS BERDASARKAN LERENG/KEMIRINGAN LAHAN/Ha			
		0-2%	2-15%	15-40%	>40%
1	Mantrijeron	244,4	12,2	4,4	-
2	Kraton	140,0	-	-	-
3	Mergangsan	105,1	25,9	-	-
4	Umbulharjo	764,5	45,0	1,7	0,7
5	Kotagede	277,8	23,3	2,5	3,9
6	Gondokusuman	328,6	67,8	2,7	-
7	Danurejan	75,9	27,6	5,9	0,6
8	Pakualaman	63,0	-	-	-
9	Gondomanan	105,9	6,1	-	-
10	Ngampilan	50,9	31,1	-	-
11	Wirobrajan	147,4	21,3	6,1	1,3
12	Gedongtengen	84,4	8,3	2,8	0,4
13	Jetis	148,3	20,7	0,5	0,5
14	Tegalrejo	254,7	24,0	8,8	3,5
Jumlah		2790,9	313,3	35,3	10,9

Sumber Data : Profil Dinas Kesehatan Kota Yk.

B. Demografi

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta menunjukkan bahwa dalam satu tahun ini terjadi kenaikan jumlah penduduk. Pada tahun 2015 sebanyak 409.487 jiwa dan pada tahun 2016 sebanyak 411.282 jiwa sehingga mengalami kenaikan 0,43 % atau sebanyak 1.795 jiwa. Karena itu kepadatan penduduk Kota Yogyakarta juga mengalami kenaikan menjadi 12.655 jiwa/km.

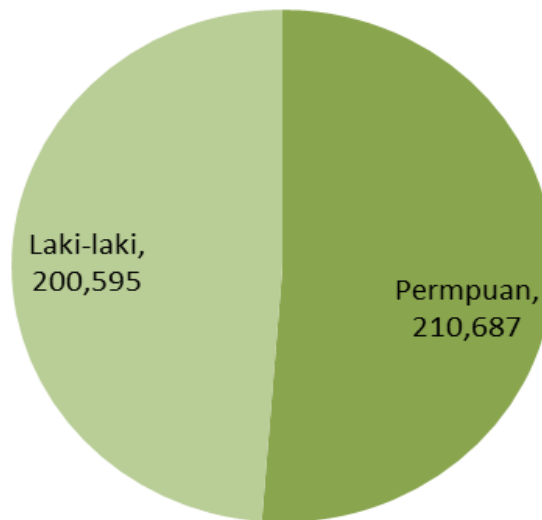
Grafik 3.1
Jumlah Penduduk Kota Yogyakarta 2013-2016



Sumber Data : Profil Dinas Kesehatan Kota Yk.

Bila dibandingkan antara laki-laki dan perempuan, jumlah penduduk Kota Yogyakarta dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 lebih banyak yang perempuan, walaupun tidak terpaut banyak. Pada tahun 2016 ini, dari seluruh penduduk, jumlah perempuan mencapai 51,17 %, sedangkan jumlah laki-laki hanya 48,83 % yang berarti terdapat selisih sebesar 2,34 % atau sebanyak 38.351 jiwa.

*Grafik 3.2
Jumlah Penduduk Laki-Laki dan Perempuan di Kota Yogyakarta Tahun 2016*

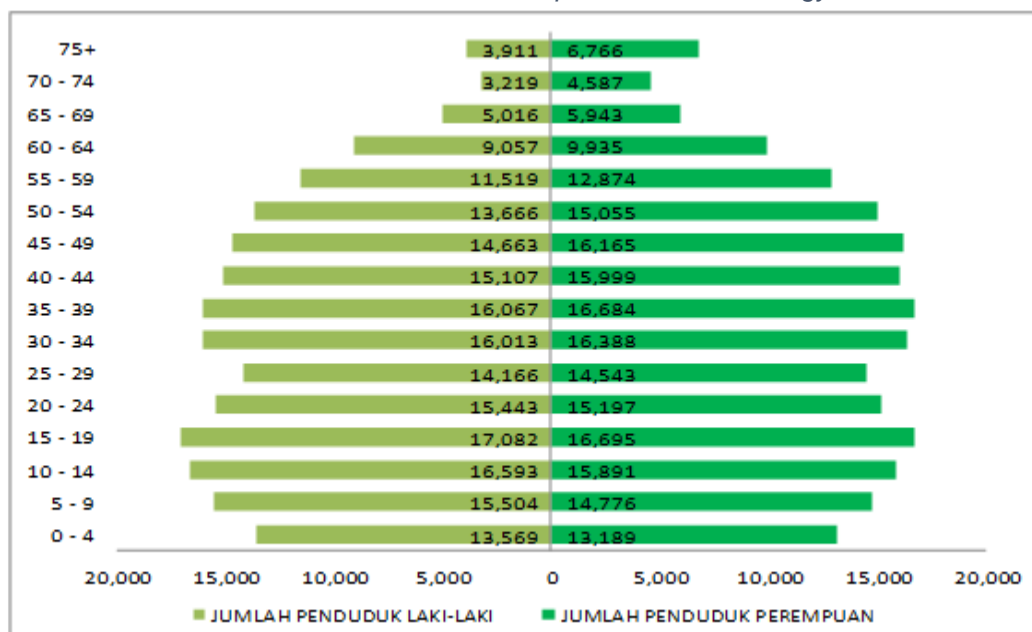


Sumber Data : Profil Dinas Kesehatan Kota Yk.

Dengan mengetahui jumlah penduduk di tiap kelompok umur, dapat diketahui seberapa banyak penduduk yang berpotensi sebagai beban yaitu penduduk yang belum produktif (usia 0 – 14 tahun) dan penduduk yang dianggap kurang produktif (65 tahun ke atas). Dilihat dari kaca mata kesehatan usia produktif (15 – 64 tahun) dapat lebih mandiri dalam menjaga kesehatannya dan sebaliknya pada usia yang belum dan kurang produktif.

Pada Grafik Penduduk berikut ini menggambarkan besarnya usia produktif. Bila dihitung, besar Dependency Ratio di Kota Yogyakarta pada tahun 2016 ini sebesar 41, yaitu menunjukkan bahwa usia ketergantungan lebih kecil dibandingkan dengan usia produktif. Permasalahan lebih besar terdapat pada usia belum produktif daripada usila. Walaupun demikian kedua kelompok usia kurang produktif ini perlu mendapatkan perhatian lebih karena lebih rentan terhadap penyakit dan masalah kesehatan. Dilihat dari jumlah penduduk menurut jenis kelamin tidak begitu tampak perbedaannya kecuali pada usia 75 tahun ke atas. Namun dengan banyaknya wanita usia reproduktif maka diperlukan perhatian yang lebih intensif dalam rangka menurunkan angka kematian ibu, kematian neonatus dan kematian bayi.

Grafik 3.3
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur di Kota Yogyakarta 2016



Sumber Data : Profil Dinas Kesehatan Kota Yk

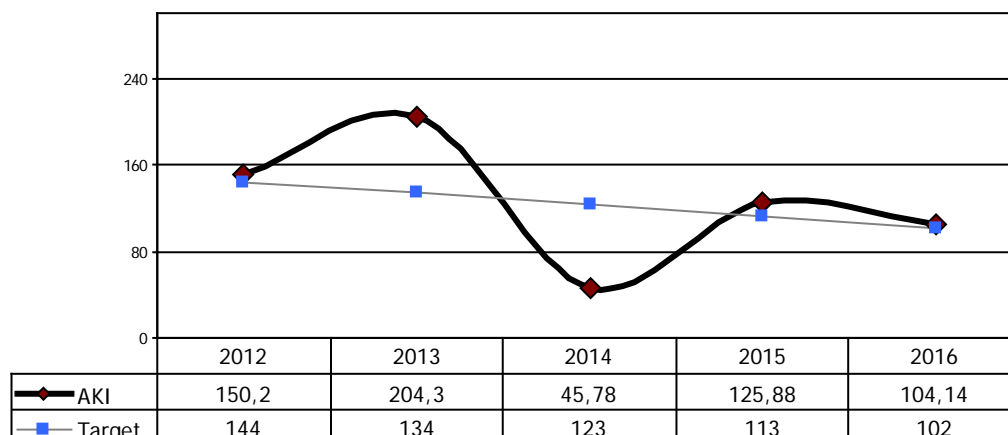
3.1.2 Derajat Kesehatan

A. Mortalitas

1. Angka Kematian Ibu

Grafik 3.4

Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup di Kota Yogyakarta Tahun 2012 – 2016



Sumber : Dinas Kesehatan, 2016

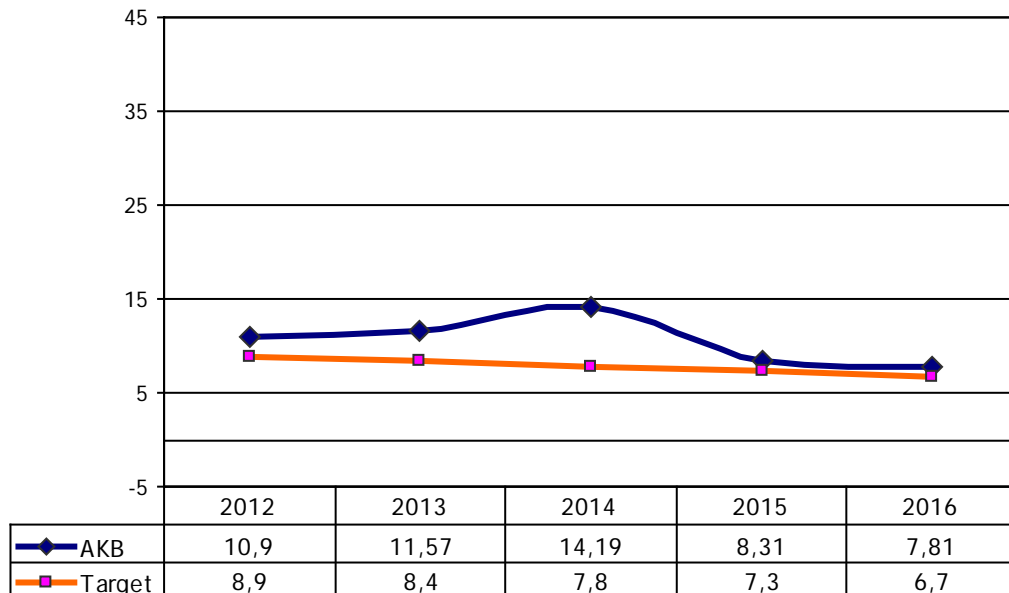
Angka Kematian Ibu (AKI) di Kota Yogyakarta berfluktuasi dari tahun ke tahun, bahkan tahun 2013 cenderung mengalami kenaikan dibandingkan Tahun 2012. Meskipun jika dicermati AKI di Kota Yogyakarta pada Tahun 2014 menurun drastis hingga 45.78 per 100.000 KH, tetapi pada tahun 2015 AKI kembali meningkat menjadi 125.88 per 100.000 KH. Angka tersebut masih belum sesuai target yang telah ditetapkan 113 per 100.000 KH dan pada tahun 2016 AKI dapat ditekan menjadi 104.14 per 100.000 KH.

Kecenderungan peningkatan AKI dan angka tersebut belum sesuai dengan target menjadi permasalahan kesehatan di Kota Yogyakarta. Hal tersebut memerlukan upaya penanggulangan yang tepat dan menjadi perhatian semua pihak terkait. Berdasarkan data empiris Tahun 2016 penyebab kematian ibu di Kota Yogyakarta disamping karena perdarahan, banyak faktor lain yang menjadi penyebab, antara lain: HIV, penyakit jantung dan 1 kasus yang belum dapat diketahui penyebabnya. Berbagai upaya telah dilaksanakan untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi baik melalui kebijakan pemerintah pusat maupun inovasi dari pemerintah kota Yogyakarta. Upaya tersebut adalah diberlakukan Jaminan Kesehatan Daerah, Implementasi ANC berkualitas dan ANC terpadu sehingga dapat mendeteksi adanya faktor resiko dan komplikasi kehamilan, mengoptimalkan peran YES 118 untuk melayani ibu hamil berisiko dan mengoptimalkan peran kader pendamping bumil di wilayah sehingga semua ibu hamil yang memerlukan pemantauan atau tindakan rujukan kegawatdaruratan dapat segera untuk mendapatkan pertolongan kesehatan.

2. Angka Kematian Bayi

Grafik 3.5

Angka Kematian Bayi Per 1000 Kelahiran Hidup di Kota Yogyakarta Tahun 2012 – 2016

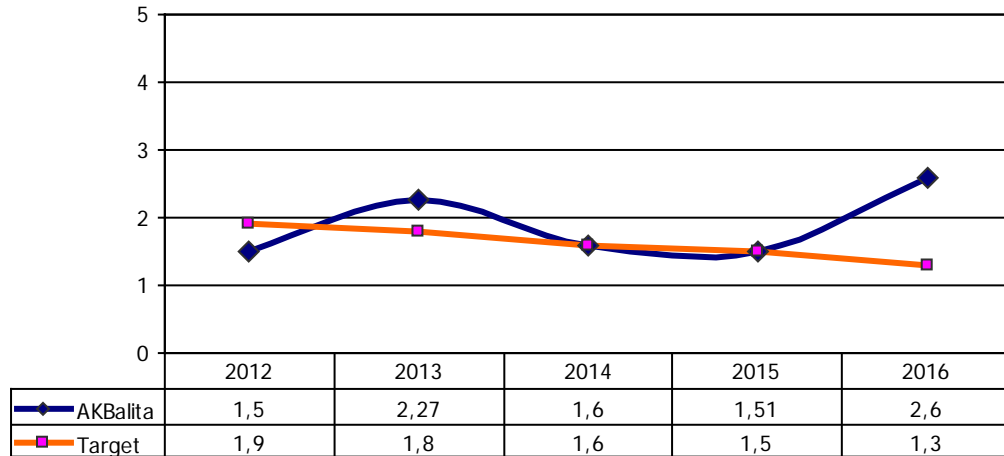


Sumber : Profil Dinas Kesehatan Kota Yk.

Angka Kematian Bayi di Kota Yogyakarta dalam 5 tahun terakhir cenderung mengalami penurunan. Secara umum kasus kematian bayi di Kota Yogyakarta pada tahun 2016 penyebab terbanyak adalah berat badan lahir rendah (BBLR) dan asfiksia, pneumonia, meningitis dan kelainan kongenital yang terlambat mendapatkan penanganan adekuat.

3. Angka Kematian Balita

Grafik 3.6
 Angka Kematian Balita Per 1000 Kelahiran Hidup di Kota Yogyakarta
 Tahun 2012 - 2016



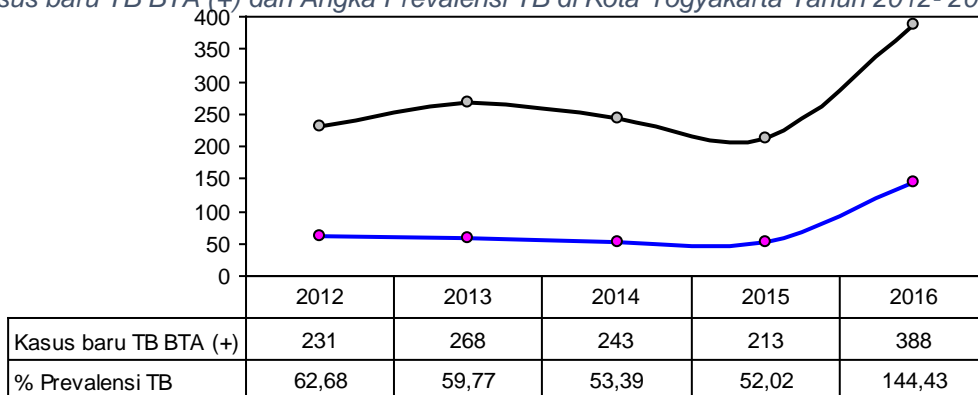
Sumber : Profil Dinas Kesehatan Kota Yk.

Angka Kematian Balita di Kota Yogyakarta dalam 5 tahun terakhir juga masih fluktuatif. Pada tahun 2016 mengalami kenaikan 2.6 per 1000 kelahiran dibanding tahun 2015 sebesar 1.51 per 1000 kelahiran. Angka Kematian Balita ini Jauh dari target yang ditetapkan <1.3. Adapun penyebab kematian di Kota Yogyakarta pada tahun 2016 disebabkan karena infeksi (pneumonia, Meningitis), DBD, kelainan Kongenital (jantung), dan Kanker.

B. Morbiditas

1. TB Paru

Grafik 3.7
 Kasus baru TB BTA (+) dan Angka Prevalensi TB di Kota Yogyakarta Tahun 2012- 2016



Sumber : Profil Dinas Kesehatan, 2016

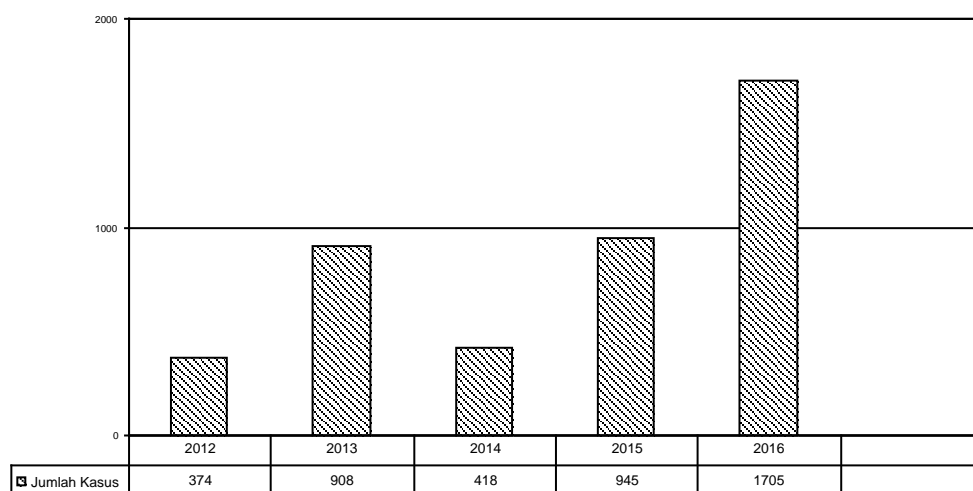
Penyakit Tuberkulosis (TB) terdiri TB paru dan TB Ekstra Paru. TB paru terdiri dari TB BTA (+) dan BTA (-)/Rontgen (+). TB BTA (+) adalah TB paru dengan hasil pemeriksaan mikroskopis BTA positif. Potensi menularkan penyakit TB pada kasus TB BTA (+) lebih besar dibanding TB BTA (-), Satu orang pasien TB dengan hasil BTA (+) apabila tidak mendapatkan pengobatan dapat menularkan ke orang-

orang disekitarnya antara 5 sampai 15 orang pertahun. Kasus Baru TB BTA (+) pada tahun 2016 mengalami kenaikan yang cukup tinggi sebanyak 388 kasus dan prevalensi TB tahun 2016 144.43%. Angka konversi (persentase penderita TBC paru BTA positif yang mengalami konversi menjadi BTA negatif setelah menjalani masa pengobatan intensif) mengalami kenaikan namun belum mencapai target (80%) sehingga masih terdapat potensi penularan. Upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan angka konversi penderita TB Paru dengan memberikan motivasi penderita oleh PMO dan petugas kesehatan dalam hal kepatuhan minum obat dan reward bagi penderita sembuh. Kondisi yang mendukung peningkatan kasus adalah kondisi lingkungan Kota Yogyakarta belum semua memenuhi syarat kesehatan.

2. Demam Berdarah

Grafik 3.8

Jumlah Penderita Demam Berdarah di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016



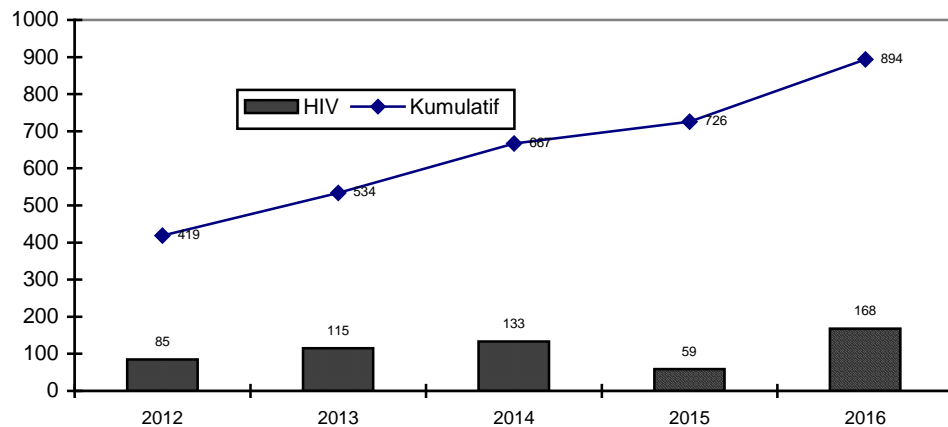
Sumber : Profil Dinas Kesehatan

Kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) di Kota Yogyakarta merupakan kasus yang perlu diwaspadai sepanjang tahun karena penyakit DBD merupakan penyakit endemis. Dalam rentang waktu 2012 - 2016, jumlah penderita Demam Berdarah di Kota Yogyakarta fluktuatif dan pada tahun 2016 terjadi lonjakan kasus yang cukup tinggi yaitu 1705 kasus. Dengan melihat jumlah kasus Demam Berdarah yang masih tinggi dapat dikatakan bahwa masih ada sumber-sumber potensia yaitu rendahnya angka bebas jentik yaitu dibawah 95 % yang dikarenakan perilaku sebagian masyarakat kurang peduli terhadap lingkungannya, yang menyebabkan penyebaran penyakit Demam Berdarah. Kegiatan – kegiatan terkait upaya penanggulangan antara lain : penyelidikan epidemiologi kasus DBD di wilayah oleh surveilans kelurahan dan Puskesmas, koordinasi dan desiminasi informasi dengan lintas program dan lintas sektor, *Community Deal* DBD tingkat kelurahan, kranisasi sekolah, fogging Focus diwilayah yang terdapat penularan

penyakit DBD, Gerakan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN), dan pemantauan Jentik Berkala oleh pokjnal DBD tingkat Kota.

3. HIV

Grafik 3.9
Komulatif Kasus HIV dan Trend Epidemi di Kota Yogyakarta Tahun 2012- 2016

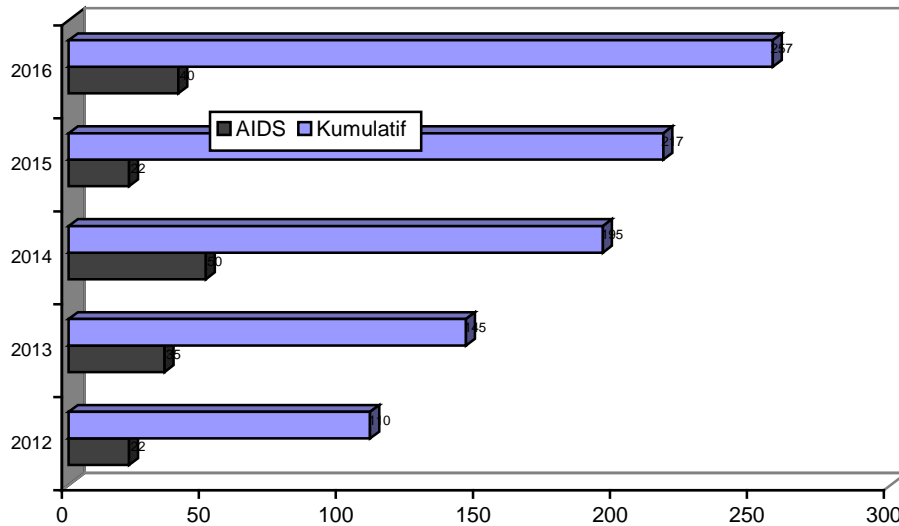


Sumber : Profil Dinas Kesehatan

Jumlah penderita HIV di Kota Yogyakarta mengalami kenaikan yang sangat signifikan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Bahkan jika dilihat secara kumulatif penderita HIV pada tahun 2016 jumlahnya meningkat 2 kali lipat dari tahun 2012. Penemuan penderita HIV semakin meningkat dikarekan Peningkatan jumlah penderita disebabkan karena adanya kecenderungan peningkatan perilaku Laki-laki Sex Laki-laki (LSL), selain itu layanan yang diberikan oleh Dinas Kesehatan semakin luas sarannya, terutama untuk populasi berisiko seperti ibu hamil, Waria, Wanita pekerja seks, Laki laki seks laki laki, pengguna napza suntik, penderita TBC dan Diabetes melitus. Dinas kesehatan kota Yogyakarta sudah mengupayakan untuk mengurangi penularan dengan pembagian kondom, namun perlu kerja sama dengan lintas sektor terkait untuk perubahan perilaku LSL.

4. AIDS

Grafik 3.10
Komulatif Kasus AIDS dan Trend Epidemi di Kota Yogyakarta Tahun 2012- 2016



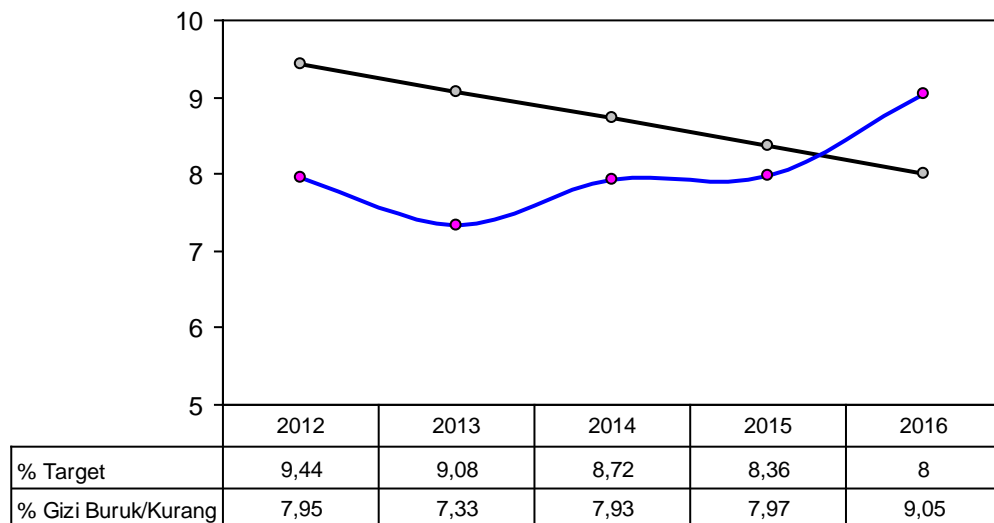
Sumber : Dinas Kesehatan, 2016

Angka Kasus AIDS di Kota Yogyakarta dalam 5 tahun terakhir juga masih fluktuatif. Berdasarkan data grafik diatas bisa dilihat bahwa peningkatan cukup tajam dalam penambahan jumlah kasus baru Kasus AIDS di Kota Yogyakarta. Pada tahun 2016 mengalami kenaikan 40 kasus dibandingkan tahun 2015 sebesar 22 kasus AIDS. Jumlah kumulatif tersebut 257 kasus di tahun 2016 merupakan lebih dari dua kali lipat dibandingkan dengan jumlah komulatif pada tahun 2012 sejumlah 110 kasus. Peningkatan kasus AIDS dimulai sejak 3 tahun terakhir, tercatat pada tahun 2014 ditemukan kasus baru AIDS sebanyak 50 kasus. Sebagaimana program nasional, Kota Yogyakarta juga mencanangkan program terapi ARV sebagai penanggulangan AIDS, namun demikian Kasus AIDS meningkat dikarenakan ODHA (orang dengan HIV AIDS) tidak optimal dalam mengkonsumsi ARV (anti retro viral) obat untuk penderita HIV. Upaya yang telah dilakukan untuk peningkatan pasien ODHA untuk memperoleh ARV adalah dengan peningkatan kemudahan akses layanan kesehatan, bekerjasama dengan keluarga dan petugas LSM dalam memberikan dukungan kepada ODHA untuk menjaga kepatuhan pasien dalam menjalankan terapi ARV.

5. Status Gizi

Grafik 3.11

Prevalensi Balita Gizi Buruk dan Gizi Kurang di Kota Yogyakarta Tahun 2012- 2016



Sumber : Profil Dinas Kesehatan Kota Yk.

Saat ini permasalahan gizi masih di temukan di Kota Yogyakarta dan jumlahnya cenderung bertambah. Prevalensi kekurangan gizi (balita gizi buruk & balita gizi kurang) tahun 2016 sebesar 9.05 % tidak mencapai target yang ditetapkan sebesar 8.00%. Pada grafik diatas menunjukkan adanya peningkatan dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2012. Berdasarkan data beberapa faktor penyebab kasus-kasus balita gizi buruk adalah disebabkan karena pola makan balita yang salah, ketidaktepatan pola asuh, faktor sosial dan ekonomi yang memepengaruhi terhadapnya kemampuan membeli pangan keluarga, serta adanya penyakit penyerta yang diderita balita. Dengan demikian dalam upaya mencapai target penurunan prevalensi kekurangan gizi tersebut, perlu adanya penanganan intensif terhadap permasalahan gizi baik untuk balita gizi buruk dan gizi kurang yang ada di Kota Yogyakarta. Selain itu, untuk menekan agar potensi terjadinya kasus balita dengan gizi buruk tidak menjadi lebih besar tetap perlu diperlukan upaya-upaya yang strategis. Upaya yang sudah dilaksanakan adalah dengan pemberian makanan tambahan, adanya kader pendamping balita gizi buruk, konseling dan pengobatan di puskesmas, dan perawatan di Rumah Pemulihan Gizi Kota Yogyakarta.

Tabel 3.3

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan

NO	ASPEK KAJIAN	CAPAIAN /KONDISI SAAT INI	STANDAR YANG DIGUNAKAN	FAKTOR YANG MEMPENGARUHI		PERMASALAHAN PELAYANAN DINAS KESEHATAN
				INTERNAL	EKSTERNAL	
1.	Sosial dan Budaya	77.8%	80%	Belum adanya juknis yang mengatur kelembagaan keluarga Siaga	Kurangnya koordinasi lintas sektor di tingkat kota	Persentase Cakupan Kelurahan Siaga Aktif Mandiri
2.	Sosial dan Budaya	78%	80	Pelayanan yang belum sesuai SOP, Waktu tunggu pelayanan yang relatif lama dikarenakan keterbatasan SDM Kesehatan	Meningkatnya jumlah pasien yang memanfaatkan layanan BPJS	Indeks Kepuasan Layanan Kesehatan
3.	Sosial, Ekonomi	9.05%	8%	rasio tenaga kesehatan per 100.000 penduduk masih kurang : bidan (tercapai 81,28%), ahli kesehatan masyarakat (tercapai 8,3%), tenaga gizi (tercapai 19,88%), tenaga sanitasi (tercapai 22,9%)	Pemantauan status gizi cukup sulit karena beberapa orang tua / keluarga tidak membawa anaknya yang kurus ke posyandu / puskesmas dengan berbagai alasan sehingga tidak terpantau oleh kader pendamping balita gizi kurang dan buruk maupun oleh tenaga kesehatan.	Prevalensi kekurangan gizi (gizi buruk dan gizi kurang tinggi)
4.	Sosial	76.05%	85%	Sebagian besar pelaksanaan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan diluar jam kerja puskesmas	Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita di posyandu masih kurang, -domisili tidak di	Persentase balita ditimbang berat badannya rendah

					Kota meskipun ber KK Kota	
5.	Sosial, Budaya	104.14	<102	-rasio tenaga kesehatan per 100.000 penduduk masih kurang : bidan (tercapai 81,28%), ahli kesehatan masyarakat (tercapai 8,3%), tenaga gizi (tercapai 19,88%), tenaga sanitasi (tercapai 22,9%) -Tidak ada bidan yang berdomisili di wilayah (kelurahan)	- Mobilitas ibu hamil yang cukup tinggi menyebabkan kesulitan dalam pedataan dan pendampingan ibu hamil - Tingginya penyakit penyerta (PTM) pada ibu hamil disebabkan perilaku hidup sehat yang masih rendah - HIV sebagai re-emerging disease di Kota Yogyakarta	Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup tinggi
6.	Sosial Ekonomi	7.81	6.7	- sda -	Berat Badan Lahir Rendah disebabkan kekurangan nutrisi ibu selama hamil	Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup tinggi
7.	Sosial	2.60	<1.3	-sda-	Kewaspadaan mengenali tanda bahaya pada balita di masyarakat masih rendah	Angka kematian balita per 1.000 kelahiran hidup tinggi
8.	Sosial	99.97%	100%	Supervisi Fasilitatif Program Kesehatan Ibu dan Anak di faskes swasta masih ditingkatkan	satu kasus kelahiran yang tidak ditolong tenaga kesehatan dikarenakan bayi sudah lahir sebelum kontak dengan tenaga kesehatan	Masih ada kelahiran yang tidak ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih (PN)
9.	Sosial, Ekonomi	85.35%	100%	Pola penusunan tata kala kegiatan MP ASI masih masih	Peran serta keluarga dan masyarakat dalam mendukung	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga

				kurang sesuai	kegiatan MP ASI masih kurang	miskin
10.	Sosial	90.96%	96%	Pemantauan Pencatatan dan pelaporan ibu hamil belum optimal	Masih ada ibu hamil yang belum memahami pentingnya pemeriksaan kehamilan sejak dini	Belum semua ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar (K4)
11.	Sosial dan Budaya	96.64%	99%	Kurangnya sosialisasi petugas kepada masyarakat, tentang bahan kandungan vaksin	Ada beberapa orang tua yang tidak setuju bayinya diimunisasi, karena pemahaman agama yang keliru	Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap
12.	Sosial dan Budaya	98.57%	100%	Kurangnya sosialisasi petugas kepada masyarakat, tentang bahan kandungan vaksin	Ada beberapa orang tua yang tidak setuju bayinya diimunisasi, karena pemahaman agama yang keliru	Cakupan imunisasi anak Sekolah Dasar
13.	Sosial	87.47%	88%	Kurangnya motivasi pegawai untuk meningkatkan kompetensinya	Aturan untuk mengikuti Tugas Belajar dibatasi usia, sedangkan SDM yang tidak memenuhi standar kompetensi tidak memenuhi ketentuan usia	Persentase Cakupan SDM Kesehatan yang memenuhi standar kompetensi

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Renstra Dinas Kesehatan disusun dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakarta taun 2017-2022 yang merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif yang didalamnya memuat program-program pembangunan kesehatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan maupun melalui peran aktif masyarakat untuk kurun waktu 2017-2022 dan memberikan penekanan pada pencapaian sasaran Prioritas Nasional, Standar

pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan dan Sustainable Development Goals (SDG's). Dalam rangka terselenggaranya pembangunan kesehatan secara berhasil-guna dan berdaya-guna dalam rangka mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

Tabel 3.4

Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Walikota Wakil Walikota Yogyakarta

VISI : Meneguhkan Kota Yogyakarta Sebagai Kota Nyaman Huni dan Pusat Pelayanan Jasa yang Berdaya Saing Kuat Untuk Keberdayaan Masyarakat Dengan Berpijak Pada Nilai Keistimewaan				
MISI ke 4 : Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Sosial dan Budaya				
No	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN KOTA	INDIKATOR SASARAN
1.	Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan	Indeks Pembangunan Manusia	Harapan hidup masyarakat meningkat	Angka Harapan Hidup Meningkat

Sesuai dengan misi ke 4 “ Meningkatkan kualitas Pendidikan, Kesehatan, Sosial dan Budaya” dan dalam upaya mewujudkan misi tersebut , Dinas Kesehatan melakukan telaahan terhadap beberapa permasalahan dibidang kesehatan. Hasil telaahan terhadap permasalahan bidang kesehatan di Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta maka faktor pendorong dan penghambat yang ditemukan dalam bidang kesehatan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.5

Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Kesehatan terhadap Pencapaian Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

No.	Misi dan Program KDH dan WKD Terpilih	Permasalahan Pelayanan Dinas Kesehatan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
Misi 4 : Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Sosial dan Budaya				
1.	Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat	Prevalensi gizi buruk dan gizi kurang pada balita tinggi	Rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya gizi untuk balita	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya kader pendamping balita yang memantau pertumbuhan dan perkembangan balita di wilayah - Adanya Rumah Pemulihan Gizi (RPG) yang memberikan pelayanan pemulihan terhadap balita gizi kurang & buruk. - Pemberian bantuan stimulan PMT Pemulihan bagi bumil dan balita gizi buruk memberikan dampak pemulihan terhadap kondisi ibu hamil dan balita yang mengalami penurunan gizi
2.	Proram Peningkatan Kesehatan Masyarakat	Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup tinggi	<ul style="list-style-type: none"> - Faktor gaya hidup - Masih tinggi angka KTD pada remaja - Rendahnya kesadaran ibu hamil untuk memeriksakan kesehatan selama kehamilan - Masih adanya kasus persalinan tidak ditangani tenaga kesehatan - Tingginya ibu hamil dengan 	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya kader pemantau ibu hamil - Implementasi ANC berkualitas atau ANC terpadu sehingga dapat mendeteksi adanya faktor resiko dan komplikasi kehamilan - Berjalannya program suami siaga, pembinaan pada bidan praktek swasta serta

			<p>faktor resiko (Anemia, KEK, penyakit penyerta lainnya</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sistem manual rujukan maternal neonatal belum berjalan dengan optimal 	<p>menyiapkan buku KIA untuk semua ibu hamil sebagai penghubung bagi semua tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kepada ibu hamil, kader pendamping, serta keluarga/suami</p>
3.	Program Upaya Peningkatan Kesehatan Masyarakat	Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup tinggi	<ul style="list-style-type: none"> - Masih tinggi angka KTD pada remaja - Kurangnya sarana NICU di fasilitas kesehatan rujukan 	<p>Adanya perwal manual rujukan, sehingga meminimalisir keterlambatan rujukan</p>
4.	Program Upaya peningkatan Kesehatan Masyarakat	Angka kematian balita per 1.000 kelahiran hidup tinggi	<ul style="list-style-type: none"> - Rendahnya Pemberian ASI Eksklusif - Masih adanya rumah tidak layak huni yang m 	<p>Akses ke Puskesmas atau Fasilitas kesehatan lain sangat mudah</p>
5.	Program Pencegahan dan pengendalian penyakit	Kasus Penyakit Menular masih Tinggi (DBD, HIV/AIDS, TB Paru)	<ul style="list-style-type: none"> - Kepadatan penduduk berpotensi meningkatkan penularan kasus penyakit - Masih adanya rumah tidak layak huni yang meningkatkan resiko terpapar penyakit - Banyak Penderita Penyakit menular yang belum ditemukan karena kurangnya kesadaran masyarakat akan kesehatannya - Adanya kelompok tertentu yang menolak program imunisasi - Gaya hidup di masyarakat dengan perilaku dan kondisi lingkungan sosial modernisasi yang meningkatkan resiko Penyakit tidak Menular yaitu merokok, konsumsi lakohol, aktifitas fisik kurang, diet tidak 	<ul style="list-style-type: none"> - Pemberian Penghargaan langsung penderita TB BTA(+/-) sembuh dan Pengawas Minum Obat) - Anggaran dan komitmen stakeholder untuk penyakit menular - Pelaksanaan program Imunisasi pada bayi dan anak sekolah

			<p>seimbang, dan polusi yang tinggi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Belum Optimalnya Surveilans Epidemiologi Penyakit Tidak menular 	
6.	Program Pencegahan dan pengendalian penyakit	Meningkatnya Kasus Penyakit Tidak Menular (Hipertensi, Deabetes Melitus, Jiwa)	<ul style="list-style-type: none"> - dan kegiatan deteksi dini faktor resiko PTM - Perbandingan penduduk yang tinggi dan ketersediaan nakes yang kurang sehingga dalam melaksanakan deteksi dini PTM tidak dapat dilaksanakan secara rutin - Kurangnya dukungan lintas sektor dalam upaya pencegahan dan pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa 	<ul style="list-style-type: none"> - Dukungan anggaran dalam pembiayaan pencegahan dan penanggulangan faktor resiko penyakit tidak menular - Adanya Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 2 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra DIY

Dalam melaksanakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, sebagai instansi teknis bidang kesehatan di Kota Yogyakarta, Renstra Dinas Kesehatan mengacu pada Renstra Kementerian Kesehatan dan Renstra Dinas Kesehatan Daerah istimewa Yogyakarta. Renstra Kementerian Kesehatan merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif dan memuat program-program pembangunan kesehatan yang akan dilaksanakan langsung oleh Kementerian Kesehatan maupun melalui peran aktif masyarakat untuk kurun waktu 2015 – 2019 dan memberikan penekanan pada pencapaian sasaran Prioritas Nasional, Standar pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan dan Sustainable development Goals (SDG's).

Penyusunan tujuan, sasaran dan kebijakan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta diharapkan dapat berkesinambungan dengan dengan kebijakan kesehatan di tingkat Pusat maupun di tingkat Daerah Istimewa Yogyakarta. Telaah Renstra Kementerian Kesehatan, Renstra Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Renstra Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta dapat diuraikan sebagai berikut:

3.3.1 Tujuan dan Sasaran

Tujuan Pembangunan Kesehatan dan Sasaran Strategis yang tertuang dalam rencana strategis Kementerian Kesehatan pada tahun 2015-2019 adalah :

A. Tujuan

1. Meningkatnya status kesehatan masyarakat;
2. Meningkatnya daya tanggap (responsiveness) dan perlindungan masyarakat terhadap resiko sosial dan financial di bidang kesehatan.

B. Sasaran Strategis

1. Meningkatnya Kesehatan Masyarakat
2. Meningkatnya Pengendalian Penyakit
3. Meningkatnya Akses dan Mutu Fasilitas Pelayanan Kesehatan
4. Meningkatnya akses,kemandirian, dan mutu sediaan farmasi dan alat kesehatan
5. Meningkatnya Jumlah, Jenis Kualitas dan Pemerataan Tenaga Kesehatan
6. Meningkatnya sinergitas antar Kementerian/Lembaga
7. Meningkatnya daya guna kemitraan dalam dan luar negeri
8. Meningkatnya integrasi perencanaan, bimbingan teknis dan pemantauan evaluasi
9. Meningkatnya efektivitas penelitian dan pengembangan kesehatan
10. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih

11. Meningkatnya Kompetensi dan kinerja aparatur Kementrian Kesehatan
12. Meningkatkan sistem informasi kesehatan integrasi

Sedangkan tujuan dan Sasaran Strategis dalam Renstra Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 - 2017 adalah sebagai berikut :

A. Tujuan

1. Meningkatnya Derajat Kesehatan masyarakat
2. Meningkatnya akuntabilitas pengelola program dan kegiatan SKPD

B. Sasaran Strategis

1. Terwujudnya perilaku sadar sehat
2. Terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu
3. Meningkatnya capaian pelaksanaan program pendukung sasaran Renstra SKPD

Berdasarkan hasil telaah permasalahan di Dinas Kesehatan kota Yogyakarta terhadap Renstra Kementrian Kesehatan tahun 2015 – 2019 dan Renstra Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta, terdapat beberapa faktor penghambat dan pendorong yang yang berpengaruh dalam permasalahan tersebut. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.6

Permasalahan Pelayanan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta berdasarkan Sasaran Renstra Kementrian Kesehatan

Sasaran Renstra Kementrian Kesehatan	Permasalahan Dinas Kesehatan Kota	Faktor	
		Pendukung	Penghambat
1. Meningkatnya Kesehatan Masyarakat			
Meningkatnya persentase persalinan di fasilitas kesehatan sebesar 85 %	Persentase Persalinan faskes di Kota Yogyakarta masih 99,97%	- Adanya kader pemantau ibu hamil - Akses ke pelayanan kesehatan mudah - Pelayanan ANC terpadu	Masih adanya persalinan di rumah disebabkan karena kehamilan yang tidak diinginkan
2. Meningkatnya Pengendalian penyakit			
a. Persentase kab/kota yang memenuhi kualitas kesehatan lingkungan sebesar 40%	- Terjadi kenaikan kasus penemuan TB,HIV	Anggaran dan komitmen stakeholder	Kesadaran masyarakat kurang Stigma masyarakat bagi penderita TB dan HIV
b. Penurunan kasus Penyakit yang dapat dicegah dengan Imunisasi PD3I tertentu sebesar 40%	- Masih Tingginya jumlah penderita DBD		
c. Kab/kota yang mampu melaksanakan kesiapsiagaan dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah 100%	-Munculnya Penyakit-penyakit emerging dan re-emerging		
d. Menurunnya prevalensi merokok pada usia > 18 sebesar 5,4 %			
4. Meningkatnya akses, kemandirian, dan mutu sediaan farmasi dan alat kesehatan			

a. Presentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas sebesar 90%	Ketersediaan obat tiap bulan berbeda	Adanya dukungan anggaran	Kendala teknis dalam pengadaan
b. Jumlah bahan baku obat, obat tradisional serta alat kesehatan yang diproduksi di dalam negeri sebanyak 35 jenis			
c. Persentase produk alat kesehatan dan PKRT di peredaran yang memenuhi syarat sebesar 83%			
5. Meningkatnya Jumlah, Jenis, Kualitas dan Pemerataan Tenaga kesehatan			
a. Jumlah Puskesmas minimal memiliki 5 jenis tenaga kesehatan sebanyak 5600 Puskesmas	Masih ada tenaga paramedis yang belum sesuai kriteria tenaga kesehatan sesuai dengan perundangan yang berlaku	Adanya kerjasama dengan perguruan tinggi kesehatan	Motivasi dari tenaga kesehatan untuk mengembangkan kompetensi masih kurang
b. Persentase RS kab/kota kelas C yang memiliki 4 dokter spesialis dasar dan 3 dokter spesialis penunjang sebesar 60 %			
c. Jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya sebanyak 56.910 orang			
6. Meningkatnya sinergitas antar Kementerian/ Lembaga			
a. Meningkatnya jumlah kementerian lain yang mendukung pembangunan kesehatan	Belum semua target dalam indikator SPM dapat tercapai	Adanya dukungan Anggaran	Pemahaman Definisi Operasional yang belum tersosialisasikan
b. Meningkatnya persentase kab / kota yang mendapat predikat baik dalam pelaksanaan SPM sebesar 80 %			

Tabel 3.7

Permasalahan Pelayanan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta

SASARAN RENSTRA DINAS KESEHATAN DIY	PERMASALAHAN OPD DINAS KESEHATAN KOTA YK TERKAIT DENGAN RENSTRA	FAKTOR	
		FAKTOR	PENGHAMBAT
1. Terwujudnya perilaku sadar sehat			
Presentase Rumah Tangga ber PHBS	Belum tercapainya target presentase Rumah Tangga ber PHBS	Dukungan anggaran dan Peran serta masyarakat	Kesadaran masyarakat untuk ber PHBS masih kurang
2. Terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu			
Presentase Fasilitas Kesehatan tingkat pertama terfasilitasi untuk Akreditasi	Belum semua Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama terfasilitasi akreditasi	Dukungan anggaran untuk FKTP milik pemerintah	Belum tersosialisasikan akreditasi untuk FKTP swasta
3. Meningkatnya capaian pelaksanaan proram pendukung sasaran rentra SKPD			
Persentase rata-rata hasil ketercapaian program dukungan sasaran SKPD	Belum semua target indikator program tercapai 100%	Adanya Dukungan anggaran yang mencukupi	Dukungan regulasi kebijakan kesehatan belum optimal Sistem Kesehatan Daerah belum optimal

Dari diatas dapat dilihat Indikator sasaran Rencana Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2012-2017, pada Indikator terwujudnya perilaku sadar sehat, terkait dengan perilaku masyarakat, dalam rencana strategi Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta di wadah dengan Indikator sasaran Cakupan Keluarga Sehat sedangkan pada Indikator sasaran terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu,

indikator yang digunakan hampir sama yaitu Prosentase Rumah Sakit dan Puskesmas yang terakreditasi.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kota Yogyakarta memiliki letak yang strategis bagi pembangunan diberbagai sektor, sehingga akan terjadi dinamisasi masyarakat baik dari dalam maupun luar wilayah. Kondisi demikian merupakan potensi besar terjadinya masalah-masalah kesehatan dimasa sekarang atau dimasa yang akan datang, sehingga diperlukan penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang unggul dan mampu mengatasi secara efektif dan efisien terhadap permasalahan kesehatan yang muncul di masyarakat. Dalam Tata Ruang Wilayah telah ditetapkan kebijakan pengembangan struktur ruang dan kebijakan pola ruang. RTRW ini dijadikan acuan utama oleh Dinas Kesehatan dalam menetapkan lokasi pembangunan sarana kesehatan sehingga ketimpangan dalam pelayanan kesehatan dapat berkurang. Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta melalui Upaya Promotif, Preventif, Kuratif dan Rehabilitatif diharapkan mampu melindungi dan mengembangkan kesehatan masyarakat Kota Yogyakarta. Selanjutnya perumusan rencana pembangunan kesehatan perlu melibatkan berbagai sektor, sehingga kuantitas dan kualitas koordinasi juga perlu ditingkatkan. Elemen penting lainnya dalam perencanaan berwawasan lingkungan adalah ketersediaan data dan informasi yang lengkap dan akurat tentang kondisi sistem data dan informasi.

3.4.1 Telaahan Tata Ruang dan Wilayah

Kota Yogyakarta memiliki ciri khas perkotaan dengan penggunaan lahan yang didominasi oleh perumahan, yaitu seluas 2.101,79 hektar. Sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Kota Yogyakarta merupakan pusat kegiatan ekonomi, terutama jasa pelayanan. Potensi pengembangan wilayah kota Yogyakarta berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta meliputi :

1. Pengembangan Struktur Ruang Kota dan Sistem Pusat Pelayanan Kota
2. Pengembangan Sistem Jaringan Transportasi
3. Pengembangan Sistem jaringan jalan
4. Pengembangan kawasan

Terkait dengan pengembangan wilayah kota Yogyakarta berdasarkan Rencana tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta tersebut, pengembangan pembangunan bidang kesehatan diantaranya adalah dengan pengembangan system pengelolaan air limbah, pengembangan jaringan air bersih, dan pengembangan kawasan peruntukan fasilitas umum termasuk fasilitas kesehatan. Hasil telaah Struktur Ruang dan Pola Ruang terhadap Pelayanan Kesehatan di Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.8
Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah

Rencana Struktur Ruang	Struktur Ruang Saat ini	Indikasi Program Pemanfaatan Struktur Ruang pada periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan Dinas Kesehatan	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan Dinas Kesehatan
Lokasi fasilitas kesehatan sesuai dengan pemanfaatan tata ruang wilayah kota	Lokasi Faskes yang berdekatan dengan persebaran yang tidak merata	Pengajuan ijin pendirian harus sudah mendapat rekomendasi dari Instansi terkait dan memperhatikan hasil study kelayakan	pelayanan kesehatan dapat tertata sesuai dengan kebutuhan masyarakat di wilayahnya	Penataan, pemerataan fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan pelayanan di masyarakat

Tabel 3.9
Hasil Telaahan Pola Ruang

Rencana Pola Ruang	Pola Ruang Saat ini	Indikasi Program Pemanfaatan Pola Ruang pada periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan Dinas Kesehatan	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan Kesehatan Kota Yogyakarta
Kesesuaian Kemanfaatan Pola Ruang di Bidang kesehatan	Ketidaksesuaian Pemanfaatan pola Ruang sesuai dengan fungsinya	Pengajuan pemanfaatan pola ruang diajukan sebelum pembangunan	Terjaganya kesesuaian fungsi ruang publik dalam pelayanan kesehatan	Pembangunan faskes disesuaikan zonasi yang diatur dengan Peraturan Perundang-perundangan

Tabel 3.10
Permasalahan Pelayanan Dinas Kesehatan berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan pendorong Keberhasilan Penanganannya

Rencana Tata Ruang Wilayah terkait tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan	Permasalahan Pelayanan Dinas Kesehatan	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
Rencana tata ruang wilayah memberikan arahan bagi pola penyebaran penduduk di wilayah Kota Yogyakarta, yang mempengaruhi pola	Belum meratanya Fasilitas Pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	Belum terbentuknya regulasi penataan kawasan khusus fasilitas kesehatan	Adanya Peraturan Perundangan yang mengatur rujukan berjenjang

penyebaran penyakit			
---------------------	--	--	--

3.4.2 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup yang Strategis

Berdasarkan telaah Kajian Lingkungan Hidup yang Strategis yang terkait dengan permasalahan pelayanan kesehatan di Kota Yogyakarta beserta faktor penghambat dan pendorong dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.11

Permasalahan Pelayanan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta berdasarkan Analisis KLHS beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

Hasil KLHS terkait tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta	Permasalahan Pelayanan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
Meningkatkan pelayanan dan derajat kesehatan yang bermutu dan mendorong partisipasi masyarakat dalam penciptaan lingkungan sehat dan nyaman melalui revitalisasi sarana dan prasarana kesehatan terkait dengan pengelolaan IPAL di Puskesmas.	Limbah B3 (Bahan Beracun dan Berbahaya) dari unit operasional di Puskesmas belum terkelola dengan baik	Lahan Puskesmas yang sempit	Dukungan Anggaran dari APBD dan APBN
	Belum Semua Rumah Sakit mempunyai IPAL dan Tempat Penampungan Sementara (TPS) Limbah B3, untuk pengelolaan limbah Faskes bekerjasama dengan pihak swasta serta pengambilan limbah tidak setiap hari (lebih dari 1 minggu) sehingga menimbulkan penumpukan yang mengganggu kesehatan (belum sesuai dengan Kepmenkes 1204 Tahun 2009 bahwa pengambilan limbah B 3 Maksimal 2x24 Jam)	Pengolahan Limbah berada di Luar daerah Yogyakarta	Adanya Pergub tentang pengelolaan Limbah
Peningkatan air Bersih dan Jamban keluarga	Masih adanya perilaku masyarakat yang Buang Air Besar Sembarangan (BABS)	Kurangnya kesadaran masyarakat untuk ber Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Tersedianya dukungan anggaran

Dengan adanya telaah kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) maka dalam mempertimbangkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta perlu mengembangkan pelayanan kesehatan yang optimal dengan menciptakan perilaku dan lingkungan yang sehat dengan menumbuhkan kesadaran masyarakat yang mandiri dalam memelihara kesehatannya sehingga masyarakat di Kota Yogyakarta menjadi manusia yang sehat, mandiri dan produktif.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Guna meningkatkan fungsi dan kinerja Dinas Kesehatan, maka diperlukan penentuan isu-isu strategis yang diharapkan menjadi landasan untuk menyusun kebijakan perencanaan. Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya.

Berdasarkan analisa permasalahan kesehatan dan situasi kesehatan di Kota Yogyakarta, Telaah Visi Misi Kepala Daerah, Telaah Rencana strategis Kementerian Kesehatan RI, Telaah Kajian Tata Ruang Wilayah dan Lingkungan Strategis, serta analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal yaitu peluang, ancaman, kekuatan dan kelemahan, maka ditentukan Isu-isu strategis yang berkembang saat ini serta prediksi situasi dan kondisi lima tahun ke depan yang diharapkan Dinas Kesehatan dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Masih adanya kematian ibu, bayi dan balita;
2. Masih ada balita gizi buruk, kurang dan stunting;
3. Masih adanya peningkatan penyakit menular dan tidak menular;
4. Masih rendahnya Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Puskesmas ;
5. Belum semua SDM kesehatan memenuhi standar kompetensi yang diharapkan;
6. Masih rendahnya kelurahan Siaga Aktif Mandiri.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Penentuan Tujuan dan Sasaran Dinas Kesehatan kota Yogyakarta mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Yogyakarta tahun 2017 – 2022, Renstra Kementerian Kesehatan dan Renstra Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta tahun 2017-2022 sesuai Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakarta yang memuat visi, misi tujuan dan sasaran sebagai berikut;

4.1 VISI DAN MISI

A. Visi

Meneguhkan Kota Yogyakarta Sebagai Kota Nyaman Huni dan Pusat Pelayanan Jasa Yang Berdaya Saing Kuat Untuk Keberdayaan Masyarakat Dengan Berpijak Pada Nilai Keistimewaan.

B. Misi

1. Meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan kemasyarakatan
2. Memperkuat ekonomi kerakyatan dan daya saing Kota Yogyakarta
3. Memperkuat moral, etika dan budaya masyarakat Kota Yogyakarta
4. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, sosial dan budaya
5. Memperkuat tata kota dan kelestarian lingkungan
6. Membangun sarana prasarana publik dan permukiman
7. Meningkatkan tatakelola pemerintah yang baik dan bersih

Misi yang terkait dengan bidang kesehatan adalah Misi keempat yaitu “Meningkatkan kualitas Pendidikan, Kesehatan, Sosial dan Budaya”. Keterkaitan Renstra Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta dengan RPJMD Kota Yogyakarta terdapat pada sasaran RPJMD, yaitu Harapan hidup masyarakat meningkat yang sesuai dengan tujuan Renstra Dinas Kesehatan yaitu Meningkatkan Derajat Kesehatan.

4.2 TUJUAN DAN SASARAN

A. Tujuan Daerah

Tujuan yang berkaitan dengan Misi ke 4 , Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, sosial dan Budaya Tujuan daerah yang berkaitan dengan bidang kesehatan meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, dengan indikator tujuan ; Indeks Pembangunan Manusia.

B. Sasaran Daerah

Sasaran Daerah yang berkaitan dengan bidang kesehatan adalah Harapan Hidup meningkat, dengan Indikator sasaran daerah ; angka harapan hidup.

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakarta

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Tahun Ke-					
				(2017)	(2018)	(2019)	(2020)	(2021)	(2022)
1.	Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan	Harapan Hidup masyarakat meningkat	Angka Harapan hidup	74,30 th	74,32 th	74,34 th	74,36 Th	74,38 th	74,40 th

4.3. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Adapun tujuan dan sasaran yang akan dicapai Dinas Kesehatan Kota dalam tahap 5 (lima) tahun kedepan adalah sebagai berikut :

4.3.1. Tujuan

Sebagai penjabaran Visi dan Misi RPJMD Kota Yogyakarta, maka tujuan yang ditetapkan Dinas Kesehatan sampai tahun 2022 adalah " Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat". Dengan Indikator tujuan :

1. Jumlah Kematian Ibu
2. Angka Kematian Bayi
3. Prevalensi Balita Gizi Buruk dan Kurang
4. Prevalensi Stunting

4.3.2. Sasaran

Adapun Sasaran yang akan dicapai Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta dalam 5 (lima) tahun kedepan adalah :

A. Mutu Fasilitas Kesehatan Meningkatkan

Indikator Sasaran : Persentase Rumah Sakit dan Puskesmas yang terakreditasi

B. Keluarga Sehat Meningkatkan

Indikator Sasaran : Cakupan keluarga dengan indikator keluarga sehat

Tabel 4.2
 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun Ke-					
				2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Meningkatkan Derajat Kesehatan		Jumlah Kematian Ibu	4	4	4	4	4	4
			Angka Kematian Bayi	7.52	7.19	7.13	7.06	6.97	6.88
			Prevalensi Balita gizi buruk dan kurang	8.81	8.65	8.42	8.19	7.97	7.82
			Prevalensi stunting	13	12.8	12.6	12.4	12.2	12
		Mutu Fasilitas Kesehatan Meningkat	Presentase Rumah Sakit dan Puskesmas yang terakreditasi	61,54 %	69,23 %	71,79 %	74,36 %	76,92 %	79,49 %
		Keluarga sehat meningkat	Cakupan Keluarga dengan indikator keluarga sehat	40%	42%	45%	47%	50%	52%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 STRATEGI

Strategi organisasi dalam pencapaian tujuan dan sasaran merupakan rencana menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan secara operasional dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya organisasi. Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan kota Yogyakarta, strategi yang dilaksanakan adalah :

1. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar
2. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan
3. Peningkatan Upaya Pelayanan Kesehatan
4. Peningkatan Regulasi dan Pengembangan Sumber Daya Kesehatan
5. Peningkatan Kesehatan Masyarakat
6. Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

5.2 ARAH KEBIJAKAN

Kebijakan Dinas Kesehatan merupakan arah / tindakan berupa ketentuan-ketentuan, peraturan yang dijadikan petunjuk pelaksanaan bagi setiap kegiatan yang sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai dengan akhir tahun 2022. Kebijakan yang akan ditempuh dalam Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, dirumuskan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kepuasan layanan kesehatan puskesmas
2. Meningkatkan pelayanan kesehatan rumah sakit pratama
3. Meningkatkan kepastian kepemilikan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Bagi warga Kota Yogyakarta.
4. Meningkatkan penduduk miskin mendapatkan jaminan kesehatan
5. Meningkatkan fasilitas kesehatan terakreditasi milik pemerintah
6. Meningkatkan fasilitas kesehatan tingkat pertama milik pemerintah dalam memenuhi standar
7. Meningkatkan pendampingan rumah sakit
8. Mengoptimalkan cakupan penanganan kegawatdaruratan kesehatan
9. Mengoptimalkan pemeriksaan kesehatan jemaah haji
10. Menambahkan layanan puskesmas 24 jam dengan layanan rawat inap persalinan
11. Meningkatkan fasilitas kesehatan sesuai standar
12. Meningkatkan tenaga kesehatan yang berijin
13. Meningkatkan sertifikasi hotel, restoran dan kolam renang terakreditasi laik sehat

14. Meningkatkan tenaga kesehatan sesuai kompetensi
15. Meningkatkan tenaga penyehat tradisional yang terdaftar
16. Meningkatkan ketersediaan obat, vaksin dan alkes
17. Mengendalikan penggunaan obat rasional di puskesmas
18. Mengoptimalkan pelayanan antenatal sesuai standar untuk ibu hamil
19. Mengoptimalkan pelayanan persalinan sesuai standar
20. Mengoptimalkan pelayanan sesuai standar bagi bayi yang baru lahir
21. Mengoptimalkan pelayanan kesehatan sesuai standar untuk balita
22. Mengoptimalkan anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar
23. Meningkatkan penduduk usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar
24. Meningkatkan jumlah wilayah dalam melaksanakan KTR
25. Mengoptimalkan cakupan kelurahan siaga aktif (Mandiri)
26. Meningkatkan Rumah, tempat-tempat umum (TTU), tempat pengelolaan makanan (TPM) dalam memenuhi syarat kesehatan
27. Meningkatkan kualitas air minum yang memenuhi syarat kesehatan
28. Meningkatkan institusi yang melaksanakan UKK
29. Mengoptimalkan pelayanan TB sesuai standar bagi penderita TB
30. Mengoptimalkan layanan pemeriksaan bagi orang yang berisiko terinfeksi HIV AIDS
31. Mengoptimalkan cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD
32. Meningkatkan cakupan desa/kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI)
33. Meningkatkan penduduk kota usia 15 s/d 59 tahun mendapat skrining kesehatan sesuai standar
34. Meningkatkan pelayanan kesehatan bagi penderita hipertensi sesuai standar
35. Meningkatkan pelayanan kesehatan bagi penderita diabetes mellitus sesuai standar
36. Meningkatkan pelayanan kesehatan bagi penderita gangguan jiwa (ODGJ) berat sesuai standar
37. Mengoptimalkan cakupan kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam.

Tabel 5.1

Sasaran dan Strategi Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta

No	Sasaran Kota	Indikator Sasaran Kota	Strategi
1.	Harapan Hidup Masyarakat meningkat	Angka Harapan hidup	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar
			Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan
			Peningkatan Upaya pelayanan kesehatan
			Peningkatan Regulasi dan pengembangan Sumber daya Kesehatan
			Peningkatan kesehatan Masyarakat
			Peningkatan Pencegahan dan pengendalian Penyakit

Tabel 5.2

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta

VISI : Mewujudkan Pelayanan Kesehatan yang Berintegritas dengan Berinovasi menuju Masyarakat Sehat dan Mandiri			
MISI : Meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu dan merata serta terjangkau			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Mutu Fasilitas Kesehatan Meningkat	Peningkatan pelayanan kesehatan dasar	Meningkatkan kepuasan layanan kesehatan puskesmas
		Peningkatan pelayanan kesehatan rujukan	Meningkatkan pelayanan kesehatan rumah sakit pratama
		Peningkatan upaya pelayanan kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan penduduk miskin mendapatkan jaminan kesehatan 2. Meningkatkan penduduk miskin mendapatkan jaminan kesehatan 3. Meningkatkan fasilitas kesehatan terakreditasi milik pemerintah 4. Meningkatkan fasilitas kesehatan tingkat pertama milik pemerintah dalam memenuhi standar 5. Meningkatkan pendampingan rumah sakit 6. Mengoptimalkan pemeriksaan kesehatan jemaah haji 7. Menambahkan layanan puskesmas 24 jam dengan layanan rawat inap persalinan
		Peningkatan regulasi dan pengembangan sumber daya kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan fasilitas kesehatan sesuai standar 2. Meningkatkan tenaga kesehatan yang berijin 3. Meningkatkan sertifikasi hotel, restoran dan kolam renang terakreditasi laik sehat 4. Meningkatkan tenaga kesehatan sesuai kompetensi

		<ol style="list-style-type: none"> 5. Meningkatkan tenaga penyehat tradisional yang terdaftar 6. Meningkatkan ketersediaan obat, vaksin dan alkes 7. Mengendalikan penggunaan obat rasional di puskesmas
Keluarga Sehat Meningkat	Peningkatan kesehatan masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoptimalkan pelayanan antenatal sesuai standar untuk ibu hamil 2. Mengoptimalkan pelayanan persalinan sesuai standar 3. Mengoptimalkan pelayanan sesuai standar bagi bayi yang baru lahir 4. Mengoptimalkan pelayanan kesehatan sesuai standar untuk balita 5. Mengoptimalkan anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar 6. Meningkatkan penduduk usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar 7. Meningkatkan jumlah wilayah dalam melaksanakan KTR 8. Mengoptimalkan cakupan kelurahan siaga aktif (Mandiri) 9. Meningkatkan rumah, tempat-tempat umum (TTU), tempat pengelolaan makanan (TPM) dalam memenuhi syarat kesehatan 10. Meningkatkan institusi yang melaksanakan UKK
	Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoptimalkan pelayanan TB sesuai standar bagi penderita TB 2. Mengoptimalkan layanan pemeriksaan bagi orang yang berisiko terinfeksi HIV AIDS 3. Meningkatkan cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) 4. Meningkatkan cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) 5. Meningkatkan pelayanan kesehatan bagi penderita hipertensi sesuai standar 6. Meningkatkan pelayanan kesehatan bagi penderita diabetes melitus sesuai standar 7. Meningkatkan pelayanan

		<p>kesehatan bagi penderita gangguan jiwa (ODGJ) berat sesuai standar</p> <p>8. Meningkatkan pelayanan kesehatan bagi penderita gangguan jiwa (ODGJ) berat sesuai standar</p> <p>9. Mengoptimalkan cakupan kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam</p>
--	--	---

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dengan mengacu pada tujuan, sasaran, dan strategi untuk mewujudkan sasaran organisasi dengan indikator sasaran sebagai tolok ukur keberhasilannya, maka Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta menetapkan Rencana Program, Kegiatan Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif untuk pelaksanaan program Kesehatan kurun waktu 2017 – 2022 sebagai berikut :

6.1 Rencana Program

1. Program Pelayanan Kesehatan Dasar
2. Program Pelayanan Kesehatan Rujukan
3. Program Upaya Pelayanan Kesehatan
4. Program Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat
5. Program Regulasi dan Pengembangan Sumber Daya Kesehatan
6. Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
7. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
8. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
9. Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

6.2 Rencana Kegiatan

1. Kegiatan Upaya Kesehatan perseorangan Puskesmas
2. Kegiatan Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas
3. Kegiatan Upaya Pelayanan Kesehatan Rujukan RS "Pratama"
4. Kegiatan Pendukung Pelayanan Kesehatan Rujukan RS "Pratama"
5. Kegiatan Pelayanan Kesehatan Primer dan Rujukan
6. Kegiatan Pelayanan Kesehatan Khusus
7. Kegiatan Pengelolaan Penjaminan dan Peningkatan Mutu Kesehatan
8. Kegiatan Pengelolaan Operasional Public Safety Center 119
9. Kegiatan Pembinaan Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat
10. Kegiatan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat di bidang Kesehatan
11. Kegiatan Penyehatan Lingkungan dan Kesehatan Kerja
12. Kegiatan Pembinaan Regulasi Sarana Prasarana dan Sertifikasi Bidang Kesehatan
13. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia
14. Kegiatan Pengelolaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
15. Kegiatan Pengelolaan Surveilans dan Sistem Informasi Kesehatan
16. Kegiatan Pencegahan, Pengendalian Penyakit Menular dan Imunisasi
17. Kegiatan Pencegahan, Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa

18. Kegiatan Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
19. Kegiatan Penyediaan jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor
20. Kegiatan Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran
21. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/ Bangunan Kantor
22. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
23. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan
Capaian Kinerja SKPD

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendaan Dinas Kesehatan
Kota Yogyakarta

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data capaian pada Tahun Awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022				
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Mutu Fasilitas Kesehatan Meningkat	1.	Program Pelayanan Kesehatan Dasar	Indeks kepuasan layanan kesehatan puskesmas	77	77	44,977,616,015	78	42,437,902,806	79	43,711,039,890	80	45,022,371,087	80.5	46,373,042,219	81	47,764,233,486	81	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
		1.1	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Danurejan I	Operasional Pelayanan Kesehatan Perorangan Puskesmas DN-I		12 bulan	1,023,783,174	12 bulan	987,805,313	12 bulan	1,017,439,472	12 bulan	1,047,962,657	12 bulan	1,079,401,536	12 bulan	1,111,783,582	12 bulan		Danurejan (Tegal panggung)
		1.2	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Danurejan II	Operasional Pelayanan Kesehatan Perorangan Puskesmas DN-II		12 bulan	737,347,598	12 bulan	664,802,834	12 bulan	684,746,919	12 bulan	705,289,327	12 bulan	726,448,006	12 bulan	748,241,447	12 bulan		Danurejan (Bausasran, Suryatmajan)
		1.3	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Gedongtengen	Operasional Pelayanan Kesehatan Perorangan Puskesmas GT		12 bulan	1,569,031,482	12 bulan	1,338,032,065	12 bulan	1,378,173,027	12 bulan	1,419,518,218	12 bulan	1,462,103,764	12 bulan	1,505,966,877	12 bulan		Gedongtengen (Sosromenduran, Pringgokusuman)
		1.4	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Gondokusuman I	Operasional Pelayanan Kesehatan Perorangan Puskesmas GK-I		12 bulan	1,462,864,964	12 bulan	1,455,975,747	12 bulan	1,499,655,019	12 bulan	1,544,644,670	12 bulan	1,590,984,010	12 bulan	1,638,713,530	12 bulan		Gondokusuman (Klitren, Demangan, Baciro)
		1.5	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Gondokusuman	Operasional Pelayanan Kesehatan Perorangan Puskesmas GK-II		12 bulan	881,726,136	12 bulan	873,312,514	12 bulan	899,511,889	12 bulan	926,497,246	12 bulan	954,292,163	12 bulan	982,920,928	12 bulan		Gondokusuman (Terban, Kolabaru)

	an II																	
1.6	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Gondomana	Operasional Pelayanan Kesehatan Perorangan Puskesmas GM		12 bulan	982,881,224	12 bulan	967,482,122	12 bulan	996,506,586	12 bulan	1,026,401,783	12 bulan	1,057,193,837	12 bulan	1,088,909,652	12 bulan		Gondomana (Ngupasan, Prawirodirjan)
1.7	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Jetis	Operasional Pelayanan Kesehatan Perorangan Puskesmas JT		12 bulan	2,652,446,340	12 bulan	1,901,161,144	12 bulan	1,958,195,978	12 bulan	2,016,941,858	12 bulan	2,077,450,113	12 bulan	2,139,773,617	12 bulan		Jetis (Bumijo, Gowongan, Cokrodiningratan)
1.8	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Kotagede I	Operasional Pelayanan Kesehatan Perorangan Puskesmas KG-I		12 bulan	1,685,836,361	12 bulan	1,649,129,136	12 bulan	1,698,603,010	12 bulan	1,749,561,100	12 bulan	1,802,047,933	12 bulan	1,856,109,371	12 bulan		Kotagede (Prenggan, Purbayan)
1.9	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Kotagede II	Operasional Pelayanan Kesehatan Perorangan Puskesmas KG-II		12 bulan	965,573,412	12 bulan	996,128,111	12 bulan	1,026,011,954	12 bulan	1,056,792,313	12 bulan	1,088,496,082	12 bulan	1,121,150,965	12 bulan		Kotagede (Rejowinangun)
1.10	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Kraton	Operasional Pelayanan Kesehatan Perorangan Puskesmas KT		12 bulan	1,136,817,481	12 bulan	1,165,443,748	12 bulan	1,200,407,060	12 bulan	1,236,419,272	12 bulan	1,273,511,850	12 bulan	1,311,717,206	12 bulan		Kraton (Panembahan, Kadipaten, Patehan)
1.11	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Mantrijeron	Operasional Pelayanan Kesehatan Perorangan Puskesmas MJ		12 bulan	2,374,166,689	12 bulan	2,025,050,000	12 bulan	2,085,801,500	12 bulan	2,148,375,545	12 bulan	2,212,826,811	12 bulan	2,279,211,616	12 bulan		Mantrijeron (Suryodiningrat, Gedongkiwo, Mantrijeron)
1.12	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Mergangsan	Operasional Pelayanan Kesehatan Perorangan Puskesmas MG		12 bulan	2,496,755,874	12 bulan	1,989,925,897	12 bulan	2,049,623,674	12 bulan	2,111,112,384	12 bulan	2,174,445,756	12 bulan	2,239,679,128	12 bulan		Mergangsan (Brontokusuman, Keparakan, Wirogunan)
1.13	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Ngampilan	Operasional Pelayanan Kesehatan Perorangan Puskesmas NG		12 bulan	946,924,765	12 bulan	896,317,477	12 bulan	923,207,001	12 bulan	950,903,211	12 bulan	979,430,308	12 bulan	1,008,813,217	12 bulan		Ngampilan (Notoprajan, Ngampilan)
1.14	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Pakualaman	Operasional Pelayanan Kesehatan Perorangan Puskesmas PA		12 bulan	909,465,936	12 bulan	845,546,594	12 bulan	870,912,992	12 bulan	897,040,382	12 bulan	923,951,593	12 bulan	951,670,141	12 bulan		Pakualaman (Purwokinant, Gunungketur)
1.15	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Tegalrejo	Operasional Pelayanan Kesehatan Perorangan Puskesmas TR		12 bulan	2,948,197,466	12 bulan	2,811,974,000	12 bulan	2,896,333,220	12 bulan	2,983,223,217	12 bulan	3,072,719,913	12 bulan	3,164,901,510	12 bulan		Tegalrejo (Kricak, Karangwaru, Tegalrejo, Bener)

1.1 6	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Umbulharjo I	Operasional Pelayanan Kesehatan Perorangan Puskesmas UH-I		12 bulan	2,815,008,908	12 bulan	2,512,452,000	12 bulan	2,587,825,560	12 bulan	2,665,460,327	12 bulan	2,745,424,137	12 bulan	2,827,786,861	12 bulan		Umbulharjo (Warungboto, Pandeyan, Giwangan, Sorosutan)
1.1 7	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Umbulharjo II	Operasional Pelayanan Kesehatan Perorangan Puskesmas UH-II		12 bulan	1,431,813,955	12 bulan	1,459,185,000	12 bulan	1,502,960,550	12 bulan	1,548,049,367	12 bulan	1,594,490,847	12 bulan	1,642,325,573	12 bulan		Umbulharjo (Semaki, Tahunan, Muja muju)
1.1 8	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Wirobrajan	Operasional Pelayanan Kesehatan Perorangan Puskesmas WB		12 bulan	1,930,054,716	12 bulan	1,777,061,566	12 bulan	1,830,373,413	12 bulan	1,885,284,615	12 bulan	1,941,843,154	12 bulan	2,000,098,448	12 bulan		Wirobrajan (Pakuncen, Wirobrajan, Patangpuluh an)
1.1 9	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Danurejan I	laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas DN- I		1 dokumen	1,043,893,656	1 dokumen	1,052,121,150	1 dokumen	1,083,684,785	1 dokumen	1,116,195,328	1 dokumen	1,149,681,188	1 dokumen	1,184,171,624	1 dokumen		Danurejan (Tegal panggung)
		laporan penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen		
		laporan penyelenggaraan upaya pelayanan gizi dan kesehatan keluarga		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen		
		laporan penyelenggaraan upaya pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen		
		laporan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen		
1.2' 0	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Danurejan II	laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas DN- II		1 dokumen	601,558,742	1 dokumen	740,009,497	1 dokumen	762,209,782	1 dokumen	785,076,075	1 dokumen	808,628,358	1 dokumen	832,887,208	1 dokumen		Danurejan (Bausasran, Suryatmajan)
		laporan penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen		
		laporan penyelenggaraan upaya pelayanan gizi dan kesehatan keluarga		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen		

		laporan penyelenggaraan upaya pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen		
		laporan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen		
1.2	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Gedongtengen	laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas GT		1 dokumen	1,025,296,670	1 dokumen	986,546,720	1 dokumen	1,016,143,122	1 dokumen	1,046,627,415	1 dokumen	1,078,026,238	1 dokumen	1,110,367,025	1 dokumen		Gedongtengen (Sosromenduran, Pringgokusuman)
1		laporan penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen		
		laporan penyelenggaraan upaya pelayanan gizi dan kesehatan keluarga		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen		
		laporan penyelenggaraan upaya pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen		
		laporan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen		
1.2	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Gondokusuman I	laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas GK-I		1 dokumen	820,184,575	1 dokumen	860,973,000	1 dokumen	886,802,190	1 dokumen	913,406,256	1 dokumen	940,808,443	1 dokumen	969,032,697	1 dokumen		Gondokusuman (Klitren, Demangan, Baciro)
2		laporan penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen		
		laporan penyelenggaraan upaya pelayanan gizi dan kesehatan keluarga		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen		

		laporan penyelenggaraan upaya pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen		
		laporan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen		
1.2	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Gondokusuman II	laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas GK-II		1 dokumen	1,381,854,157	1 dokumen	1,250,062,064	1 dokumen	1,287,563,926	1 dokumen	1,326,190,844	1 dokumen	1,365,976,569	1 dokumen	1,406,955,866	1 dokumen		Gondokusuman (Terban, Kotabaru)
3		laporan penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen		
		laporan penyelenggaraan upaya pelayanan gizi dan kesehatan keluarga		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen		
		laporan penyelenggaraan upaya pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen		
		laporan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen		
1.2	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Gondomanaan	laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas GM		1 dokumen	745,732,579	1 dokumen	698,588,900	1 dokumen	719,546,567	1 dokumen	741,132,964	1 dokumen	763,366,953	1 dokumen	786,267,962	1 dokumen		Gondomanaan (Ngupasan, Prawirodirjan)
4		laporan penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen		
		laporan penyelenggaraan upaya pelayanan gizi dan kesehatan keluarga		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen		
		laporan penyelenggaraan upaya pemberdayaan		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen		

		masyarakat dan promosi kesehatan																
		laporan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen			
1.25	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Jetis	laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas JT	1 dokumen	1,171,760,923	1 dokumen	1,084,114,453	1 dokumen	1,116,637,887	1 dokumen	1,150,137,023	1 dokumen	1,184,641,134	1 dokumen	1,220,180,368	1 dokumen			Jetis (Bumijo, Gowongan, Cokrodingratan)
		laporan penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen			
		laporan penyelenggaraan upaya pelayanan gizi dan kesehatan keluarga	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen			
		laporan penyelenggaraan upaya pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen			
		laporan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen			
1.26	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Kotagede I	laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas KG-I	1 dokumen	420,903,789	1 dokumen	423,136,160	1 dokumen	435,830,245	1 dokumen	448,905,152	1 dokumen	462,372,307	1 dokumen	476,243,476	1 dokumen			Kotagede (Prenggan, Purbayan)
		laporan penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen			
		laporan penyelenggaraan upaya pelayanan gizi dan kesehatan keluarga	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen			
		laporan penyelenggaraan upaya pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen			

		laporan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen		
1.27	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Kotagede II	laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas KG-II		1 dokumen	746,063,750	1 dokumen	716,062,731	1 dokumen	737,544,613	1 dokumen	759,670,951	1 dokumen	782,461,080	1 dokumen	805,934,912	1 dokumen		Kotagede (Rejowinangun)
		laporan penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen		
		laporan penyelenggaraan upaya pelayanan gizi dan kesehatan keluarga		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen		
		laporan penyelenggaraan upaya pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen		
		laporan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen		
1.28	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Kraton	laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas KT		1 dokumen	1,005,915,550	1 dokumen	799,712,850	1 dokumen	823,704,236	1 dokumen	848,415,363	1 dokumen	873,867,823	1 dokumen	900,083,858	1 dokumen		Kraton (Panembahan, Kadipaten, Patehan)
		laporan penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen		
		laporan penyelenggaraan upaya pelayanan gizi dan kesehatan keluarga		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen		
		laporan penyelenggaraan upaya pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen		
		laporan pengendalian penyakit dan penyehatan		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen		

		lingkungan																
1.2 9	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Mantrijeron	Jumlah laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas MJ		1 dokumen	982,766,000	1 dokumen	1,616,479,500	1 dokumen	1,664,973,885	1 dokumen	1,714,923,102	1 dokumen	1,766,370,795	1 dokumen	1,819,361,918	1 dokumen		Mantrijeron (Suryodiningratan, Gedongkiwo, Mantrijeron)
		laporan penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen		
		laporan penyelenggaraan upaya pelayanan gizi dan kesehatan keluarga		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen		
		laporan penyelenggaraan upaya pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen		
		laporan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen		
1.3	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Mergangsan	laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas MG		1 dokumen	930,691,852	1 dokumen	1,322,574,880	1 dokumen	1,362,252,126	1 dokumen	1,403,119,690	1 dokumen	1,445,213,281	1 dokumen	1,488,569,679	1 dokumen		Mergangsan (Brontokusuman, Keparakan, Wirogunan)
		laporan penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen		
		laporan penyelenggaraan upaya pelayanan gizi dan kesehatan keluarga		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen		
		laporan penyelenggaraan upaya pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen		
		laporan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen		

1.3 1	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Ngampilan	laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas NG	1 dokumen	1,267,701,600	1 dokumen	942,656,448	1 dokumen	970,936,141	1 dokumen	1,000,064,226	1 dokumen	1,030,066,152	1 dokumen	1,060,968,137	1 dokumen	Ngampilan (Notoprajan, Ngampilan)	
		laporan penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen		
		laporan penyelenggaraan upaya pelayanan gizi dan kesehatan keluarga	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen		
		laporan penyelenggaraan upaya pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen		
		laporan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen		
1.3 2	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Pakualaman	laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas PA	1 dokumen	915,512,326	1 dokumen	611,149,517	1 dokumen	629,484,003	1 dokumen	648,368,523	1 dokumen	667,819,578	1 dokumen	687,854,166	1 dokumen	Pakualaman (Purwokinanti, Gunungketur)	
		laporan penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen		
		laporan penyelenggaraan upaya pelayanan gizi dan kesehatan keluarga	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen		
		laporan penyelenggaraan upaya pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen		
		laporan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen		

1.3 3	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Tegalrejo	laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas TR	1 dokumen	569,027,850	1 dokumen	786,813,100	1 dokumen	810,417,493	1 dokumen	834,730,018	1 dokumen	859,771,918	1 dokumen	885,565,076	1 dokumen	Tegalrejo (Kricak, Karangwaru, Tegalrejo, Bener)	
		laporan penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen		
		laporan penyelenggaraan upaya pelayanan gizi dan kesehatan keluarga	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen		
		laporan penyelenggaraan upaya pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen		
		laporan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen		
1.3 4	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Umbulharjo I	laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas UH-I	1 dokumen	723,249,800	1 dokumen	573,158,000	1 dokumen	590,352,740	1 dokumen	608,063,322	1 dokumen	626,305,222	1 dokumen	645,094,379	1 dokumen	Umbulharjo (Warungboto, Pandeyan, Giwangan, Sorosutan)	
		laporan penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen		
		laporan penyelenggaraan upaya pelayanan gizi dan kesehatan keluarga	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen		
		laporan penyelenggaraan upaya pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen		
		laporan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen		

1.3 5	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Umbulharjo II	laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas UH-II	1 dokumen	880,448,015	1 dokumen	754,117,300	1 dokumen	776,740,819	1 dokumen	800,043,044	1 dokumen	824,044,335	1 dokumen	848,765,665	1 dokumen	Umbulharjo (Semaki, Tahunan, Muja muju)	
		laporan penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen		
		laporan penyelenggaraan upaya pelayanan gizi dan kesehatan keluarga	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen		
		laporan penyelenggaraan upaya pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen		
		laporan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen		
1.3 6	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Wirobrajan	laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas WB	1 dokumen	794,357,700	1 dokumen	902,841,268	1 dokumen	929,926,506	1 dokumen	957,824,301	1 dokumen	986,559,030	1 dokumen	1,016,155,801	1 dokumen	Wirobrajan (Pakuncen, Wirobrajan, Patangpuluh an)	
		laporan penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen		
		laporan penyelenggaraan upaya pelayanan gizi dan kesehatan keluarga	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen		
		laporan penyelenggaraan upaya pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen		
		laporan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen		

2	Program Pelayanan Kesehatan Rujukan	Indeks kepuasan layanan kesehatan Rumah Sakit Pratama	65	65	28,227,037,801	70	28,723,404,270	71	29,585,106,398	72.5	30,472,659,590.04	75	31,386,839,377.74	77	32,328,444,559.08	77	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
2.1	Upaya Pelayanan Kesehatan Rujukan RS "Pratama"	Operasional Pelayanan kesehatan rujukan RS "Pratama"		12 bulan	4,315,828,000	12 bulan	4,770,710,800	12 bulan	4,913,832,124	12 bulan	5,061,247,087.72	12 bulan	5,213,084,500.35	12 bulan	5,369,477,035.36	12 bulan		
2.2	Pendukung Pelayanan Kesehatan Rujukan RS "Pratama"	Oparasional pendukung pelayanan kesehatan rujukan RS "Pratama"		9 dokumen	23,911,209,801	9 dokumen	23,952,693,470	9 dokumen	24,671,274,274	9 dokumen	25,411,412,502.32	9 dokumen	26,173,754,877.39	9 dokumen	26,958,967,523.71	9 dokumen		
3	Program Upaya Pelayanan Kesehatan	Persentase penduduk miskin mendapatkan jaminan kesehatan	100%	100%	21,407,884,196	100%	35,667,151,251	100%	36,737,165,789	100%	37,839,280,762.19	100%	38,974,459,185.05	100%	40,143,692,960.60	100%	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
		Persentase Penduduk yang mempunyai JKN	88%	88%		94%		100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%		
		Persentase Fasilitas kesehatan milik pemerintah yang difasilitasi akreditasi	95%	95%		95%		100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%		
		Persentase Fasilitas kesehatan tingkat pertama milik pemerintah yang memnuhi standar	100%	100%		100%		100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%		
		Persentase Rumah Sakit yang mendapat pendampingan sistem pelayanan rujukan	57.14%	57.14%		66.67%		76.19%	-	85.71%	-	95.24%	-	100%	-	100%		

		Cakupan penanganan Kegawatdaruratan kesehatan	91%	91%		92%		93%	-	94%	-	95%	-	96%	-	96%		
		Persentase hasil Pemeriksaan kesehatan Haji	100%	100%		100%		100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%		
3.1	Pelayanan Kesehatan Primer dan Rujukan	Tenaga kesehatan di Puskesmas dan Dinas Kesehatan dapat melaksanakan program pelayanan kesehatan dasar		600 orang	302,113,729	600 orang	12,168,704,089	600 orang	12,533,765,212	600 orang	12,909,778,168.02	600 orang	13,297,071,513.06	600 orang	13,695,983,658.45	600 orang	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
		Laporan hasil koordinasi & Evaluasi Pelayanan Program Yankes Primer dan Rujukan		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen		
		Data hasil Penilaian kinepja puskesmas		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen		
		Data Standar Pelayanan Minimal (SPM)		2 dokumen		2 dokumen		2 dokumen	-	2 dokumen	-	2 dokumen	-	2 dokumen	-	2 dokumen		
		Data hasil ASPAK		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen		
		Laporan hasil sosialisasi kebijakan pelayanan kesehatan kepada FKTP & FKTL		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen		
		Rumah Sakit mendapatkan pembinaan pelayanan kesehatan rujukan		12 rumahsakit		12 rumahsakit		12 rumahsakit	-	12 rumahsakit	-	12 rumahsakit	-	12 rumahsakit	-	12 rumahsakit		

		Laporan pelaksanaan kegiatan bersumberdana DAK		2 laporan		2 laporan		2 laporan	-	2 laporan	-	2 laporan	-	2 laporan	-	2 laporan		
3.2	Pelayanan Kesehatan Khusus	Jumlah Puskesmas yang Memberikan pelayanan kesehatan haji		18 Puskesmas	304,744,860	18 Puskesmas	431,288,042	18 Puskesmas	444,226,683	18 Puskesmas	457,553,483.76	18 Puskesmas	471,280,088.27	18 Puskesmas	485,418,490.92	18 Puskesmas	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
		Laporan hasil koordinasi & Evaluasi Pelayanan Program Yankesus		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan	-	1 Laporan	-	1 Laporan	-	1 Laporan	-	1 Laporan		
		Data hasil Pengukuran Kebugaran Jasmani		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen		
		Frekwensi sosialisasi Pedoman Penanganan Bencana Bidang Kesehatan		3 kegiatan		3 kegiatan		3 kegiatan	-	3 kegiatan	-	3 kegiatan	-	3 kegiatan	-	3 kegiatan		
		Frekwensi Pembinaan Battra Komplementer	-	4 kegiatan		4 kegiatan		4 kegiatan	-	4 kegiatan	-	4 kegiatan	-	4 kegiatan	-	4 kegiatan		
3.3	Pengelolaan Penjaminan dan Peningkatan Mutu Kesehatan	Dokumen MOU & Perwal Jamkesda		2 dokumen	20,144,956,150	2 dokumen	21,520,570,510	2 dokumen	22,166,187,625	2 dokumen	22,831,173,254.06	2 dokumen	23,516,108,451.68	2 dokumen	24,221,591,705.23	2 dokumen	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
		Frekwensi sosialisasi mekanisme pelayanan Jamkesda dan jaminan persalinan, Petugas Kesehatan, Lintas Sektor dan masyarakat		31 kali		31 kali		31 kali	-	31 kali	-	31 kali	-	31 kali	-	31 kali		
		Lapoban hasil kegiatan koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi Jamkesda serta persalinan		1 laporan		1 laporan		1 laporan	-	1 laporan	-	1 laporan	-	1 laporan	-	1 laporan		

		Jaminan pembiayaan kesehatan untuk masyarakat Kota Yk yang tidak memiliki jaminan kesehatan, pelayanan 24 jam pertama PSC 119 YES dan Sego Segawe dan pemeriksaan kesehatan bagi Anggota DPRD beserta keluarga Inti serta persalinan		12 kegiatan		12 kegiatan		12 kegiatan	-	12 kegiatan	-	12 kegiatan	-	12 kegiatan	-	12 kegiatan		
		Laporan hasil monitoring - evaluasi pelayanan kesehatan dalam sistem JKN		1 laporan		1 laporan		1 laporan	-	1 laporan	-	1 laporan	-	1 laporan	-	1 laporan		
		Laporan hasil monev dana kapitasi dan anti Fraud FKTP milik Pemerintah Kota Yk		1 laporan		1 laporan		1 laporan	-	1 laporan	-	1 laporan	-	1 laporan	-	1 laporan		
		Laporan sosialisasi, monev dan pendampingan akreditasi puskesmas		1 laporan		1 laporan		1 laporan	-	1 laporan	-	1 laporan	-	1 laporan	-	1 laporan		
3.4	Pengelolaan Operasional Public Safety Center 119	Laporan pelaksanaan kegiatan PSC 119 YES		12 dokumen	656,069,457	12 laporan	1,546,588,610	12 laporan	1,592,986,268	12 laporan	1,640,775,856.35	12 laporan	1,689,999,132.04	12 laporan	1,740,699,106.00	12 laporan	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
4	Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar	100%	100%	6,416,454,806	100%	4,134,617,345	100%	4,258,655,865	100%	4,386,415,541.31	100%	4,518,008,007.55	100%	4,653,548,247.78	100%	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan

Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan Persalinan sesuai standar	100%	100%		100%		100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%		
Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan sesuai standar	100%	100%		100%		100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%		
Persentase balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	100%		100%		100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%		
Persentase anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	100%		100%		100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%		
Persentase warga negara Indonesia usia 60 tahun ke atas mendapat sekrening keehatan sesuai standar	100%	100%		100%		100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%		
Jumlah Wilayah yang melaksanakan KTR	364	364		484		404	-	424	-	444	-	464	-	464		
Cakupan kelurahan siaga aktif (Mandiri)	22%	22%		33%		44%	-	55%	-	66%	-	77%	-	77%		

		Persentase rumah tempat-tempat umum (TTU), tempat pengolahan makanan (TPM) yang memenuhi syarat kesehatan	85%	85%		85.20%		85.50%	-	85.70%	-	86%	-	86.20%	-	86.20%		
		Persentase kualitas air minum yang memenuhi syarat kesehatan	85.20%	85.20%		85.40%			-		-		-		-			
		Persentase Institusi yang melaksanakan UKK	60%	60%		70%		80%	-	87%	-	94%	-	100%	-	100%		
4.1	Pembinaan Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat	Petugas mendapatkan update knowledge dalam pelayanan KIA Gizi		491 orang	2,586,486,677	491 orang	1,370,173,540	491 orang	1,411,278,746	491 orang	1,453,617,108.59	491 orang	1,497,225,621.84	491 orang	1,542,142,390.50	491 orang	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
		Jumlah kader yang mengikuti Peningkatan Kapasitas pelayanan KIA Gizi		318 orang		318 orang		318 orang	-	318 orang	-	318 orang	-	318 orang	-	318 orang		
		Laporan Surveilans KIA Gizi		15 laporan		15 laporan		15 laporan	-	15 laporan	-	15 laporan	-	15 laporan	-	15 laporan		
		Kebijakan / Draf Kebijakan Pelayanan KIA Gizi		7 dokumen		7 dokumen		7 dokumen	-	7 dokumen	-	7 dokumen	-	7 dokumen	-	7 dokumen		
		Jumlah Faskes mendapatkan pembinaan Pelayanan KIA Gizi		24 faskes		24 faskes		24 faskes	-	24 faskes	-	24 faskes	-	24 faskes	-	24 faskes		
		Dokumen Perencanaan KIA Gizi		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen		
		Laporan Skrening Hipotiroid Kongenital		1 laporan		1 laporan		1 laporan	-	1 laporan	-	1 laporan	-	1 laporan	-	1 laporan		
		Frekwensi lomba Ibu Hamil Sehat		2 kali		2 kali		2 kali	-	2 kali	-	2 kali	-	2 kali	-	2 kali		

		dan Baduta tingkat Kota Yk																
4.2	Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan	Jumlah Institusi Kesehatan yang melaksanakan Promosi Kesehatan	20 institusi (18 puskesmas, 1 RSL, 1 Dinkes)	2,377,034,000	20 institusi (18 puskesmas, 1 RSL, 1 Dinkes)	1,827,699,284	20 institusi (18 puskesmas, 1 RSL, 1 Dinkes)	1,882,530,263	20 institusi (18 puskesmas, 1 RSL, 1 Dinkes)	1,939,006,170.40	20 institusi (18 puskesmas, 1 RSL, 1 Dinkes)	1,997,176,355.51	20 institusi (18 puskesmas, 1 RSL, 1 Dinkes)	2,057,091,646.17	20 institusi (18 puskesmas, 1 RSL, 1 Dinkes)		Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
		Jumlah Institusi Pendidikan yang melaksanakan Promosi Kesehatan	300 sekolah (TK/PAUD, SD, SMP, SMA)		300 sekolah (TK/PAUD, SD, SMP, SMA)		300 sekolah (TK/PAUD, SD, SMP, SMA)	-	300 sekolah (TK/PAUD, SD, SMP, SMA)		300 sekolah (TK/PAUD, SD, SMP, SMA)	-	300 sekolah (TK/PAUD, SD, SMP, SMA)	-	300 sekolah (TK/PAUD, SD, SMP, SMA)			
		Jumlah Tempat-tempat Ibadah yang melaksanakan Promosi Kesehatan	200 Lokasi (Masjid)		200 Lokasi (Masjid)		200 Lokasi (Masjid)	-	200 Lokasi (Masjid)		200 Lokasi (Masjid)	-	200 Lokasi (Masjid)	-	200 Lokasi (Masjid)			
		Frekwensi Siaran Radio, TV dan media cetak mengenai Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan	18 kali		18 kali		18 kali	-	18 kali		18 kali	-	18 kali	-	18 kali			
		Frekwensi Publikasi program kesehatan melalui kegiatan massal	1 kegiatan (Pameran Sekaten)		1 kegiatan (Pameran Sekaten)		1 kegiatan (Pameran Sekaten)	-	1 kegiatan (Pameran Sekaten)		1 kegiatan (Pameran Sekaten)	-	1 kegiatan (Pameran Sekaten)	-	1 kegiatan (Pameran Sekaten)			
		Data Stratifikasi Kelurahan Siaga (KESI) di Kota	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen	-	1 dokumen		1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen			
		Data Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM)	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen	-	1 dokumen		1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen			
		Profil PHBS	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen	-	1 dokumen		1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen			
		Data layanan lansia di rumah sehat lansia	12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen	-	12 dokumen		12 dokumen	-	12 dokumen	-	12 dokumen			
		Jumlah pelatihan pengendalian dampak buruk rokok bagi petugas dan masyarakat	3 kali		3 kali		3 kali	-	3 kali		3 kali	-	3 kali	-	3 kali			

4.3	Penyehatan Lingkungan dan Kesehatan Kerja	Jumlah sampel pemeriksaan kualitas air di Kota Yogyakarta	2000 sampel	1,452,934,129	2000 sampel	936,744,521	2000 sampel	964,846,857	2000 sampel	993,792,262.33	2000 sampel	1,023,606,030.20	2000 sampel	1,054,314,211.10	2000 sampel	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	
		Jumlah Sekolah yang mengaplikasikan persyaratan kesehatan lingkungan	50 sekolah		50 sekolah		50 sekolah	-	50 sekolah	-	50 sekolah	-	50 sekolah	-	50 sekolah			
		Jumlah dokumen lingkungan sebagai pengelolaan & pemantauan lingkungan	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen			
		Data Kesehatan Lingkungan	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen			
		Frekwensi Penguatan Pengelola Tempat Pengelolaan Makanan (TPM)	2 kali		2 kali		2 kali	-	2 kali	-	2 kali	-	2 kali	-	2 kali			
		Frekwensi pelaksanaan desinfo tentang penyehatan lingkungan	2 kali		2 kali		2 kali	-	2 kali	-	2 kali	-	2 kali	-	2 kali			
		Data pengelolaan limbah medis cair	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen			
		Frekwensi penguatan Pengurus pokmair dan pengelola DAM	6 kali		6 kali		6 kali	-	6 kali	-	6 kali	-	6 kali	-	6 kali			
		Jumlah Puskesmas yang dinilai kebersihannya	18 Puskesmas		18 Puskesmas		18 Puskesmas	-	18 Puskesmas	-	18 Puskesmas	-	18 Puskesmas	-	18 Puskesmas			
		Jumlah Puskesmas yang diperiksa kebisingan dan pencahayaan indoor	5 Puskesmas		5 Puskesmas		5 Puskesmas	-	5 Puskesmas	-	5 Puskesmas	-	5 Puskesmas	-	5 Puskesmas			
		Dokumen lokasi unggulan kota sehat di Kota Yogyakarta	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen			
		Frekwensi sosialisai penerapan prinsip kesehatan kerja	2 kali		2 kali		2 kali	-	2 kali	-	2 kali	-	2 kali	-	2 kali			
Dokumen kajian	1		1		1	-	1	-	1	-	1	-	1					

		review EHRA		dokume n		dokume n		dokume n	-	dokume n	-	dokume n	-	dokume n	-	dokume n		
5	Program Regulasi dan Pengemb angan Sumber Daya Kesehatan	Persentase Fasilitas kesehatan yang sesuai standar	80%	80%	10,703,668, 095	82%	11,811,801, 960	84%	12,166,156, 019	86%	12,531,140,6 99.36	88%	12,907,074,9 20.34	90%	13,294,287,1 67.96	90%	Dinas Kesehat an	Dinas Kesehatan
		Persentase tenaga kesehatan yang berijin	70%	70%		75%		80%	-	85%	-	90%	-	90%	-	90%		
		Persentase sertifikasi hotel, restoran dan kolam renang yang sudah tersertifikasi laik sehat	55%	55%		65%		75%	-	85%	-	96%	-	96%	-	96%		
		Persentase Tenaga Kesehatan yang sesuai kompetensi	80%	80%		85%		90%	-	93%	-	95%	-	96%	-	96%		
		Persentase Penyehat tradisional yang terdaftar	60%	60%		65%		70%	-	75%	-	80%	-	80%	-	80%		
		Persentase ketersediaan obat, vaksin dan alkes	95%	95%		96%		97%	-	98%	-	98%	-	98%	-	98%		
		Persentase penggunaan obat rasional di Puskesmas	85%	85%		90%		90%	-	90%	-	90%	-	90%	-	90%		
5.1	Pembinaan Regulasi Sarana Prasarana dan	Peserta Sertifikasi Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP) Masyarakat di		1200 orang	587,905,82 9	1200 orang	598,942,59 9	1200 orang	616,910,87 7	1200 orang	635,418,203. 28	1200 orang	654,480,749. 38	1200 orang	674,115,171. 86	1200 orang	Dinas Kesehat an	Dinas Kesehatan

Sertifikasi Bidang Kesehatan	Kota Yogyakarta																	
	Produsen Industri Rumah Tangga mendapat sertifikat Produk Pangan Industri Rumah Tangga	400 orang		400 orang		400 orang	-	400 orang	-	400 orang	-	400 orang	-	400 orang				
	Sertifikasi masyarakat Pengelola Pedagang Kaki Lima Pangan, Pengelola jasa boga dan rumah makan, Pengelola Depot Air Minum dalam kesmasan, pengelola kantin sekolah di Kota Yogyakarta	200 orang		200 orang		200 orang	-	200 orang	-	200 orang	-	200 orang	-	200 orang				
	Tenaga kesehatan mendapatkan layanan regulasi dibidang kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	600 orang		600 orang		600 orang	-	600 orang	-	600 orang	-	600 orang	-	600 orang				
	Tenaga dan fasilitas pelayanan kesehatan mendapatkan layanan regulasi dan sertifikasi dalam sesuai dengan bidangnya	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen				
	Dokumen penyelesaian permasalahan regulasi dan sertifikasi dalam organisasi profesi	2 dokumen		2 dokumen		2 dokumen	-	2 dokumen	-	2 dokumen	-	2 dokumen	-	2 dokumen				
	Masyarakat mendapatkan pengetahuan tentang manfaat SPP_IRT	200 orang		200 orang		200 orang	-	200 orang	-	200 orang	-	200 orang	-	200 orang				
	Dokumen revisi perwal No. 13 tahun 2009 tentang juklak izin penyelegaraan sarana kesehatan dan izin tenaga kesehatan	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen				

		Frekuensi sarasehan tentang Raperda regulasi dan sertifikasi sarana tenaga kesehatan		14 kali		14 kali		14 kali	-	14 kali	-	14 kali	-	14 kali	-	14 kali		
		Laporan monitoring dan evaluasi izin dan sertifikasi antar kabupaten		1 laporan		1 laporan		1 laporan	-	1 laporan	-	1 laporan	-	1 laporan	-	1 laporan		
		Produk Regulasi tentang sertifikasi perijinan dan tanda terdaftar bidang kesehatan		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen		
5.2	Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK)	Tenaga kesehatan teladan terpilih di Puskesmas tingkat Kota Yogyakarta		5 orang	367,004,244	5 orang	613,401,599	5 orang	631,803,647	5 orang	650,757,756.38	5 orang	670,280,489.07	5 orang	690,388,903.74	5 orang	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
		Fasilitasi PKL (Praktek Kerja Lapangan) mahasiswa institusi kesehatan di lingkungan Dinkes Kota Yogyakarta		10 bulan		10 bulan		10 bulan	-	10 bulan	-	10 bulan	-	10 bulan	-	10 bulan		
		Dokumen perencanaan SDMK		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen		
		Frekuensi pembinaan SDMK		17 kali		17 kali		17 kali	-	17 kali	-	17 kali	-	17 kali	-	17 kali		
		Laporan hasil Penilaian kompetensi tenaga kesehatan		1 laporan		1 laporan		1 laporan	-	1 laporan	-	1 laporan	-	1 laporan	-	1 laporan		
		Dokter puskesmas mendapat sertifikat ATLS dan atau sertifikat ACLS		19 orang		19 orang		19 orang	-	19 orang	-	19 orang	-	19 orang	-	19 orang		
		Perawat mendapatkan sertifikat Pelatihan PPGD/BTCLS		10 orang		10 orang		10 orang	-	10 orang	-	10 orang	-	10 orang	-	10 orang		
		Tenaga kesehatan mendapatkan sertifikat pelatihan		52 Orang		52 Orang		52 Orang	-	52 Orang	-	52 Orang	-	52 Orang	-	52 Orang		
		Frekuensi Pembaruan Data SDMK tingkat Kota Yogyakarta		2 kali		2 kali		2 kali	-	2 kali	-	2 kali	-	2 kali	-	2 kali		

		Laporan Monitoring dan evaluasi nakes UPT	1 laporan		1 laporan		1 laporan	-	1 laporan	-	1 laporan	-	1 laporan	-	1 laporan		
		Peserta seminar/kursus/workshop	220 orang		220 orang		220 orang	-	220 orang	-	220 orang	-	220 orang	-	220 orang		
5.3	Pengelolaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Obat dan vaksin untuk layanan kesehatan tersedia	12 bulan	9,748,758,022	12 bulan	10,599,457,762	12 bulan	10,917,441,495	12 bulan	11,244,964,739.71	12 bulan	11,582,313,681.90	12 bulan	11,929,783,092.35	12 bulan	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
		Data Monitoring penggunaan obat rasional	4 dokumen		4 dokumen		4 dokumen	-	4 dokumen	-	4 dokumen	-	4 dokumen	-	4 dokumen		
		Data ketersediaan obat dan vaksin	12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen	-	12 dokumen	-	12 dokumen	-	12 dokumen	-	12 dokumen		
		Jumlah tenaga kefarmasian di Kota Yogyakarta mendapatkan Bimbingan teknis tentang kefarmasian	250 orang		250 orang		250 orang	-	250 orang	-	250 orang	-	250 orang	-	250 orang		
		Jumlah tenaga analis lab Kesehatan yang mendapatkan update knowledge tentang pengelolaan laboratorium sesuai standar	50 orang		50 orang		50 orang	-	50 orang	-	50 orang	-	50 orang	-	50 orang		
		Integrasi penggunaan aplikasi e-logistic obat	1 kegiatan		1 kegiatan		1 kegiatan	-	1 kegiatan	-	1 kegiatan	-	1 kegiatan	-	1 kegiatan		
		Data penghapusan obat, vaksin dan alat kesehatan rusak/kadaluarsa	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen		
		Alat kesehatan di Puskesmas dikelola dan dilakukan pemeliharaan sesuai standar	18 Puskesmas		18 Puskesmas		18 Puskesmas	-	18 Puskesmas	-	18 Puskesmas	-	18 Puskesmas	-	18 Puskesmas		
		Jumlah penjamah makanan dan minuman yang dibina	1200 orang		1200 orang		1200 orang	-	1200 orang	-	1200 orang	-	1200 orang	-	1200 orang		
		Jumlah sekolah yang mendapat Sosialisasi keamanan pangan	100 sekolah		100 sekolah		100 sekolah	-	100 sekolah	-	100 sekolah	-	100 sekolah	-	100 sekolah		

		jajan anak sekolah																
		Jumlah sample pangan jajan anak sekolah yang diperiksa		100 sample		100 sample		100 sample	-	100 sample	-	100 sample	-	100 sample	-	100 sample		
		Frekuensi Lomba Sekolah Dasar pangan jajanan anak sekolah		1 kali		1 kali		1 kali	-	1 kali	-	1 kali	-	1 kali	-	1 kali		
		Mobil distribusi farmasi tersedia		1 unit		1 unit		1 unit	-	1 unit	-	1 unit	-	1 unit	-	1 unit		
		Sarana pengolahan data kefarmasian tersedia		1 laporan		1 laporan		1 laporan	-	1 laporan	-	1 laporan	-	1 laporan	-	1 laporan		
		Mobil sampling makanan tersedia		1 unit		1 unit		1 unit	-	1 unit	-	1 unit	-	1 unit	-	1 unit		
6	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Persentase penderita TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	100%	100%	1,810,585,351	100%	3,419,428,870	100%	3,522,011,736	100%	3,627,672,088.18	100%	3,736,502,250.83	100%	3,848,597,318.35	100%	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
		Persentase orang beresiko terinfeksi HIV AIDs (Ibu hamil, pasien TB, Pasien IMS, Waria/Trnasgender, pengguna Napza dan Warga binaan Lembaga Pemasyarakatan) mendapatkan pemeriksaan HIV AIDs	100%	100%		100%		100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%		
		Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	100%	100%		100%		100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%		

Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	100%	100%		100%		100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%		
Persentase penduduk kota usia 15 s/d 59 tahun mendapat skrining kesehatan sesuai standar	100%	100%		100%		100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%		
Persentase Penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	100%		100%		100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%		
Persentase penderita diabetes militus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	100%		100%		100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%		
Persentase orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	100%		100%		100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%		

		cakupan kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam	100%	100%		100%		100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%		
6.1	Pengelolaan Surveilans dan Sistem Informasi Kesehatan	Laporan survailens epidemiologi		3 laporan	564,720,101	3 laporan	269,651,380	3 laporan	277,740,921	3 laporan	286,073,149.04	3 laporan	294,655,343.51	3 laporan	303,495,003.82	3 laporan	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
		Laporan penyelidikan epidemiologi		12 laporan		12 laporan		12 laporan	-	12 laporan	-	12 laporan	-	12 laporan	-	12 laporan		
		Laporan survailans penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I)		12 laporan		12 laporan		12 laporan	-	12 laporan	-	12 laporan	-	12 laporan	-	12 laporan		
		Buletin sistem kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR)		52 edisi		52 edisi		52 edisi	-	52 edisi	-	52 edisi	-	52 edisi	-	52 edisi		
		Laporan sistem informasi kesehatan puskesmas dan rumah sakit		12 laporan		12 laporan		12 laporan	-	12 laporan	-	12 laporan	-	12 laporan	-	12 laporan		
		Laporan penyebab kematian (cause of death)		12 laporan		12 laporan		12 laporan	-	12 laporan	-	12 laporan	-	12 laporan	-	12 laporan		
		Laporan komunikasi data prioritas (KOMDAT)		17 laporan		17 laporan		17 laporan	-	17 laporan	-	17 laporan	-	17 laporan	-	17 laporan		
		Laporan survey kepuasan masyarakat		2 laporan		2 laporan		2 laporan	-	2 laporan	-	2 laporan	-	2 laporan	-	2 laporan		
		Data Profil kesehatan		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen		
		jumlah Aplikasi-server-database SIMPUS yang berjalan optimal		18 sistem		18 sistem		18 sistem	-	18 sistem	-	18 sistem	-	18 sistem	-	18 sistem		
		Websit kesehatan berjalan optimal		1 sistem		1 sistem		1 sistem	-	1 sistem	-	1 sistem	-	1 sistem	-	1 sistem		
6.2	Pencegahan, Pengendalian Penyakit Menular dan	Data DBD (Demam Berdarah Dengue)		12 dokumen	1,046,742,000	12 dokumen	2,964,345,411	12 dokumen	3,053,275,773	12 dokumen	3,144,874,046.53	12 dokumen	3,239,220,267.93	12 dokumen	3,336,396,875.96	12 dokumen	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan

Imunisasi	Jumlah pelaksanaan fogging focus DBD & chikungunya & Penanggulangan KLB	400 focus		400 focus		400 focus	-	400 focus	-	400 focus	-	400 focus	-	400 focus		
	Laporan survei angka bebas jentik kelurahan	1 laporan		1 laporan		1 laporan	-	1 laporan	-	1 laporan	-	1 laporan	-	1 laporan		
	Laporan pengendalian DBD	12 laporan		12 laporan		12 laporan	-	12 laporan	-	12 laporan	-	12 laporan	-	12 laporan		
	Laporan P2TB (pengendalian penyakit tuberculosis)	12 laporan		12 laporan		12 laporan	-	12 laporan	-	12 laporan	-	12 laporan	-	12 laporan		
	Jumlah Penderita TB & PMO yang memperoleh motivasi untuk meningkatkan kesembuhan penyakit TB	200 orang		200 orang		200 orang	-	200 orang	-	200 orang	-	200 orang	-	200 orang		
	Data Permasalahan TB-HIV	2 dokumen		2 dokumen		2 dokumen	-	2 dokumen	-	2 dokumen	-	2 dokumen	-	2 dokumen		
	Jumlah petugas dalam penguatan jejaring internal petugas TB puskesmas dan RS	120 orang		120 orang		120 orang	-	120 orang	-	120 orang	-	120 orang	-	120 orang		
	Jumlah petugas Lab TB di fasyankes yang mendapatkan <i>on the job training</i>	30 orang		30 orang		30 orang	-	30 orang	-	30 orang	-	30 orang	-	30 orang		
	Jumlah fasyankes yang mendapatkan <i>on the job training</i> TB MDR	4 fasyankes		4 fasyankes		4 fasyankes	-	4 fasyankes	-	4 fasyankes	-	4 fasyankes	-	4 fasyankes		
	Data Infeksi Saluran Paru Akut (ISPA) dan data diare	24 dokumen		24 dokumen		24 dokumen	-	24 dokumen	-	24 dokumen	-	24 dokumen	-	24 dokumen		
	Laporan pelacakan kasus kusta	1 laporan		1 laporan		1 laporan	-	1 laporan	-	1 laporan	-	1 laporan	-	1 laporan		
	Jumlah data hasil pemeriksaan spesimen darah risti pada pasien IMS dan HIV/AIDS	320 data		320 data		320 data	-	320 data	-	320 data	-	320 data	-	320 data		

		Data tribulanan Aplikasi SIHA (Sistem Informasi HIV AIDS) pada IMS (Infeksi Menular Seksual)	4 dokumen		4 dokumen		4 dokumen	-	4 dokumen	-	4 dokumen	-	4 dokumen	-	4 dokumen		
		Jumlah laporan Peningkatan kapasitas layanan HIV	1 laporan		1 laporan		1 laporan	-	1 laporan	-	1 laporan	-	1 laporan	-	1 laporan		
		Data imunisasi, pemeriksaan hepatitis dan vaksin baru	12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen	-	12 dokumen	-	12 dokumen	-	12 dokumen	-	12 dokumen		
		Jumlah sekolah yang melaksanakan BIAS (Bulan Imunisasi Anak Sekolah)	177 sekolah		177 sekolah		177 sekolah	-	177 sekolah	-	177 sekolah	-	177 sekolah	-	177 sekolah		
		Jumlah Peserta penguatan layanan praktisi swasta	70 orang		70 orang		70 orang	-	70 orang	-	70 orang	-	70 orang	-	70 orang		
		Data Audit kasus kematian penyakit menular bagi RS dan puskesmas	6 dokumen		6 dokumen		6 dokumen	-	6 dokumen	-	6 dokumen	-	6 dokumen	-	6 dokumen		
		Frekuensi sosialisasi tentang pengendalian penyakit menular	25 kali		25 kali		25 kali	-	25 kali	-	25 kali	-	25 kali	-	25 kali		
		Petugas puskesmas dan RS memperoleh informasi terbaru tentang penatalaksanaan penyakit menular dan mampu mengimplementasikannya	270 orang		270 orang		270 orang	-	270 orang	-	270 orang	-	270 orang	-	270 orang		
6.3	Pencegahan, Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan	Jumlah peserta Workshop Pencegahan penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa	400 orang	199,123,250	400 orang	185,432,079	400 orang	190,995,041	400 orang	196,724,892.61	400 orang	202,626,639.39	400 orang	208,705,438.57	400 orang	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan

	Jiwa	Jumlah WUS (Wanita Usia Subur) yang di periksa untuk deteksi dini kanker leher rahim dengan metode IVA		900 orang		900 orang		900 orang	-	900 orang	-	900 orang	-	900 orang	-	900 orang		
		jumlah orang yang diperiksa untuk deteksi dini faktor resiko Penyakit Tidak Menular pada populasi resiko usia > 15 th		1800 orang		1800 orang		1800 orang	-	1800 orang	-	1800 orang	-	1800 orang	-	1800 orang		
		Masyarakat lintas program, petugas kesehatan dan lintas sektor mendapatkan informasi terbaru tentang PTM		100 orang		100 orang		100 orang	-	100 orang	-	100 orang	-	100 orang	-	100 orang		
		Data evaluasi kegiatan suveilans PTM puskesmas		12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen	-	12 dokumen	-	12 dokumen	-	12 dokumen	-	12 dokumen		
		Jumlah Peserta Up date Knowledge penyakit tidak menular		84 orang		84 orang		84 orang	-	84 orang	-	84 orang	-	84 orang	-	84 orang		
		Peningkatan kapasitas POSBINDU		175 orang		175 orang		175 orang	-	175 orang	-	175 orang	-	175 orang	-	175 orang		
7	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	100%	3,980,766.292	100%	3,972,006.819	100%	4,091,167,024	100%	4,213,902.034.28	100%	4,340,319,095.31	100%	4,470,528,668.16	100%	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
7.1	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Minuman Karyawan Dinas, Farmakes, Lab PKA		38.720 orang	361,706,000	38.720 orang	358,500,000	38.720 orang	369,255,000	38.720 orang	380,332,650.00	38.720 orang	391,742,629.50	38.720 orang	403,494,908.39	38.720 orang	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
		Makanan dan minuman untuk penyelenggaraan rapat koordinasi		7.127 orang		7595 orang		7595 orang	-	7595 orang	-	7595 orang	-	7595 orang	-	7595 orang		
		Makanan dan minuman untuk tamu		435 orang		540 orang		540 orang	-	540 orang	-	540 orang	-	540 orang	-	540 orang		
		Rapat koordinasi & konsultasi keluar Daerah dapat diselenggarakan dengan lancar		96 ok		94 ok		94 ok	-	94 ok	-	94 ok	-	94 ok	-	94 ok		

7.2	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat Tulis Kantor	1 paket	749,102,624	1 dokumen	755,337,379	1 dokumen	777,997,500	1 dokumen	801,337,425.38	1 dokumen	825,377,548.14	1 dokumen	850,138,874.59	1 dokumen	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	
		Alat listrik dan elektronik	13 kali		12 kali		12 kali	-	12 kali	-	12 kali	-	12 kali	-	12 kali			
		Materai @ Rp. 6.000	400 lembar		400 lembar		400 lembar	-	400 lembar	-	400 lembar	-	400 lembar	-	400 lembar			
		Materai @ Rp. 3.000	250 lembar		250 lembar		250 lembar	-	250 lembar	-	250 lembar	-	250 lembar	-	250 lembar			
		Catatan pengiriman dokumen Dinas (surat tercatat)	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen			
		Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	1 paket		4 kegiatan		4 kegiatan	-	4 kegiatan	-	4 kegiatan	-	4 kegiatan	-	4 kegiatan			
		Jumlah Tabung Pemadam Kebakaran yang diisi	5 tabung		5 tabung		5 tabung	-	5 tabung	-	5 tabung	-	5 tabung	-	5 tabung			
		Frekuensi Pengisian Tabung Gas Farmakes	6 kali		6 kali		6 kali	-	6 kali	-	6 kali	-	6 kali	-	6 kali			
		Peralatan rumah tangga sesuai kebutuhan	4 kegiatan		4 kegiatan		4 kegiatan	-	4 kegiatan	-	4 kegiatan	-	4 kegiatan	-	4 kegiatan			
		Telepon untuk operasional Dinas, Farmakes; Lab. Kualitas Air dapat dimanfaatkan	12 bulan		12 bulan		12 bulan	-	12 bulan	-	12 bulan	-	12 bulan	-	12 bulan			
		Surat Kabar Harian untuk Dinkes	24 eksemplar		24 eksemplar		24 eksemplar	-	24 eksemplar	-	24 eksemplar	-	24 eksemplar	-	24 eksemplar			
		Retribusi kebersihan untuk Dinas dan Puskesmas dibayarkan tepat waktu	12 bulan		12 bulan		12 bulan	-	12 bulan	-	12 bulan	-	12 bulan	-	12 bulan			
		Jumlah kendaraan operasional Dinas Kesehatan yang diuji kelayakannya	5 unit		5 unit		5 unit	-	5 unit	-	5 unit	-	5 unit	-	5 unit			
		Perpanjangan STNK Roda 4 tepat waktu	23 unit		23 unit		23 unit	-	23 unit	-	23 unit	-	23 unit	-	23 unit			
		Perpanjangan STNK Roda 2 tepat waktu	27 unit		27 unit		27 unit	-	27 unit	-	27 unit	-	27 unit	-	27 unit			
		Penggantian Plat Nomor kendaraan roda 2 tepat waktu	17 unit		17 unit		17 unit	-	17 unit	-	17 unit	-	17 unit	-	17 unit			
		Penggantian Plat Nomor kendaraan roda 4 tepat waktu	5 unit		5 unit		5 unit	-	5 unit	-	5 unit	-	5 unit	-	5 unit			

		Jasa Cetak blangko untuk Dinas dan Puskesmas		4 jenis		4 jenis		4 jenis	-	4 jenis	-	4 jenis	-	4 jenis	-	4 jenis		
		Jasa penggandaan		1.000,33 lembar		1.000,33 lembar		1.000,33 lembar	-	1.000,33 lembar	-	1.000,33 lembar	-	1.000,33 lembar	-	1.000,33 lembar		
		Peralatan dan perlengkapan kantor dan kerumahtanggaan yang terpelihara		12 bulan		12 bulan		12 bulan	-	12 bulan	-	12 bulan	-	12 bulan	-	12 bulan		
		Jasa kebersihan kantor		12 bulan		12 bulan		12 bulan	-	12 bulan	-	12 bulan	-	12 bulan	-	12 bulan		
		Suku cadang laptop/note book, Komputer, LCD Proyektor, dan Printer		10 Jenis		10 Jenis		10 Jenis	-	10 Jenis	-	10 Jenis	-	10 Jenis	-	10 Jenis		
		Buku bacaan dan peraturan perundang-undangan		38 buku		38 buku		38 buku	-	38 buku	-	38 buku	-	38 buku	-	38 buku		
7.3	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Dokumen Administrasi penatausahaan keuangan		4 jenis	2,869,957,668	4 jenis	2,858,169,440	4 jenis	2,943,914,523	4 jenis	3,032,231,958.90	4 jenis	3,123,198,917.66	4 jenis	3,216,894,885.19	4 jenis	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
		Jasa tenaga bantuan (Naban) dapat dilaksanakan sesuai aturan		111 orang		111 orang		111 orang	-	111 orang	-	111 orang	-	111 orang	-	111 orang		
		Dokumen Admistrasi kepegawain yang dikelola		52 dokumen		52 dokumen		52 dokumen	-	52 dokumen	-	52 dokumen	-	52 dokumen	-	52 dokumen		
		Jasa pengelola arsip		2 orang		2 orang		2 orang	-	2 orang	-	2 orang	-	2 orang	-	2 orang		
		Jasa pengelola perpustakaan		2 orang		2 orang		2 orang	-	2 orang	-	2 orang	-	2 orang	-	2 orang		
		Jasa Keamanan Farmakes		12 bulan		12 bulan		12 bulan	-	12 bulan	-	12 bulan	-	12 bulan	-	12 bulan		
8	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100%	100%	314,594,400	100%	369,275,000	100%	380,353,250	100%	391,763,847.50	100%	403,516,762.93	100%	415,622,265.81	100%	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan

8.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	Jasa pemeliharaan Gedung Dinkes, Lab. PKA, Farmakes, Rusela, & RPG		2 paket	123.974.400	10 jenis	98,000,000	10 jenis	100,940,000	10 jenis	103,968,200.00	10 jenis	107,087,246.00	10 jenis	110,299,863.38	10 jenis		
8.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jasa Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/operasional roda 4		23 unit	190.620.000	23 unit	271,275,000	23 unit	279,413,250	23 unit	287,795,647.50	23 unit	296,429,516.93	23 unit	305,322,402.43	23 unit		
		Jasa Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/operasional roda 2		27 unit		27 unit		27 unit	-	27 unit	-	27 unit	-	27 unit	-	27 unit		
9	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase peningkatan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	206,590,000	100%	40,430,000	100%	41,642,900	100%	42,892,187.00	100%	44,178,952.61	100%	45,504,321.19	100%	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
9.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	Dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran OPD		10 dokumen	206.590.000	10 dokumen	40,430,000	10 dokumen	41,642,900	10 dokumen	42,892,187.00	10 dokumen	44,178,952.61	10 dokumen	45,504,321.19	10 dokumen		
		Laporan Kinerja OPD		8 laporan		8 laporan		8 laporan	-	8 laporan	-	8 laporan	-	8 laporan	-	8 laporan		
JUMLAH					118,045,196,956		130,576,018,321		134,493,298,871		138,528,097,837		142,683,940,771.85		146,964,458,995			

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN KESEHATAN

Pada Bagian ini dikemukakan indikator kinerja Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta yang secara langsung menunjukkan kinerja akan dicapai Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Berikut Indikator Kinerja Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD :

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Sasaran Dinas Kesehatan yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN					
		THN 0	(2017)	(2018)	(2019)	(2020)	(2021)	(2022)
1.	Mutu Fasilitas Kesehatan Meningkat	61.54%	61.54 %	69.23 %	71.79 %	74.36 %	76.92 %	79.49 %
2.	Keluarga Sehat Meningkat	40%	40%	42%	45%	47%	50%	52%

Tabel 7.2

Indikator Kinerja Program Dinas Kesehatan yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			(2017)	(2018)	(2019)	(2020)	(2021)	(2022)	
1	Indeks kepuasan layanan kesehatan puskesmas	77	77	78	79	80	80.5	81	81
2	Indeks kepuasan layanan kesehatan Rumah Sakit Pratama	65	65	70	71	72.5	75	77	77
3	Persentase penduduk miskin mendapatkan jaminan kesehatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Persentase penduduk yang mempunyai JKN	88%	88%	94%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Persentase Fasilitas	95%	95%	95%	100%	100%	100%	100%	100%

	kesehatan milik pemerintah yang difasilitasi akreditasi								
6	Persentase Fasilitas kesehatan tingkat pertama milik pemerintah yang memenuhi standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Persentase Rumah Sakit yang mendapat pendampingan sistem pelayanan rujukan	57.14%	57.14%	66.67 %	76.19 %	85.71 %	95.24 %	100%	100%
8	Cakupan Penanganan Kegawatdaruratan Kesehatan	91%	91%	92%	93%	94%	95%	96%	96%
9	Persentase hasil pemeriksaan Kesehatan Jemaah Haji	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
10	Persentase Fasilitas kesehatan yang sesuai standar	80%	80%	82%	84%	86%	88%	90%	90%
11	Persentase tenaga Kesehatan yang berijin	70%	70%	75%	80%	85%	90%	90%	90%
12	Persentase sertifikasi hotel, restoran dan kolam renang yang sudah tersertifikasi laik sehat	55%	55%	65%	75%	85%	96%	96%	96%
13	Persentase Tenaga Kesehatan sesuai Kompetensi	80%	80%	85%	90%	93%	95%	96%	96%
14	Persentase Tenaga Penyehat Tradisional yang terdaftar	60%	60%	65%	70%	75%	80%	80%	80%
15	Persentase ketersediaan obat, vaksin dan alkes	95%	95%	96%	97%	98%	98%	98%	98%
16	Persentase penggunaan obat rasional di Puskesmas	85%	85%	90%	90%	90%	90%	90%	90%

17	Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Antenatal sesuai Standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
18	Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan sesuai Standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
19	Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan sesuai Standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
20	Persentase balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
21	Persentase anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
22	Persentase warga negara Indonesia usia 60 tahun ke atas mendapat skrening kesehatan sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
23	Jumlah Wilayah yang melaksanakan KTR	364	364	384	404	424	444	464	464
24	Cakupan Kelurahan Siaga Aktif (Mandiri)	22%	22%	33%	44%	55%	66%	77%	77%
25	Persentase rumah, Tempat-tempat Umum (TTU), Tempat Pengolahan Makanan (TPM) yang memenuhi syarat kesehatan	85%	85%	85.20 %	85.50 %	85.70 %	86%	86.20 %	86.20%
26	Presentase Kualitas Air Minum yang Memenuhi Syarat Kesehatan	85.20%	85.20%	85.40 %	85.60 %	85.80 %	86%	86.20 %	86.20%
27	Persentase Institusi	60%	60%	70%	80%	87%	94%	100%	100%

	yang melaksanakan UKK								
28	Persentase penderita TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
29	Persentase orang berisiko terinfeksi HIV AiDs (Ibu Hamil, Pasien TB, Pasien IMS, waria/transgender, pengguna napza dan warga binaan lembaga pemasyarakatan) mendapatkan Pemeriksaan HIV AIDs	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
30	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
31	Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
32	Persentase penduduk kota usia 15 s/d 59 tahun mendapat skrening kesehatan sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
33	Persentase penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
34	Persentase penderita Diabetes melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
35	Persentase orang dengan gangguan Jiwa	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

	(ODGJ) berat mendapat pelayanan kesehatan sesuai standart								
36	Cakupan Kelurahan Mengalami KLB yang Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 jam	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

BAB VIII PENUTUP

Dokumen Rencana Strategi (Renstra) Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta tahun 2017-2022 disusun mengacu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakarta tahun 2017-2022 dan Rencana Strategi Kementerian Kesehatan selaku kementerian teknis. Rencana Strategi Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta 2017-2022 disusun untuk menjadi acuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan penilaian kinerja Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta yang didalamnya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program serta kegiatan indikatif kurun waktu 2017-2022. Kegiatan indikatif tersebut nantinya akan dijabarkan lebih lanjut ke dalam suatu rencana kerja tahunan. Renstra ini merupakan langkah awal dalam rangka pengukuran kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja satuan. Untuk keberhasilan pencapaian visi, misi, target indikator tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang sudah disusun, pelaksanaan renstra Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta tahun 2017-2022 menjadi tanggung jawab bersama dari pemerintah, dunia usaha dan masyarakat.

Jika di kemudian hari diperlukan adanya perubahan pada Renstra Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta tahun 2017-2022, maka akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya.